



BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 26 TAHUN 2023
TENTANG
KODE KLASIFIKASI ARSIP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Klasifikasi Arsip;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 89);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE KLASIFIKASI ARSIP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan Arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan.
7. Kode Klasifikasi Arsip adalah simbol atau tanda pengenal suatu struktur fungsi yang digunakan untuk membantu menyusun tata letak identitas Arsip.

8. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan Arsip dinamis.
9. Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta Arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
10. Pengelolaan Arsip Dinamis adalah proses pengendalian Arsip dinamis secara efisien, efektif, dan sistematis melalui penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan, serta penyusutan Arsip.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini sebagai dasar bagi Perangkat Daerah untuk menciptakan keseragaman penggunaan Kode Klasifikasi Arsip dalam Pengelolaan Arsip Dinamis.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan sistem pengelolaan Arsip secara terintegrasi sejak penciptaan, penggunaan, dan pemeliharaan hingga penyusutan Arsip;
 - b. menunjang kelancaran penataan berkas sejak penomoran Arsip, pemberkasan, hingga penemuan kembali Arsip; dan
 - c. mewujudkan tertib Arsip di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II

KODE KLASIFIKASI ARSIP

Pasal 3

- (1) Klasifikasi Arsip disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan tugas dan fungsi Pencipta Arsip yang meliputi :
 - a. fungsi fasilitatif; dan
 - b. fungsi substantif.

- (3) Fungsi fasilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kegiatan yang menghasilkan produk administratif atau penunjang dari tugas yang dilakukan di unit kerja di Perangkat Daerah.
- (4) Fungsi substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi kegiatan pokok Pencipta Arsip yang membedakan antara Pencipta Arsip yang satu dengan yang lain.
- (5) Klasifikasi Arsip menggunakan Kode Klasifikasi Arsip berupa angka.
- (6) Kode Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berfungsi sebagai dasar penomoran surat, pemberkasan, penataan, penyusutan, dan penemuan kembali Arsip.

Pasal 4

Ketentuan mengenai Kode Klasifikasi Arsip tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENDANAAN

Pasal 5

Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 49 Tahun 2014 tentang Pedoman Klasifikasi Arsip (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 Nomor 49), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 9 Juni 2023
BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar

pada tanggal 9 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

TIMOTIUS SURYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2023 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum,



METTY FERRISKA R.
NIP. 197604171999032007



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 26 TAHUN 2023
TENTANG
KODE KLASIFIKASI ARSIP

KODE KLASIFIKASI ARSIP

000	UMUM
000.1	KETATAUSAHAAN DAN KERUMAHTANGGAAN
000.1.1	Telekomunikasi
000.1.2	Perjalanan Dinas Dalam Negeri
000.1.2.1	Perjalanan Dinas Kepala Daerah
000.1.2.2	Perjalanan Dinas DPRD
000.1.2.3	Perjalanan Dinas Pegawai
000.1.3	Perjalanan Dinas Luar Negeri
000.1.3.1	Perjalanan Dinas Kepala Daerah
000.1.3.2	Perjalanan Dinas DPRD
000.1.3.3	Perjalanan Dinas Pegawai
000.1.4	Penggunaan Fasilitas Kantor (antara lain: Permintaan dan Penggunaan Ruang Rapat, Gedung, Kendaraan, Wisma, Rumah Dinas dan Fasilitas Kantor Lainnya)
000.1.5	Rapat pimpinan (antara lain: Notula/Risalah Rapat)
000.1.6	Penyediaan Konsumsi
000.1.7	Pengurusan Kendaraan Dinas
000.1.7.1	Pengurusan surat-surat kendaraan dinas
000.1.7.2	Pemeliharaan dan perbaikan
000.1.7.3	Pengurusan kehilangan dan masalah kendaraan
000.1.8	Pemeliharaan Gedung, Taman dan Peralatan Kantor
000.1.8.1	Pertamanan/ <i>Landscape</i>
000.1.8.2	Penghijauan
000.1.8.3	Perbaikan Gedung
000.1.8.4	Perbaikan Peralatan Kantor
000.1.8.5	Perbaikan Rumah Dinas/Wisma
000.1.8.6	Kebersihan Gedung dan Taman
000.1.9	Pengelolaan Jaringan Listrik, Air, Telepon dan Komputer
000.1.9.1	Perbaikan/Pemeliharaan
000.1.9.2	Pemasangan
000.1.10	Ketertiban dan Keamanan
000.1.10.1	Pengamanan, Penjagaan, dan Pengawasan terhadap Pejabat, Kantor dan Rumah Dinas
000.1.10.2	Laporan Ketertiban dan Keamanan
000.1.11	Administrasi Pengelolaan Parkir
000.1.12	Administrasi Pakaian Dinas Pegawai, Satpam, Petugas Kebersihan dan Pegawai lainnya

000.2	PERLENGKAPAN
000.2.1	Inventarisasi dan Penyimpanan
000.2.1.1	Data hasil inventarisasi dan penyimpanan
000.2.1.2	Laporan dan evaluasi inventarisasi dan penyimpanan
000.2.2	Pemeliharaan peralatan kantor
000.2.2.1	Data hasil pemeliharaan kantor
000.2.2.2	Laporan dan evaluasi pemeliharaan kantor
000.2.3	Distribusi
000.2.3.1	Barang habis pakai
000.2.3.2	Barang milik daerah
000.2.4	Penghapusan Barang Milik Daerah (antara lain: Keputusan Pembentukan Tim, Berita Acara Penghapusan Barang Milik Daerah, Daftar Barang yang dihapuskan, Laporan Hasil Pelaksanaan Penghapusan BMD termasuk didalamnya proses lelang penghapusan)
000.2.5	Pengelolaan Database Barang Milik Daerah
000.3	PENGADAAN
000.3.1	Rencana Pengadaan Barang dan Jasa (antara lain: Identifikasi dan analisis kebutuhan barang/jasa, penyusunan dan Rencana Pengadaan Barang dan Jasa (antara lain: Identifikasi dan analisis kebutuhan barang/jasa, penyusunan dan penetapan rencana penganggaran pengadaan, penetapan kebijakan umum, penyusunan kerangka Acuan Kerja (KAK), Pengumuman Rencana Umum Pengadaan)
000.3.2	Pengadaan Langsung (antara lain: persiapan pemilihan penyedia, pelaksanaan pemilihan penyedia, penandatanganan kontrak, pelaksanaan kontrak)
000.3.3	Pengadaan Tidak Langsung/Lelang (antara lain: persiapan pemilihan penyedia, pelaksanaan pemilihan penyedia, penandatanganan kontrak, pelaksanaan kontrak)
000.3.4	Swakelola (antara lain: perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi)
000.3.5	Pengolahan Sistem Informasi Pengadaan (antara lain: Data base pengguna sistem informasi pengadaan barang/jasa, Data Base kontrak, Data Base Pengadaan Barang/jasa)
000.3.6	Monitoring dan Evaluasi (antara lain: Laporan Hasil Monitoring, Laporan hasil evaluasi)
000.4	PERPUSTAKAAN
000.4.1	Kebijakan di bidang Perpustakaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
000.4.2	Deposit Bahan Pustaka
000.4.2.1	Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
000.4.2.2	Pangkalan Data Penerbit dan Pengusaha Rekaman
000.4.2.3	Terbitan Internasional dan Regional
000.4.2.4	Pemantauan Wajib Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam

	000.4.2.5	Bibliografi dan Katalog
000.4.3		Koleksi Pustaka
	000.4.3.1	Pembelian
	000.4.3.2	Hibah
	000.4.3.3	Hadiah
	000.4.3.4	Tukar Menukar
	000.4.3.5	Implementasi Undang-Undang Karya Cetak dan Karya Rekam
	000.4.3.6	Terbitan Internal
	000.4.3.7	Pendistribusian bahan pustaka surplus
	000.4.3.8	Inventarisasi koleksi (Buku Induk)
000.4.4		Pengolahan Bahan Pustaka
000.4.5		Pangkalan Data Katalog Koleksi
000.4.6		Layanan Perpustakaan
	000.4.6.1	Keanggotaan
	000.4.6.2	Peminjaman
	000.4.6.3	Pengembangan gemar baca
000.4.7		Kerjasama Perpustakaan
	000.4.7.1	MoU
	000.4.7.2	Perjanjian kerjasama
	000.4.7.3	Partisipasi organisasi profesi dan kerjasama internasional
000.4.8		Pengembangan Implementasi Teknologi Informasi Perpustakaan
	000.4.8.1	Pengembangan situs web
	000.4.8.2	Pengembangan kemas ulang informasi multimedia
	000.4.8.3	Pengembangan program aplikasi perpustakaan
	000.4.8.4	Pengembangan pangkalan data kepastakaan digital
000.4.9		Pangkalan Data Layanan Perpustakaan
000.4.10		Konservasi
	000.4.10.1	Perawatan Bahan Perpustakaan
	000.4.10.2	Perbaikan Bahan Perpustakaan
	000.4.10.3	Penjilidan Bahan Perpustakaan
000.4.11		Reprografi (Mikrofilm, Reproduksi Foto)
000.4.12		Transformasi Digital
000.4.13		Kurasi Digital
000.4.14		Pengembangan Perpustakaan
	000.4.14.1	Perpustakaan Umum
	000.4.14.2	Perpustakaan Khusus
	000.4.14.3	Perpustakaan Sekolah
	000.4.14.4	Perpustakaan Perguruan Tinggi
000.5		KEARSIPAN
000.5.1		Kebijakan di bidang kearsipan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
000.5.2		Pembinaan Kearsipan
	000.5.2.1	Pengembangan Profesi Arsiparis (antara lain: Formasi Jabatan Arsiparis, Analisis Kebutuhan Arsiparis)

	000.5.2.2	Bimbingan Konsultasi Arsiparis
	000.5.2.3	Penilaian Arsiparis
	000.5.2.4	Pemilihan Arsiparis Teladan (antara lain: Berkas Penyelenggaraan Pemilihan Arsiparis Teladan, Berkas Penetapan Arsiparis Teladan)
	000.5.2.5	Data Base Arsiparis
	000.5.2.6	Bimbingan Konsultasi Kearsipan
	000.5.2.7	Supervisi dan Evaluasi (antara lain: Hasil Perencanaan Supervisi dan Evaluasi, Pelaksanaan Supervisi dan Evaluasi, Laporan Supervisi dan Evaluasi)
	000.5.2.8	Data Base Bimbingan dan Konsultasi dan Supervisi
	000.5.2.9	Fasilitasi Kearsipan (antara lain: Fasilitasi SDM Kearsipan, Fasilitasi Prasarana dan Sarana Kearsipan)
	000.5.2.10	Lembaga/Unit Kearsipan Teladan (antara lain: Berkas Penyelenggaraan Pemilihan Lembaga/ Unit Kearsipan Teladan, Berkas Penetapan Lembaga/Unit Kearsipan Teladan)
	000.5.2.11	Jadwal Retensi Arsip (antara lain: Berkas Usulan Persetujuan JRA, Surat Persetujuan JRA dari Kepala ANRI)
000.5.3	Pengelolaan Arsip Dinamis	
	000.5.3.1	Penciptaan (antara lain: Buku Registrasi Naskah Masuk dan Keluar, Buku Agenda, Kartu Kendali, Lembar Pengantar/Buku Ekspedisi)
	000.5.3.2	Pemberkasan Arsip Aktif (antara lain: Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas)
	000.5.3.3	Penataan Arsip Inaktif (antara lain: Daftar Arsip Inaktif, Daftar Arsip Inaktif Tematik)
	000.5.3.4	Penggunaan (antara lain: Daftar Arsip Dinamis Berdasarkan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, Bukti Peminjaman Arsip)
	000.5.3.5	Autentikasi Arsip Dinamis (antara lain: Pembuktian Autentisitas, Pendapat Tenaga Ahli, Pengujian, Penetapan Autentisitas Arsip Dinamis)
000.5.4	Program Arsip Vital (antara lain: Identifikasi Arsip Vital, Perlindungan dan Pengamanan Arsip Vital, Penyelamatan Arsip Vital, dan Pemulihan Arsip Vital)	
000.5.5	Pengelolaan Arsip Terjaga (antara lain: Daftar Identifikasi Arsip Terjaga, Daftar Berkas Arsip Terjaga, Daftar Isi Berkas Arsip Terjaga, Surat Penetapan Autentikasi Arsip Terjaga, Surat Penyerahan Arsip Terjaga, Daftar Salinan Autentik Arsip Terjaga, Berita Acara Penyerahan Salinan Autentik Arsip Terjaga)	
000.5.6	Penyusutan Arsip	
	000.5.6.1	Pemindahan Arsip (antara lain:Berita Acara Pemindahan, Daftar Arsip yang dipindahkan)

- 000.5.6.2 Pemusnahan Arsip (antara lain: SK Penetapan Panitia Penilai Arsip, Pertimbangan Panitia Penilai, Permintaan Persetujuan Kepala ANRI untuk pemusnahan arsip dengan retensi sekurang-kurangnya 10 Tahun atau Persetujuan Bupati selaku Pimpinan Pencipta Arsip untuk pemusnahan arsip dengan retensi di bawah 10 Tahun, Penetapan Arsip Yang dimusnahkan, Berita Acara Pemusnahan Arsip, Daftar arsip Yang Dimusnahkan)
- 000.5.6.3 Penyerahan Arsip Statis (antara lain: Pembentukan panitia penilai, Notulen rapat panitia, Surat pertimbangan panitia penilai, Surat persetujuan dari Kepala Lembaga Kearsipan, Surat pernyataan autentik, terpercaya, utuh, dan digunakan dari pencipta arsip, Keputusan Penetapan Penyerahan, Berita Acara Penyerahan Arsip, Daftar Arsip yang diserahkan)
- 000.5.7 Alih Media Arsip (antara lain: Kebijakan alih media, Autentikasi, Berita Acara, Daftar Arsip yang alih mediakan)
- 000.5.8 Data Base Pengelolaan Arsip Dinamis
 - 000.5.8.1 Data Base Pengelolaan Arsip Aktif
 - 000.5.8.2 Data Base Pengelolaan Arsip Inaktif
- 000.5.9 Pengelolaan Arsip Statis
 - 000.5.9.1 Akuisisi (antara lain: Monitoring fisik dan daftar, Verifikasi terhadap daftar arsip, Menetapkan status arsip statis, Persetujuan untuk Penyerahan, Penetapan arsip yang diserahkan Berita Acara Penyerahan Arsip, Daftar arsip yang diserahkan)
 - 000.5.9.2 Penghargaan dan Imbalan
 - 000.5.9.3 Sejarah Lisan (antara lain: Administrasi kegiatan, Berita Acara Wawancara Sejarah Lisan, Laporan Kegiatan, Hasil Wawancara (Kaset/CD/media lain sesuai perkembangan TI) dan Transkrip)
 - 000.5.9.4 Daftar Pencarian Arsip Statis (antara lain: pengumuman, akuisisi daftar pencarian arsip statis)
 - 000.5.9.5 Menyusun Sarana Bantu Temu Balik (antara lain: daftar arsip statis, inventaris arsip statis, guide)
 - 000.5.9.6 Preservasi Preventif (antara lain: penyimpanan, pengendalian hama terpadu, reproduksi (alih media))
 - 000.5.9.7 Preservasi Kuratif

	000.5.9.8	Autentikasi Arsip Statis (antara lain: Pembuktian Autentisitas, Pendapat Tenaga Ahli, Pengujian, Penetapan Autentisitas Arsip Statis)
	000.5.9.9	Akses Arsip Statis (antara lain: Layanan arsip, Penerbitan naskah sumber)
000.5.10		Jasa Kearsipan (antara lain konsultasi kearsipan, manual kearsipan, penataan arsip, <i>otomasi</i> kearsipan, penyimpanan arsip, perawatan dan pemeliharaan arsip)
000.5.11		Pengelolaan SIKN dan JIKN
000.5.12		Pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana
000.5.13		Penyelamatan arsip Perangkat Daerah digabung dan/atau dibubarkan
000.5.14		Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup
000.5.15		Pengawasan Kearsipan
	000.5.15.1	Pengawasan Kearsipan Internal
	000.5.15.2	Pengawasan Kearsipan Eksternal
	000.5.15.3	Sanksi
000.6		PERSANDIAN
	000.6.1	Kebijakan di bidang Persandian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	000.6.2	Pengamanan persandian
	000.6.2.1	Pengamanan sinyal: teknik sandi dan kriptografi
	000.6.2.2	Analisis sinyal: teknik sandi dan kriptografi
	000.6.2.3	Materiil sandi: sistem dan peralatan
000.6.3		Pengkajian persandian: Kriptografi, Peralatan Sandi, Komunikasi Sandi
	000.6.3.1	Perencanaan Pengkajian
	000.6.3.2	Administrasi Pengkajian
	000.6.3.3	Pelaksanaan
	000.6.3.4	Pelaporan
000.6.4		Pembinaan dan Pengendalian Persandian
	000.6.4.1	Sumber Daya Manusia
	000.6.4.2	Jaring Komunikasi
000.6.5		Layanan Sertifikasi Elektronik
	000.6.5.1	Perencanaan dan Administrasi
	000.6.5.2	Pelaksanaan Verifikasi
	000.6.5.3	Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama
	000.6.5.4	Penyesuaian Sistem dan Testing
	000.6.5.5	Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengguna
	000.6.5.6	Pelaksanaan Penerbitan Sertifikat Elektronik
	000.6.5.7	Pelaporan
000.7		PERENCANAAN PEMBANGUNAN
	000.7.1	Musyawarah Perencanaan Pembangunan/Musrenbang
	000.7.1.1	Musrenbang Provinsi
	000.7.1.2	Musrenbang Nasional
	000.7.1.3	Musrenbang Kab/Kota
	000.7.1.4	Musrenbang Kecamatan

	000.7.1.5	Musrenbang Kelurahan
	000.7.1.6	Musrenbang Desa
000.7.2		Perencanaan Pembangunan Daerah
	000.7.2.1	Rencana Pembangunan Jangka Panjang
	000.7.2.2	Rencana Pembangunan Jangka Menengah
	000.7.2.3	Rencana Anggaran Daerah
	000.7.2.4	Rencana Pembangunan Tahunan
	000.7.2.5	Rencana Pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah
	000.7.2.6	Program kerja tahunan
	000.7.2.7	Penetapan/Kontrak Kinerja
	000.7.2.8	Laporan Berkala
	000.7.2.9	Laporan Insidental
	000.7.2.10	Evaluasi Program
000.7.3		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan
000.7.4		Konsultasi Perencanaan Pembangunan
000.7.5		Pemantauan, Evaluasi, Penilaian, dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan
000.7.6		Aksi Strategis Daerah
	000.7.6.1	Rancangan awal perencanaan aksi strategi daerah
	000.7.6.2	Rapat pembahasan rancangan awal dengan Perangkat Daerah
	000.7.6.3	Sosialisasi dengan Perangkat Daerah
	000.7.6.4	Rancangan akhir perencanaan aksi strategi daerah
	000.7.6.5	Penerapan perencanaan aksi strategi daerah
000.7.7		Perencanaan Pendanaan Pembangunan
	000.7.7.1	Pendanaan Nasional dan Hibah
	000.7.7.2	Pendanaan Daerah
	000.7.7.3	Kerja sama Pembangunan Nasional
	000.7.7.4	Surat Berharga Syariah Negara
	000.7.7.5	Pendanaan On Top atau Inisiatif Baru
000.8		ORGANISASI DAN TATA LAKSANA
	000.8.1	Struktur Organisasi di lingkungan Pemerintahan Daerah Kab/Kota
	000.8.1.1	Pembentukan
	000.8.1.2	Pengubahan
	000.8.1.3	Pembubaran
000.8.2		Uraian Jabatan dan Tata Kerja
	000.8.2.1	Analisa Jabatan
	000.8.2.2	Analisa Beban Kerja
000.8.3		Ketatalaksanaan
	000.8.3.1	Proses Bisnis
	000.8.3.2	Standar Pelayanan
	000.8.3.3	Standar Operasional Prosedur
	000.8.3.4	Pelayanan Publik
000.8.4		Standar Kompetensi jabatan struktural dan fungsional
000.8.5		Evaluasi Kelembagaan
000.8.6		Koordinasi Penguatan Reformasi dan Birokrasi

- 000.8.6.1 Budaya Kerja
- 000.8.6.2 Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi
- 000.8.6.3 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

000.9 PENELITIAN, PENGKAJIAN, DAN PENGEMBANGAN

- 000.9.1 Kebijakan di bidang penelitian, pengkajian dan pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah
- 000.9.2 Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan (antara lain: Rencana Kerja, Administrasi Penelitian, Pelaksanaan, Hasil Penelitian, Hasil Pengkajian dan Pengembangan, Rekomendasi)
- 000.9.3 Sosialisasi dan Desiminasi Hasil penelitian, Hasil Pengkajian dan Pengembangan
- 000.9.4 Bimbingan teknis penelitian, pengkajian dan pengembangan
- 000.9.5 Forum komunikasi penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
- 000.9.6 Data dan informasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
 - 000.9.6.1 Data
 - 000.9.6.2 Statistik
 - 000.9.6.3 Jurnal Hasil Penelitian/Pengkajian
- 000.9.7 Master proceeding/jurnal penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
- 000.9.8 Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)
- 000.9.9 Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan
- 000.9.10 Seminar, Lokakarya, Temukarya, Workshop

100 PEMERINTAHAN

100.1 OTONOMI DAERAH

- 100.1.1 Kebijakan di bidang Otonomi Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 100.1.2 Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Fasilitasi, Bimbingan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi)
- 100.1.3 Penataan Daerah, Pembinaan Daerah Pemekaran, Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)
- 100.1.4 Pemilihan Bupati, DPRD, dan Hubungan Antar Lembaga (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)
 - 100.1.4.1 Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati
 - 100.1.4.2 Administrasi Bupati dan DPRD
 - 100.1.4.3 Penyiapan Perumusan Kebijakan Pemberdayaan Kapasitas Bupati dan DPRD di Bidang Pemerintahan
 - 100.1.4.4 Hubungan Antar Lembaga Daerah (Pemerintah Daerah dan DPRD)
 - 100.1.4.5 Asosiasi Daerah
- 100.1.5 Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi kinerja daerah (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)
 - 100.1.5.1 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

	100.1.5.2	Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah
	100.1.5.3	Pengembangan Kapasitas Daerah
100.1.6	LKPJ/ LKPJAMJ dan LPPD (Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi)	
100.2	PEMERINTAHAN UMUM	
	100.2.1	Kebijakan di bidang Pemerintahan Umum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	100.2.2	Dekonsentrasi dan Kerjasama
	100.2.2.1	Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
	100.2.2.2	Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Tugas Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah
	100.2.2.3	Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Daerah
	100.2.2.4	Fasilitasi Kecamatan
	100.2.2.5	Fasilitasi Pelayanan Umum
	100.2.3	Wilayah Administrasi dan Perbatasan
	100.2.3.1	Toponimi dan Data Wilayah
	100.2.3.2	Pengembangan dan Penataan Batas Antar Negara
	100.2.3.3	Batas Antar Daerah Wilayah
	100.2.3.4	Penataan Batas Wilayah Antar Kecamatan, Batas Wilayah Antar Kelurahan Satu Kecamatan dan Batas Wilayah Kelurahan Antar Kecamatan
	100.2.3.5	Pemeliharaan Batas Wilayah
100.3	HUKUM	
	100.3.1	Program Legislasi
	100.3.1.1	Bahan/Materi Program Legislasi Daerah
	100.3.1.2	Program Legislasi
	100.3.2	Rancangan Peraturan Perundang-Undangan (antara lain Rancangan Peraturan Daerah, termasuk naskah akademik, rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum sampai diundangkan)
	100.3.3	Keputusan/Ketetapan Pimpinan Pemerintah
	100.3.3.1	Keputusan/Ketetapan Gubernur
	100.3.3.2	Keputusan/Ketetapan Bupati
	100.3.3.3	Keputusan/Ketetapan Walikota
	100.3.3.4	Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi
	100.3.3.5	Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten
	100.3.3.6	Keputusan Sekretaris Daerah Kota
	100.3.4	Instruksi/Surat Edaran
	100.3.4.1	Instruksi/Surat Edaran Provinsi
	100.3.4.2	Instruksi/Surat Edaran Kabupaten
	100.3.4.3	Instruksi/Surat Edaran Kota
	100.3.4.4	Instruksi/Surat Edaran Setingkat Eselon II

- 100.3.5 Surat Perintah
 - 100.3.5.1 Surat Perintah Gubernur
 - 100.3.5.2 Surat Perintah Bupati
 - 100.3.5.3 Surat Perintah Walikota
 - 100.3.5.4 Surat Perintah Setingkat Eselon II
- 100.3.6 Standar/Pedoman/ Prosedur Kerja/Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis
- 100.3.7 Nota Kesepakatan/ *Memorandum of Understanding* (MoU)/Kontrak/Perjanjian Kerja Sama
 - 100.3.7.1 Dalam Negeri
 - 100.3.7.2 Luar Negeri
- 100.3.8 Dokumentasi Hukum (antara lain: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Peraturan-Peraturan yang dijadikan referensi)
- 100.3.9 Sosialisasi/ Penyuluhan/ Pembinaan Hukum
- 100.3.10 Bantuan/Konsultasi Hukum/Advokasi Pemberian Bantuan Hukum/Konsultasi Hukum (Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara dan Agama)
- 100.3.11 Kasus/ Sengketa Hukum
 - 100.3.11.1 Pidana Kasus/sengketa pidana, baik kejahatan maupun pelanggaran
 - 100.3.11.2 Perdata Kasus/sengketa perdata
 - 100.3.11.3 Tata Usaha Negara
 - 100.3.11.4 Perburuhan
 - 100.3.11.5 Arbitrase
 - 100.3.11.6 Sengketa Adat
- 100.3.12 Perizinan
- 100.3.13 Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)
 - 100.3.13.1 Hak Cipta
 - 100.3.13.2 Hak Paten
 - 100.3.13.3 Hak Desain Industri
 - 100.3.13.4 Hak Rahasia Dagang
 - 100.3.13.5 Hak Merk
- 100.3.14 Permohonan HaKI yang ditolak

200 POLITIK

200.1 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

- 200.1.1 Kebijakan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 200.1.2 Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
 - 200.1.2.1 Ketahanan Ideologi Negara
 - 200.1.2.2 Wawasan Kebangsaan
 - 200.1.2.3 Bela Negara
 - 200.1.2.4 Nilai Nilai Sejarah Kebangsaan
 - 200.1.2.5 Pembauran dan Kewarganegaraan
- 200.1.3 Kewaspadaan Nasional
 - 200.1.3.1 Fasilitasi dan Evaluasi Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Keamanan
 - 200.1.3.2 Fasilitasi Bina Masyarakat Perbatasan Antar Negara dan Kehidupan Masyarakat Perbatasan

		200.1.3.3	Fasilitasi dan Evaluasi Penanganan Konflik Pemerintahan
		200.1.3.4	Fasilitasi dan Laporan Penanganan Konflik Sosial
		200.1.3.5	Fasilitasi Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing
	200.1.4		Ketahanan Seni, Budaya, Adat, Agama, dan Kemasyarakatan
		200.1.4.1	Ketahanan Seni
		200.1.4.2	Ketahanan Budaya
		200.1.4.3	Agama dan Kepercayaan
		200.1.4.4	Organisasi Kemasyarakatan
		200.1.4.5	Masalah Sosial Kemasyarakatan
		200.1.4.6	Fasilitasi
		200.1.4.7	Pelaksanaan Identifikasi dan Kompilasi Organisasi Masyarakat
		200.1.4.8	Laporan Hasil Kerjasama Kegiatan Dengan Ormas/LNL
		200.1.4.9	Evaluasi Aktifitas Ormas : Sanksi Administrasi
		200.1.4.10	Fasilitasi Sengketa Ormas
		200.1.4.11	Fasilitasi Ormas
	200.1.5		Politik Dalam Negeri
		200.1.5.1	Implementasi Kebijakan Politik
		200.1.5.2	Fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintahan
		200.1.5.3	Fasilitasi Kelembagaan Partai Politik
		200.1.5.4	Verifikasi dan Evaluasi Partai Politik Yang Memperoleh Kursi
		200.1.5.5	Partai Politik Yang Tidak Memperoleh Kursi
		200.1.5.6	Pemerintah Daerah
		200.1.5.7	Database Parpol
		200.1.5.8	Pendidikan Budaya Politik
		200.1.5.9	Pemilihan Umum
	200.1.6		Ketahanan Ekonomi
		200.1.6.1	Ketahanan Sumber Daya Alam dan Kesenjangan Perekonomian
		200.1.6.2	Ketahanan Perdagangan Investasi, Fiskal dan Moneter
		200.1.6.3	Perilaku Perekonomian Masyarakat
		200.1.6.4	Ketahanan Lembaga Sosial Ekonomi
200.2	PEMILU		
	200.2.1		Kebijakan di bidang Pemilu yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	200.2.2		Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih
		200.2.2.1	Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) Pemilu
		200.2.2.2	Daftar Pemilih Sementara (DPS)
		200.2.2.3	Daftar Pemilih Tambahan
		200.2.2.4	Keputusan KPU tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT)
		200.2.2.5	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)

200.2.3	Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu
200.2.3.1	Dokumen pendaftaran peserta Pemilu dari partai politik
200.2.3.2	Dokumen hasil verifikasi administrasi dan faktual partai politik
200.2.3.3	Dokumen pendaftaran peserta Pemilu dari Calon Perseorangan
200.2.3.4	Dokumen hasil verifikasi administrasi dan faktual
200.2.3	Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu
200.2.4	Penetapan Peserta Pemilu
200.2.4.1	Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota
200.2.4.2	Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi Anggota DPR
200.2.4.3	Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi Anggota DPR
200.2.4.4	Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota
200.2.4.5	Peta Daerah Pemilihan
200.2.5	Pencalonan Pemilu
200.2.5.1	Petunjuk teknis pencalonan
200.2.5.2	Surat pencalonan pendaftaran
200.2.5.3	Daftar bakal calon
200.2.5.4	Dokumen persyaratan masing-masing bakal calon
200.2.5.5	Dokumen verifikasi administrasi
200.2.5.6	Daftar Calon Sementara dan Calon Tetap
200.2.6	Kampanye Pemilu
200.2.6.1	Keputusan KPU tentang penetapan jadwal kampanye
200.2.6.2	Nama juru kampanye/pelaksana kampanye
200.2.6.3	Peringatan tertulis/penghentian kegiatan kampanye
200.2.7	Dana Kampanye
200.2.7.1	Pedoman audit dana kampanye
200.2.7.2	Laporan dana kampanye peserta Pemilu
200.2.7.3	Laporan hasil audit dana kampanye
200.2.8	Pemungutan dan Penghitungan Suara
200.2.8.1	Keputusan KPU tentang desain dan spesifikasi surat suara
200.2.8.2	Master surat suara
200.2.8.3	Surat suara yang terpakai
200.2.8.4	Surat Suara Tidak terpakai (rusak, salah, dan tidak digunakan)
200.2.8.5	Formulir pemilu di Pemerintah Daerah
200.2.9	Penetapan Hasil Pemilu
200.2.10	Perselisihan Hasil Pemilu
200.2.10.1	Surat-surat mengenai Perselisihan Hasil Pemilu
200.2.10.2	Jawaban dan kesimpulan termohon

- 200.2.10.3 Salinan Putusan lembaga peradilan
- 200.2.11 Laporan hasil penyelenggaraan Pemilu

300 KEAMANAN DAN KETERTIBAN

300.1 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

- 300.1.1 Kebijakan di bidang Polisi Pamong Praja yang dilakukan di Pemerintah Daerah
- 300.1.2 Tata Operasional dan Prasarana Sarana Polisi Pamong Praja
 - 300.1.2.1 Tata Operasional Polisi Pamong Praja
 - 300.1.2.2 Sarana Prasarana Polisi Pamong Praja
- 300.1.3 Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja
- 300.1.4 Perlindungan Masyarakat
- 300.1.5 Penyidik Pegawai Negeri Sipil
- 300.1.6 Perlindungan Hak-Hak Sipil dan Hak Asasi Manusia

300.2 PENANGGULANGAN BENCANA, PENCARIAN, DAN PERTOLONGAN

- 300.2.1 Kebijakan di bidang Penanggulangan Bencana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 300.2.2 Perencanaan Penanggulangan Bencana, Pencarian, dan Pertolongan
 - 300.2.2.1 Rencana dan standardisasi dan pengawasan dan perbekalan
 - 300.2.2.2 Kurikulum dan silabus, evaluasi dan monitoring
 - 300.2.2.3 Tenaga pencarian pertolongan, penyiapan potensi pencarian dan pertolongan
 - 300.2.2.4 Permasyarakatan pencarian dan pertolongan, sertifikasi pencarian dan pertolongan
 - 300.2.2.5 Perencanaan dan standardisasi, penyelenggaraan operasi SAR, Siaga dan latihan, tempat latihan
 - 300.2.2.6 Registrasi *BEACON*
- 300.2.3 Pencegahan dan Kesiapsiagaan
- 300.2.4 Potensi Pencarian dan Pertolongan
- 300.2.5 Bina Ketenagaan dan Pemasyarakatan
 - 300.2.5.1 Rencana Pendidikan dan Pelatihan
 - 300.2.5.2 Penyiapan tenaga dan potensi Pencarian dan Pertolongan
 - 300.2.5.3 Pemasyarakatan dan Sertifikasi Pencarian dan Pertolongan
 - 300.2.5.4 Pemasyarakatan Pencarian dan Pertolongan (Sosialisasi dan Penyuluhan)
 - 300.2.5.5 Sertifikasi Pencarian dan Pertolongan
- 300.2.6 Operasi Pencarian dan Pertolongan
- 300.2.7 Rencana Pengembangan dan Standardisasi Komunikasi
- 300.2.8 Operasi Komunikasi
 - 300.2.8.1 Operasi Peralatan Komunikasi (Berita SAR)
 - 300.2.8.2 Operasi Peralatan Deteksi Dini (Berita SAR)
 - 300.2.8.3 Registrasi *BEACON*
- 300.2.9 Inventarisasi dan Pemeliharaan

- 300.2.10 Pengembangan Sistem Informasi
- 300.2.11 Penyajian dan Layanan Informasi
- 300.2.12 Pelapooran dan Evaluasi
 - 300.2.12.1 Laporan Harian
 - 300.2.12.2 Laporan Bulanan
 - 300.2.12.3 Laporan Tahunan
 - 300.2.12.4 Evaluasi

400 KESEJAHTERAAN RAKYAT

400.1 PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

- 400.1.1 Kebijakan di bidang Pembangunan Daerah Tertinggal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 400.1.2 Pembangunan Sumber Daya
 - 400.1.2.1 Fasilitasi Pendidikan keterampilan Pengembangan Sumber Daya
 - 400.1.2.2 Fasilitasi Kesehatan Pengembangan Sumber Daya
 - 400.1.2.3 Fasilitasi Sumber daya hayati dan Pengembangan Sumber Daya
 - 400.1.2.4 Fasilitasi Mineral, energi dan lingkungan hidup
 - 400.1.2.5 Fasilitasi Teknologi dan inovasi
 - 400.1.2.6 Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan sumber daya
 - 400.1.2.7 Pemantauan dan evaluasi
- 400.1.3 Peningkatan Infrastruktur
 - 400.1.3.1 Fasilitasi Transportasi peningkatan infrastruktur
 - 400.1.3.2 Fasilitasi Informasi dan Telekomunikasi dalam peningkatan infrastruktur
 - 400.1.3.3 Fasilitasi Sosial dalam peningkatan infrastruktur
 - 400.1.3.4 Fasilitasi Ekonomi dalam peningkatan infrastruktur
 - 400.1.3.5 Fasilitasi energi dalam peningkatan infrastruktur
 - 400.1.3.6 Koordinasi pelaksanaan kebijakan peningkatan infrastruktur
 - 400.1.3.7 Pemantauan dan evaluasi
- 400.1.4 Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha
 - 400.1.4.1 Fasilitasi Investasi pembinaan ekonomi dan dunia usaha
 - 400.1.4.2 Fasilitasi Kelembagaan ekonomi dan dunia usaha
 - 400.1.4.3 Fasilitasi Usaha mikro, kecil dan menengah
 - 400.1.4.4 Fasilitasi Kemitraan usaha
 - 400.1.4.5 Fasilitasi Pengembangan komoditas unggulan
 - 400.1.4.6 Koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan ekonomi dan dunia usaha
 - 400.1.4.7 Pemantauan dan evaluasi

	400.1.4.8	Identifikasi dan inventarisasi pengembangan usaha ekonomi perdesaan tertinggal
	400.1.4.9	Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi perdesaan tertinggal
	400.1.4.10	Monitoring dan evaluasi ekonomi desa tertinggal
	400.1.4.11	Identifikasi dan inventarisasi pengembangan masyarakat dan desa tertinggal
	400.1.4.12	Fasilitasi pengembangan masyarakat dan desa tertinggal
	400.1.4.13	Monitoring dan evaluasi Masyarakat tertinggal
	400.1.4.14	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa
400.1.5	Pembinaan Lembaga Sosial dan Budaya	
	400.1.5.1	Penguatan kapasitas lembaga lokal
	400.1.5.2	Penguatan organisasi masyarakat
	400.1.5.3	Pemberdayaan masyarakat
	400.1.5.4	Kerjasama antar lembaga sosial dan budaya
	400.1.5.5	Ketenagakerjaan
	400.1.5.6	Koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan lembaga sosial dan budaya
	400.1.5.7	Pemantauan dan evaluasi
400.1.6	Pengembangan Daerah Khusus	
	400.1.6.1	Fasilitasi pengembangan Daerah perbatasan
	400.1.6.2	Fasilitasi pengembangan Daerah rawan konflik dan bencana
	400.1.6.3	Fasilitasi pengembangan Daerah Perdesaan
	400.1.6.4	Fasilitasi pengembangan Daerah pulau terpencil dan terluar
	400.1.6.5	Fasilitasi pengembangan Wilayah strategis
	400.1.6.6	Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan daerah khusus
	400.1.6.7	Pemantauan dan evaluasi
400.2	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	400.2.1	Kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	400.2.2	Pengarusutamaan Gender Ekonomi, Politik Sosial dan Hukum
	400.2.2.1	Data gender
	400.2.2.2	Advokasi dan fasilitasi
	400.2.3	Perlindungan Perempuan (Kekerasan, Masalah Sosial, Tenaga Kerja, Korban Perdagangan)
	400.2.3.1	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan
	400.2.3.2	Data perlindungan perempuan
	400.2.3.3	Advokasi dan fasilitasi
	400.2.3.4	Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan perlindungan perempuan

	400.2.3.5	Sistem aplikasi dan jaringan informasi gender
	400.2.3.6	Analisis dan penyajian informasi gender
	400.2.3.7	Partisipasi publik untuk kesejahteraan ibu
400.2.4		Perlindungan Anak (Hak Sipil, Masalah Sosial, Kekerasan Terhadap Anak, Anak Berkebutuhan Khusus, Anak Berhadapan Dengan Hukum)
	400.2.4.1	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak
	400.2.4.2	Data perlindungan anak
	400.2.4.3	Advokasi dan fasilitasi
	400.2.4.4	Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan perlindungan anak
	400.2.4.5	Partisipasi publik untuk kesejahteraan anak
400.2.5		Tumbuh Kembang Anak (Pendidikan, Kesehatan, Partisipasi, Lingkungan dan Penanaman Nilai-Nilai Luhur, Pengembangan Kota Layak Anak)
	400.2.5.1	Pemenuhan Hak Anak
	400.2.5.2	Data Klaster Hak Anak
	400.2.5.3	Data tumbuh kembang anak
	400.2.5.4	Advokasi dan fasilitasi
	400.2.5.5	Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan tumbuh kembang anak
	400.2.5.6	Penyelenggaraan parenting pola pengasuhan anak
400.2.6		Penghargaan terkait gender (Anugerah Parahita Ekapraya/APE)
400.2.7		Penghargaan Kabupaten Layak Anak
400.2.8		Penghargaan Desa Ramah Perempuan Peduli Anak
400.3		PENDIDIKAN
	400.3.1	Kebijakan di bidang Pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	400.3.2	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nonformal, Informal
	400.3.2.1	Bahan Ajar (Alat Permainan Edukatif)
	400.3.2.2	Pelatihan Sosial
	400.3.2.3	Peringatan Hari anak
	400.3.2.4	<i>Block Grant</i>
	400.3.3	Pendidikan Masyarakat
	400.3.3.1	Penyelenggaraan Program
	400.3.3.2	Penilaian dan pemberian bantuan sosial
	400.3.3.3	Pembinaan Program
	400.3.3.4	Lomba/Pemberian Penghargaan
	400.3.3.5	Pameran
	400.3.3.6	Rakor
	400.3.3.7	Sosialisasi
	400.3.3.8	Sertifikasi dan Akreditasi
	400.3.4	Kursus/Pelatihan Pendidik dan Tenaga Pendidik
	400.3.5	Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama
	400.3.5.1	Kurikulum, bahan ajar
	400.3.5.2	<i>Block Grant</i>
	400.3.5.3	Pelatihan, Bimtek, sosialisasi,

	400.3.5.4	Lomba, penghargaan, penganugerahan
	400.3.5.5	Bantuan operasional sekolah (BOS)
	400.3.5.6	Bantuan Siswa Miskin
400.3.6	Pendidikan khusus/Layanan Khusus	
	400.3.6.1	Kurikulum, Bahan ajar, alat bantu pembelajaran
	400.3.6.2	<i>Block Grant</i>
	400.3.6.3	Lomba, festival
	400.3.6.4	Sosialisasi, bimtek
	400.3.6.5	Pendataan
	400.3.6.6	Kelembagaan
400.3.7	Pembinaan Pendidik dan Tenaga Pendidik	
	400.3.7.1	Pendataan dan Pemetaan
	400.3.7.2	Uji Kompetensi Guru
	400.3.7.3	Sertifikasi Guru
	400.3.7.4	Penghargaan guru dan tenaga kependidikan
	400.3.7.5	Peningkatan kesejahteraan guru
	400.3.7.6	Sosialisasi, bimtek
	400.3.7.7	<i>Block Grant</i>
400.3.8	Sekolah Menengah Atas	
	400.3.8.1	Kurikulum
	400.3.8.2	Bahan Ajar
	400.3.8.3	Pelatihan
	400.3.8.4	<i>Block grant</i>
	400.3.8.5	Bimbingan teknis/sosialisasi
	400.3.8.6	Lomba , Sayembara, festival
	400.3.8.7	Bantuan operasional Sekolah (BOS)
	400.3.8.8	Bantuan siswa miskin
400.3.9	Pendidikan Khusus-Layanan Khusus	
	400.3.9.1	Bahan ajar
	400.3.9.2	Petunjuk Teknis
	400.3.9.3	<i>Block grant</i>
	400.3.9.4	Sosialisasi, bimtek
	400.3.9.5	Lomba, sayembara, jambore, festival
	400.3.9.6	Kurikulum/bahan pembelajaran
	400.3.9.7	Alat bantu pembelajaran
	400.3.9.8	Pendataan
	400.3.9.9	Kelembagaan (Unit kesehatan sekolah, Pendidikan jasmani adaptif, pendidikan inklusi)
400.3.10	Pendidik dan Tenaga Pendidik	
	400.3.10.1	Pendataan dan Pemetaan
	400.3.10.2	Uji Kompetensi Guru
	400.3.10.3	Sertifikasi Guru
	400.3.10.4	Penilaian prestasi kerja guru dan pengawas sekolah
	400.3.10.5	Penghargaan guru dan tenaga kependidikan
	400.3.10.6	Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik

	400.3.10.7	<i>Block grant</i>
	400.3.10.8	Bimbingan teknis/sosialisasi
400.3.11		Penilaian Pendidikan
	400.3.11.1	Penilaian Akademik
	400.3.11.2	Penilaian Non Akademik
	400.3.11.3	Analisis dan Sistem Informasi Penilaian
400.3.12		Data dan Statistik Pendidikan
	400.3.12.1	Data peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan
	400.3.12.2	Data Satuan Pendidikan dan Proses Pembelajaran
400.3.13		Prasarana dan Sarana Pendidikan
	400.3.13.1	Prasarana Pendidikan
	400.3.13.2	Sarana Pendidikan
	400.3.13.3	Monitoring dan Evaluasi
400.4		KEOLAHRAGAAN
400.4.1		Kebijakan di bidang Keolahragaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
400.4.2		Pengelolaan Olahraga Pendidikan
	400.4.2.1	Olahraga Pendidikan Dasar dan Menengah
	400.4.2.2	Olahraga Pendidikan Tinggi
	400.4.2.3	Olahraga Pendidikan Nonformal dan Informal
400.4.3		Pengelolaan Olahraga Rekreasi
	400.4.3.1	Olahraga Massal
	400.4.3.2	Olahraga Tradisional
	400.4.3.3	Olahraga Petualangan, Tantangan dan Wisata
400.4.4		Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga
	400.4.4.1	Olahraga Pendidikan
	400.4.4.2	Olahraga Rekreasi
	400.4.4.3	Olahraga Prestasi
	400.4.4.4	Sekolah Khusus Olahraga
400.4.5		Pengembangan Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus
	400.4.5.1	Olahraga Tradisional
	400.4.5.2	Layanan Khusus
400.4.6		Kemitraan dan Penghargaan Olahraga
	400.4.6.1	Kemitraan Keolahragaan
	400.4.6.2	Penghargaan Olahraga
400.4.7		Pembibitan dan IPTEK Olahraga
	400.4.7.1	Pembibitan Olahraga
	400.4.7.2	Kompetisi
	400.4.7.3	IPTEK Olahraga
400.4.8		Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan
	400.4.8.1	Tenaga Keolahragaan
	400.4.8.2	Organisasi Keolahragaan
400.4.9		Industri dan Promosi Olahraga
	400.4.9.1	Industri Olahraga

	400.4.9.2	Promosi Olahraga
400.4.10		Olahraga Prestasi
	400.4.10.1	Daerah
	400.4.10.2	Nasional
	400.4.10.3	Internasional
400.4.11		Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga
	400.4.11.1	Standardisasi Keolahragaan
	400.4.11.2	Akreditasi dan Sertifikasi Keolahragaan
	400.4.11.3	Infrastruktur Olahraga
400.5		KEPEMUDAAN
400.5.1		Kebijakan di bidang Kepemudaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
400.5.2		Peningkatan Tenaga dan Sumber Daya Pemuda
	400.5.2.1	Penelusuran (Duta Kepemudaan)
	400.5.2.2	Pengkajian (Rekomendasi Kepemudaan melalui forum kepemudaan)
	400.5.2.3	Pengembangan
400.5.3		Peningkatan Wawasan Pemuda
	400.5.3.1	Wawasan Kebangsaan
	400.5.3.2	Wawasan Lingkungan
	400.5.3.3	Wawasan Sosial dan Hukum
400.5.4		Peningkatan Kapasitas Pemuda
	400.5.4.1	Kapasitas Iman dan Takwa
	400.5.4.2	Kapasitas IPTEK
	400.5.4.3	Pemanfaatan IPTEK
400.5.5		Peningkatan Kreativitas Pemuda (Pemetaan Kreativitas/seni kepemudaan)
	400.5.5.1	Pengkajian
	400.5.5.2	Pengembangan
	400.5.5.3	Pendayagunaan (fasilitasi)
400.5.6		Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda
	400.5.6.1	Kepemimpinan : Penelusuran, Pengaderan, Pendayagunaan
	400.5.6.2	Kepeloporan Pemuda : Kesukarelawanan. Pengembangan kepedulian, pendampingan
400.5.7		Kewirausahaan
	400.5.7.1	Kelembagaan
	400.5.7.2	Pengaderan
	400.5.7.3	Perintisan
400.5.8		Organisasi Kepemudaan dan Pengawasan Kepramukaan
	400.5.8.1	Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan : Kelembagaan dan Sumber daya
	400.5.8.2	Pemberdayaan Organisasi Mahasiswa : Kelembagaan dan Sumber daya
	400.5.8.3	Pemberdayaan Organisasi Kepelajaran: Kelembagaan dan Sumber daya
	400.5.8.4	Pengawasan Kepramukaan : Kelembagaan, Program dan Sumber daya
400.5.9		Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda
	400.5.9.1	Standardisasi
	400.5.9.2	Infrastruktur Pemuda

- 400.5.10 Kemitraan dan Penghargaan Pemuda
 - 400.5.10.1 Kemitraan
 - 400.5.10.2 Penghargaan Pemuda
- 400.6 KEBUDAYAAN
 - 400.6.1 Kebijakan di bidang Kebudayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
 - 400.6.2 Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman
 - 400.6.2.1 Registrasi Nasional
 - 400.6.2.2 Pelindungan
 - 400.6.2.3 Pengembangan dan Pemanfaatan
 - 400.6.2.4 Eksplorasi dan Dokumentasi
 - 400.6.3 Pembinaan Kesenian dan Perfilman
 - 400.6.3.1 Pembinaan Seni Pertunjukan
 - 400.6.3.2 Pembinaan Seni Rupa
 - 400.6.3.3 Pembinaan Seni Literasi dan apresiasi film
 - 400.6.3.4 Dokumentasi dan Publikasi
 - 400.6.4 Sejarah dan Nilai Budaya
 - 400.6.4.1 Sejarah
 - 400.6.4.2 Pemetaan nilai
 - 400.6.4.3 Verifikasi dan Perumusan Nilai
 - 400.6.4.4 Dokumentasi dan Publikasi
 - 400.6.4.5 Dokumentasi sejarah dan nilai sejarah
 - 400.6.4.6 Publikasi sejarah dan nilai sejarah
 - 400.6.5 Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya
 - 400.6.5.1 Internalisasi nilai budaya
 - 400.6.5.2 Kekayaan budaya
 - 400.6.5.3 Warisan budaya nasional dan dunia
 - 400.6.5.4 Diplomasi budaya
- 400.7 KESEHATAN
 - 400.7.1 Kebijakan di bidang Kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
 - 400.7.2 Upaya Kesehatan Dasar
 - 400.7.2.1 Pelayanan kedokteran keluarga
 - 400.7.2.2 Praktek klinis dokter di pelayanan kesehatan primer
 - 400.7.2.3 Pelaksanaan kesehatan primer
 - 400.7.2.4 Kesehatan gigi dan mulut di puskesmas
 - 400.7.2.5 Kesehatan gigi dan mulut di rumah sakit
 - 400.7.2.6 ICD 10, Destistry dan Stomatology
 - 400.7.2.7 Infeksi menular lewat transfusi darah
 - 400.7.2.8 Penyakit mulut di tingkat primer
 - 400.7.2.9 Pembiayaan darah
 - 400.7.2.10 Penggunaan darah rasional
 - 400.7.2.11 Unit transfusi darah, bank darah rumah sakit dan jejaring pelayanan darah
 - 400.7.2.12 Pelayanan kesehatan di daerah terpencil, sangat terpencil dan kepulauan
 - 400.7.2.13 Akreditasi puskesmas
 - 400.7.2.14 Puskesmas berprestasi

400.7.3	Upaya Kesehatan Rujukan
400.7.3.1	Pelayanan kesehatan rujukan
400.7.3.2	Pelayanan kedokteran, organisasi profesi dan Konsorsium Upaya Kesehatan (KUK)
400.7.3.3	Pelayanan rumah sakit privat
400.7.3.4	Pelayanan kesehatan rumah sakit khusus dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya
400.7.3.5	Pelayanan kesehatan rumah sakit pendidikan
400.7.3.6	Pelayanan pasien jaminan kesehatan
400.7.3.7	Fasilitas pelayanan kesehatan asing dan perdagangan jasa
400.7.3.8	Badan pengawas rumah sakit
400.7.3.9	Perizinan dan penetapan kelas rumah sakit kelas A dan Penanam Modal Asing (PMA)
400.7.3.10	Akreditasi rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya
400.7.4	Keperawatan dan Keteknisian Medik
400.7.4.1	Pelayanan Keperawatan Dasar
400.7.4.2	Pelayanan keperawatan profesional di rumah sakit
400.7.4.3	Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Umum
400.7.4.4	Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Khusus
400.7.4.5	Bina pelayanan kebidanan
400.7.5	Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan
400.7.5.1	Mikrobiologi dan imunologi
400.7.5.2	Patologi dan toksilogi
400.7.5.3	Radiologi
400.7.5.4	Perizinan dan sertifikasi
400.7.5.5	Sarana dan prasarana kesehatan
400.7.5.6	Peralatan medis di fasilitas pelayanan kesehatan
400.7.5.7	Aplikasi sarana dan prasarana alat kesehatan
400.7.6	Kesehatan Jiwa
400.7.6.1	Kesehatan jiwa di non fasilitas pelayanan kesehatan
400.7.6.2	Bina kesehatan jiwa di fasilitas pelayanan kesehatan
400.7.6.3	Etikolegal dan asesmen
400.7.6.4	Pencegahan dan penanggulangan narkotika dan sejenisnya
400.7.6.5	Etikolegal dan asesmen
400.7.6.6	Kesehatan jiwa kelompok berisiko
400.7.7	Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Mata
400.7.7.1	Surveilans dan respon kejadian luar biasa
400.7.7.2	Imunisasi
400.7.7.3	Karantina kesehatan dan kesehatan di pelabuhan
400.7.7.4	Kesehatan mata
400.7.8	Pengendalian Penyakit Menular Langsung

	400.7.8.1	Pengendalian tuberkolosis
	400.7.8.2	Pengendalian AIDS dan penyakit menular seksual
	400.7.8.3	Pengendalian infeksi saluran pernafasan akut
	400.7.8.4	Pengendalian diare dan infeksi saluran pencernaan
	400.7.8.5	Pengendalian kusta dan frambusia
400.7.9		Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang
	400.7.9.1	Pengendalian malaria
	400.7.9.2	Pengendalian arbovirosis
	400.7.9.3	Pengendalian zoonosis
	400.7.9.4	Pengendalian filariasis dan kecacingan
400.7.10		Pengendalian penyakit tidak menular
	400.7.10.1	Pengendalian penyakit jantung dan pembuluh darah
	400.7.10.2	Pengendalian penyakit diabetes melitus dan penyakit metabolik
	400.7.10.3	Penyakit kanker
	400.7.10.4	Penyakit kronis dan generatif
	400.7.10.5	Gangguan akibat kecelakaan dan tindak kekerasan
400.7.11		Penyehatan Lingkungan
	400.7.11.1	Penyehatan air dan sanitasi dasar
	400.7.11.2	Pemukiman dan tempat umum
	400.7.11.3	Kawasan dan sanitasi darurat
	400.7.11.4	Higien sanitasi pangan
	400.7.11.5	Pengamanan limbah, udara, radiasi
400.7.12		Pengembangan Teknologi Laboratorium dan Penapisan Teknologi Pengendalian Penyakit dan Pengendalian Lingkungan
400.7.13		Gizi
	400.7.13.1	Gizi makro
	400.7.13.2	Gizi mikro
	400.7.13.3	Gizi klinik dan diatetik
	400.7.13.4	Konsumsi makanan dan jasa makanan
	400.7.13.5	Kewaspadaan gizi
400.7.14		Kesehatan Ibu
	400.7.14.1	Kesehatan ibu hamil
	400.7.14.2	Kesehatan ibu bersalin dan nifas
	400.7.14.3	Kesehatan maternal dengan pencegahan komplikasi
	400.7.14.4	Keluarga berencana
	400.7.14.5	Perlindungan kesehatan reproduksi
400.7.15		Kesehatan Anak
	400.7.15.1	Kelangsungan hidup bayi
	400.7.15.2	Kelangsungan anak balita dan pra sekolah
	400.7.15.3	Kewaspadaan penanganan balita berisiko
	400.7.15.4	Kualitas hidup anak usia sekolah dan remaja
	400.7.15.5	Perlindungan kesehatan anak
400.7.16		Kesehatan Tradisional Alternatif dan Komplementer

	400.7.16.1	Kesehatan tradisional keterampilan
	400.7.16.2	Kesehatan tradisional ramuan
	400.7.16.3	Kesehatan alternatif dan komplementer
	400.7.16.4	Penapisan dan kemitraan
400.7.17		Kesehatan Kerja dan Olah raga
	400.7.17.1	Pelayanan kesehatan kerja
	400.7.17.2	Kapasitas kerja
	400.7.17.3	Lingkungan kerja
	400.7.17.4	Kemitraan kesehatan kerja
	400.7.17.5	Kesehatan perkotaan
	400.7.17.6	Kesehatan olahraga
400.7.18		Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
	400.7.18.1	Harga obat publik
	400.7.18.2	Pengadaan obat
	400.7.18.3	Perbekalan kesehatan
400.7.19		Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan
	400.7.19.1	Alat kesehatan
	400.7.19.2	Produsen dan distributor alat kesehatan dan obat
	400.7.19.3	Produk diagnostik in vitro dan perbekalan kesehatan rumah tangga
400.7.20		Kefarmasian
	400.7.20.1	Pelayanan kefarmasian
	400.7.20.2	Farmasi klinis
	400.7.20.3	Farmasi Komunitas
	400.7.20.4	Penggunaan obat rasional
400.7.21		Produksi dan Distribusi kefarmasian
	400.7.21.1	Obat tradisional
	400.7.21.2	Kosmetik dan makanan
	400.7.21.3	Narkotika, psikotropika, prekursor farmasi dan sediaan farmasi khusus
	400.7.21.4	Kemandirian obat dan bahan baku obat
400.7.22		Surat Keterangan, Sertifikasi dan Perizinan
	400.7.22.1	Surat keterangan
	400.7.22.2	Sertifikasi dan perizinan
400.7.23		Penanggulangan Krisis Kesehatan
	400.7.23.1	Pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan
	400.7.23.2	Tanggap darurat dan pemulihan
	400.7.23.3	Pemantauan dan informasi
	400.7.23.4	Penanggulangan krisis kesehatan dalam bidang pengendalian penyakit dan penyehatan
	400.7.23.5	Pelayanan kesehatan reproduksi situasi bencana
400.7.24		Pengembangan dan Jaminan Kesehatan
	400.7.24.1	Tersedianya data NHA setiap tahun
	400.7.24.2	Tersedianya dokumen teknis penguatan pelaksanaan JKN
400.7.25		Intelegensia Kesehatan
	400.7.25.1	Pemeliharaan dan peningkatan kemampuan inteligensia kesehatan

	400.7.25.2	Penanggulangan masalah inteligensia kesehatan
400.7.26	Kesehatan Haji	
	400.7.26.1	Pelayanan dan pendayagunaan sumber daya kesehatan haji
	400.7.26.2	Peningkatan kesehatan dan pengendalian faktor risiko kesehatan haji
400.7.27	Promosi Kesehatan	
	400.7.27.1	Sarana Promosi Kesehatan
	400.7.27.2	Pembinaan advokasi dan kemitraan serta pemberdayaan peran
	400.7.27.3	Pengembangan pesan promosi kesehatan
	400.7.27.4	Hari kesehatan
400.7.28	Data dan Informasi	
	400.7.28.1	Statistik kesehatan
	400.7.28.2	Analisis dan diseminasi informasi
	400.7.28.3	Pengembangan sistem informasi dan bank data kesehatan
400.7.29	Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen	
	400.7.29.1	Penilaian obat tradisional, suplemen makanan dan kosmetik
	400.7.29.2	Standardisasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen
	400.7.29.3	Inspeksi dan sertifikasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen
	400.7.29.4	Obat Asli Indonesia
400.7.30	Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya	
	400.7.30.1	Penilaian keamanan pangan
	400.7.30.2	Standardisasi produk pangan
	400.7.30.3	Inspeksi dan sertifikasi produk pangan
	400.7.30.4	Surveilan dan penyuluhan keamanan pangan
	400.7.30.5	Pengawasan produk dan bahan berbahaya
400.7.31	Rekam Medis	
400.8	AGAMA DAN KEPERCAYAAN	
400.8.1	Kebijakan di bidang Agama dan Kepercayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
400.8.2	Fasilitasi	
	400.8.2.1	Data Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Prov/Kab/Kota
	400.8.2.2	Pelaksanaan Kerukunan Umat Beragama dan Kepercayaan
	400.8.2.3	Pelestarian Nilai-Nilai Keagamaan dan Kepercayaan
	400.8.2.4	Kasus Keagamaan
	400.8.2.5	Kasus Aliran Keagamaan
400.8.3	Pembinaan Kepercayaan Kepada Tuhan YME	
	400.8.3.1	Kelembagaan dan kepercayaan
	400.8.3.2	Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama
	400.8.3.3	Komunitas Kepercayaan

		400.8.3.4	Pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional
		400.8.3.5	Lingkungan Budaya dan Pranata Sosial
400.9	SOSIAL		
	400.9.1		Kebijakan di bidang Sosial yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	400.9.2		Kesejahteraan Sosial Anak
		400.9.2.1	Kesejahteraan sosial anak balita
		400.9.2.2	Kesejahteraan sosial anak terlantar
		400.9.2.3	Kesejahteraan sosial anak berhadapan dengan hukum
		400.9.2.4	Kesejahteraan sosial anak dengan kecatatan
		400.9.2.5	Kesejahteraan sosial anak yang membutuhkan perlindungan khusus
	400.9.3		Rehabilitasi Sosial
		400.9.3.1	Rehabilitasi sosial orang dengan kecacatan tubuh dan bekas penderita penyakit kronis, netra dan rungu wicara, mental
		400.9.3.2	Kelembagaan dan advokasi social
		400.9.3.3	Asistensi dan pemeliharaan kesejahteraan sosial
	400.9.4		Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial
		400.9.4.1	Gelandangan, pengemis dan pemulung
		400.9.4.2	Tuna susila dan korban <i>trafficking</i> perempuan
		400.9.4.3	Warga binaan lembaga pemasyarakatan meliputi penyiapan, reintegrasi
		400.9.4.4	Pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS dan kelompok minoritas
	400.9.5		Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA
	400.9.6		Pelayanan sosial lanjut usia
		400.9.6.1	Pelayanan sosial dalam dan luar panti
		400.9.6.2	Pengembangan kelembagaan meliputi pembinaan lembaga, kerjasama lembaga
		400.9.6.3	Advokasi dan pelayanan sosial kedaruratan
	400.9.7		Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial
	400.9.8		Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran
	400.9.9		Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial
		400.9.9.1	Ketahanan sosial masyarakat meliputi keserasian sosial, penguatan Sumber Daya
		400.9.9.2	Tanggap darurat meliputi bantuan darurat, advokasi sosial
		400.9.9.3	Pemulihan sosial meliputi penguatan sosial, reintegrasi sosial
		400.9.9.4	Kerjasama meliputi kerjasama pemerintah, kerjasama non pemerintah
	400.9.10		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
		400.9.10.1	Kesiapsiagaan dan mitigasi
		400.9.10.2	Tanggap darurat meliputi bantuan darurat, advokasi sosial

	400.9.10.3	Pemulihan sosial dan penguatan sosial
	400.9.10.4	Kerjasama
400.9.11	Jaminan Sosial	
	400.9.11.1	Seleksi dan verifikasi
	400.9.11.2	Asuransi kesejahteraan sosial meliputi kelembagaan, pengelolaan premi
	400.9.11.3	Bantuan langsung dan tunjangan berkelanjutan meliputi pendampingan dan penyaluran
	400.9.11.4	Kerjasama
400.9.12	Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial	
	400.9.12.1	Ketahanan keluarga
	400.9.12.2	Asistensi keluarga dan pemberdayaan perempuan
	400.9.12.3	Tenaga kesejahteraan sosial masyarakat dan organisasi sosial
	400.9.12.4	Kemitraan dunia usaha
	400.9.12.5	Karang taruna meliputi kelembagaan, pengembangan kapasitas
400.9.13	Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil	
	400.9.13.1	Persiapan pemberdayaan
	400.9.13.2	Pemberdayaan sumber daya manusia
	400.9.13.3	Penggalian dan pengembangan potensi
	400.9.13.4	Keserasian dan penguatan komunitas adat terpencil
	400.9.13.5	Kerjasama kelembagaan
400.9.14	Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dan Perdesaan	
	400.9.14.1	Identifikasi dan analisis
	400.9.14.2	Pengembangan kapasitas
	400.9.14.3	Penataan sosial lingkungan kumuh
	400.9.14.4	Advokasi sosial dan pengembangan aksesibilitas
	400.9.14.5	Bantuan Langsung
	400.9.14.6	Kerjasama Kelembagaan
400.9.15	Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial	
	400.9.15.1	Penghargaan dan kesejahteraan keluarga pahlawan
	400.9.15.2	Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan
	400.9.15.3	Pengembangan kesetiakawanan sosial
	400.9.15.4	Pengelolaan taman makam pahlawan
400.10	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	
400.10.1	Kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
400.10.2	Pemerintahan Desa dan Kelurahan	
	400.10.2.1	Fasilitasi Pengembangan Desa dan Kelurahan
	400.10.2.2	Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan
	400.10.2.3	Fasilitasi Permusyawaratan Desa
	400.10.2.4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa

- 400.10.2.5 Pengembangan Kapasitas Desa
 - 400.10.3 Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat
 - 400.10.3.1 Lembaga Masyarakat
 - 400.10.3.2 Pembangunan Partisipatif
 - 400.10.3.3 Pendataan Potensi Masyarakat
 - 400.10.3.4 Pengembangan Kawasan Perdesaan
 - 400.10.3.5 Pelatihan Masyarakat
 - 400.10.4 Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat
 - 400.10.4.1 Budaya Nusantara
 - 400.10.4.2 Pemberdayaan Perempuan
 - 400.10.4.3 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
 - 400.10.4.4 Kesejahteraan Sosial
 - 400.10.4.5 Tenaga Kerja Perdesaan
 - 400.10.5 Usaha Ekonomi Masyarakat
 - 400.10.5.1 Usaha Pertanian dan Pangan
 - 400.10.5.2 Usaha Perkreditan dan Simpan Pinjam
 - 400.10.5.3 Produksi dan Pemasaran
 - 400.10.5.4 Usaha Ekonomi dan Keluarga
 - 400.10.5.5 Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal
 - 400.10.6 Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Perdesaan
 - 400.10.6.1 Fasilitas Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan Perdesaan
 - 400.10.6.2 Fasilitas Pemanfaatan Lahan dan Pesisir Perdesaan
 - 400.10.6.3 Fasilitas Prasarana dan Sarana Perdesaan
 - 400.10.6.4 Fasilitas Pemetaan Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi Perdesaan
 - 400.10.6.5 Pemasyarakatan dan Kerjasama Teknologi Perdesaan
 - 400.10.7 Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)
- 400.11 PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN
 - 400.11.1 Kebijakan di bidang Pertamanan dan Pemakaman yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
 - 400.11.2 Pertamanan
 - 400.11.2.1 Perencanaan Pertamanan
 - 400.11.2.2 Taman Kota
 - 400.11.2.3 Tata Hias dan Ornamen Kota
 - 400.11.3 Pemakaman
 - 400.11.3.1 Perencanaan Pemakaman
 - 400.11.3.2 Pemakaman
 - 400.11.3.3 Pelayanan Pemakaman
 - 400.11.4 Jalur Hijau
 - 400.11.4.1 Perencanaan Jalur Hijau
 - 400.11.4.2 Jalur Hijau Jalan
 - 400.11.4.3 Jalur Hijau Penyempurna dan Tepian Air
 - 400.11.5 Peran Serta Masyarakat
 - 400.11.6 Pengawasan dan Penindakan
 - 400.11.7 Pengelolaan Data
 - 400.11.8 Evaluasi dan Pelaporan

- 400.12 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
 - 400.12.1 Kebijakan di Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
 - 400.12.2 Pendaftaran Penduduk
 - 400.12.2.1 Identitas Penduduk
 - 400.12.2.2 Pindah Datang Penduduk Dalam Wilayah NKRI
 - 400.12.2.3 Pindah Datang Penduduk Antar Negara
 - 400.12.2.4 Pendataan Penduduk Rentan
 - 400.12.2.5 Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi
 - 400.12.3 Pencatatan Sipil
 - 400.12.3.1 Kelahiran dan Kematian
 - 400.12.3.2 Perkawinan dan Perceraian
 - 400.12.3.3 Pengangkatan Pengakuan dan Pengesahan Anak serta Perubahan dan
 - 400.12.3.4 Pencatatan Kewarganegaraan
 - 400.12.3.5 Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi
 - 400.12.4 Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - 400.12.4.1 Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
 - 400.12.4.2 Kelembagaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - 400.12.4.3 Pengelolaan data Administrasi Kependudukan
 - 400.12.4.4 Penyajian dan Layanan Informasi Administrasi Kependudukan
 - 400.12.4.5 Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi
 - 400.12.5 Pengembangan Kebijakan Kependudukan
 - 400.12.5.1 Kuantitas Penduduk
 - 400.12.5.2 Kualitas Penduduk
 - 400.12.5.3 Mobilitas Penduduk
 - 400.12.5.4 Perlindungan dan Pemberdayaan Penduduk
 - 400.12.5.5 Pengembangan Wawasan Kependudukan, Monitoring dan Evaluasi
 - 400.12.6 Penyerasian Kependudukan
 - 400.12.6.1 Indikator Kependudukan
 - 400.12.6.2 Proyeksi Penduduk
 - 400.12.6.3 Perencanaan Kependudukan
 - 400.12.6.4 Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Non Pemerintah
 - 400.12.6.5 Pelaksanaan Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Pemerintah
- 400.13 KELUARGA BERENCANA
 - 400.13.1 Kebijakan di bidang Keluarga Berencana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
 - 400.13.2 Analisis Pengaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk
 - 400.13.2.1 Pengumpulan dan pengolahan data
 - 400.13.2.2 Evaluasi dan pelaporan
 - 400.13.3 Fasilitas Pengaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk

- 400.13.3.1 Penyiapan fasilitas
- 400.13.3.2 Evaluasi dan pelaporan
- 400.13.4 Profil dan Proyeksi Penduduk
 - 400.13.4.1 Data profil dan proyeksi penduduk
 - 400.13.4.2 Evaluasi data profil dan proyeksi penduduk
- 400.13.5 Penetapan Parameter Pengendalian Penduduk
 - 400.13.5.1 Penetapan sasaran parameter
 - 400.13.5.2 Evaluasi sasaran parameter
- 400.13.6 Pemanfaatan Perencanaan Pengendalian Penduduk
 - 400.13.6.1 Pemanfaatan profil dan proyeksi
 - 400.13.6.2 Pemanfaatan parameter
- 400.13.7 Pengembangan Sistem
 - 400.13.7.1 Pengembangan Sistem Jalur Pendidikan Formal
 - 400.13.7.2 Pengembangan Sistem Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal
- 400.13.8 Pengembangan Materi
 - 400.13.8.1 Pengembangan Materi Jalur Pendidikan Formal
 - 400.13.8.2 Pengembangan Materi Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal
- 400.13.9 Monitoring dan Evaluasi
 - 400.13.9.1 Monitoring dan Evaluasi Jalur Pendidikan Formal
 - 400.13.9.2 Monitoring dan Evaluasi Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal
- 400.13.10 Analisis Sosial
- 400.13.11 Analisis Ekonomi
- 400.13.12 Analisis Dampak Politik, Pertahanan dan Keamanan
- 400.13.13 Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan
- 400.13.14 Bina Keluarga Berencana Rumah Sakit dan Klinik Pemerintah
- 400.13.15 Jaminan pelayanan dan penyediaan sarana keluarga berencana
- 400.13.16 Kualitas pelayanan keluarga berencana pemerintah
 - 400.13.16.1 Standarisasi pelayanan keluarga berencana pemerintah
 - 400.13.16.2 Monitoring dan evaluasi pelayanan keluarga berencana pemerintah
- 400.13.17 Bina keluarga berencana rumah sakit dan klinik swasta
- 400.13.18 Jaminan dan ketersediaan sarana keluarga berencana swasta
- 400.13.19 Kualitas pelayanan keluarga berencana swasta
 - 400.13.19.1 Standarisasi pelayanan keluarga berencana swasta
 - 400.13.19.2 Monitoring dan Evaluasi pelayanan keluarga berencana swasta
- 400.13.20 Akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana jalur wilayah tertinggal, terpencil dan perbatasan
 - 400.13.20.1 Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana wilayah tertinggal, terpencil, dan perbatasan

- 400.13.20.2 Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah tertinggal, terpencil, dan perbatasan
- 400.13.21 Akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan
 - 400.13.21.1 Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan
 - 400.13.21.2 Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan
- 400.13.22 Kesertaan keluarga berencana pria
 - 400.13.22.1 Peningkatan akses keluarga berencana pria
 - 400.13.22.2 Peningkatan partisipasi keluarga berencana pria
- 400.13.23 Kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak
- 400.13.24 Pencegahan PMS dan HIV/AIDS
- 400.13.25 Pencegahan kanker alat reproduksi dan penanggulangan infertilitas
- 400.13.26 Pelembagaan bina keluarga Balita dan anak
 - 400.13.26.1 Pengembangan kelompok bina keluarga Balita dan anak
 - 400.13.26.2 Pengembangan kemitraan bina keluarga dan anak
- 400.13.27 Monitoring dan evaluasi bina keluarga Balita dan anak
 - 400.13.27.1 Monitoring bina keluarga Balita dan anak
 - 400.13.27.2 Evaluasi dan pelaporan bina keluarga Balita dan anak
- 400.13.28 Pelembagaan bina ketahanan remaja
 - 400.13.28.1 Pelembagaan bina ketahanan remaja jalur pendidikan
 - 400.13.28.2 Pelembagaan bina ketahanan remaja jalur masyarakat
- 400.13.29 Monitoring dan evaluasi bina ketahanan remaja
 - 400.13.29.1 Monitoring bina ketahanan remaja
 - 400.13.29.2 Evaluasi dan pelaporan bina ketahanan remaja
- 400.13.30 Pengembangan Program Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan
 - 400.13.30.1 Pengembangan Program Bina Ketahanan keluarga Lansia
 - 400.13.30.2 Pengembangan Program Bina Ketahanan keluarga Rentan
- 400.13.31 Pelembagaan Bina Ketahanan keluarga Lansia dan Rentan
 - 400.13.31.1 Pengembangan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan
 - 400.13.31.2 Pengembangan Kemitraan Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan
- 400.13.32 Monitoring dan evaluasi bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan
 - 400.13.32.1 Monitoring Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan
 - 400.13.32.2 Evaluasi dan pelaporan bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan
- 400.13.34 Peningkatan teknologi dan permodalan usaha ekonomi keluarga

- 400.13.35 Peningkatan manajemen usaha ekonomi keluarga
 - 400.13.35.1 Pengembangan administrasi dan keuangan kelompok usaha ekonomi keluarga
 - 400.13.35.2 Pengembangan pemasaran kelompok usaha ekonomi keluarga
- 400.13.36 Monitoring dan evaluasi usaha ekonomi keluarga
- 400.13.37 Pengembangan Program Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
- 400.13.38 Pelembagaan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
 - 400.13.38.1 Pengembangan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
 - 400.13.38.2 Pengembangan Kemitraan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
- 400.13.39 Monitoring dan Evaluasi Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
 - 400.13.39.1 Monitoring Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
 - 400.13.39.2 Evaluasi dan pelaporan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
- 400.13.40 Pengembangan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi
 - 400.13.40.1 Perencanaan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi
 - 400.13.40.2 Evaluasi dan pelaporan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi
- 400.13.41 Advokasi dan pencitraan
- 400.13.42 Komunikasi, Informasi dan Edukasi
 - 400.13.42.1 Promosi
 - 400.13.42.2 Sarana produksi media komunikasi
 - 400.13.42.3 Produk media komunikasi
- 400.13.43 Hubungan dengan lembaga pemerintah pusat dan provinsi
- 400.13.44 Hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota
 - 400.13.44.1 Pengembangan hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota
 - 400.13.44.2 Penguatan hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota
- 400.13.45 Hubungan dengan lembaga nonpemerintah
 - 400.13.45.1 Pengembangan hubungan dengan lembaga nonpemerintah
 - 400.13.45.2 Penguatan hubungan dengan lembaga nonpemerintah
- 400.13.46 Tenaga Lini Lapangan
 - 400.13.46.1 Pengembangan tenaga lini lapangan
 - 400.13.46.2 Monitoring dan evaluasi tenaga lini lapangan
- 400.13.47 Institusi Masyarakat Pedesaan
 - 400.13.47.1 Pengembangan institusi masyarakat pedesaan
 - 400.13.47.2 Monitoring dan evaluasi institusi masyarakat pedesaan
- 400.13.48 Mekanisme Operasional lini lapangan

- 400.13.48.1 Pengembangan mekanisme operasional lini lapangan
- 400.13.48.2 Monitoring dan evaluasi mekanisme operasional lini lapangan
- 400.13.49 Pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan
 - 400.13.49.1 Perumusan pola sistem pencatatan dan pelaporan
 - 400.13.49.2 Monitoring dan evaluasi sistem pencatatan dan pelaporan
- 400.13.50 Pengumpulan dan pengolahan data
- 400.13.51 Analisis dan evaluasi
 - 400.13.51.1 Analisis dan evaluasi pengendalian penduduk
 - 400.13.51.2 Analisis dan evaluasi keluarga berencana dan keluarga sejahtera
- 400.13.52 Sistem aplikasi dan bank data
 - 400.13.52.1 Pengembangan sistem aplikasi
 - 400.13.52.2 Pengelolaan bank data
- 400.13.53 Infrastruktur teknologi informasi
 - 400.13.53.1 Pengembangan infrastruktur teknologi informasi
 - 400.13.53.2 Pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi
- 400.13.54 Dokumentasi dan penyebarluasan informasi
 - 400.13.54.1 Dokumentasi dan perpustakaan
 - 400.13.54.2 Pengelolaan situs BKKBN dan media konferensi
- 400.14 HUBUNGAN MASYARAKAT
 - 400.14.1 Keprotokolan
 - 400.14.1.1 Penyelenggaraan acara kedinasan (upacara, pelantikan, peresmian, dan jamuan termasuk acara peringatan hari-hari besar)
 - 400.14.1.2 Buku tamu Keprotokolan
 - 400.14.1.3 Agenda kegiatan pimpinan daerah
 - 400.14.1.4 Kunjungan dinas dalam dan luar negeri
 - 400.14.2 Daftar nama/alamat kantor /pejabat
 - 400.14.3 Dokumentasi/ liputan kegiatan dinas pimpinan, acara kedinasan dan peristiwa-peristiwa bidang masing-masing, dalam berbagai media : kertas, foto/video/rekaman suara/multi media
 - 400.14.4 Pengumpulan,pengolahan dan penyajian informasi kelembagaan
 - 400.14.4.1 Kliping koran
 - 400.14.4.2 Brosur/Leaflet/poster/plakat
 - 400.14.4.3 Pengumuman/pemberitaan
 - 400.14.5 Hubungan antar lembaga dan Pemerintahan Daerah
 - 400.14.5.1 Hubungan antar lembaga pemerintah
 - 400.14.5.2 Hubungan dengan organisasi sosial/LSM
 - 400.14.5.3 Hubungan dengan perusahaan

- 400.14.5.4 Hubungan dengan Perguruan Tinggi/sekolah, termasuk magang, Pendidikan Sistem Ganda (PSG)/Praktek Kerja Lapang (PKL)
- 400.14.5.5 Forum Kehumasan
- 400.14.5.6 Hubungan dengan Media Massa
- 400.14.6 Dengar pendapat/hearing DPRD
- 400.14.7 Bahan/materi pidato/sidang Muspida Provinsi/Kota/Kabupaten
- 400.14.8 Penerbitan Majalah, buletin, koran dan jurnal
- 400.14.9 Publikasi melalui media cetak maupun elektronik
- 400.14.10 Pameran/sayembara/lomba/festival,pembuatan spanduk dan iklan
- 400.14.11 Penghargaan/tanda kenang-kenangan
- 400.14.12 Ucapan Terima kasih, Ucapan Selamat, Bela Sungkawa, Permohonan Maaf

500 PEREKONOMIAN

500.1 KETAHANAN PANGAN

- 500.1.1 Kebijakan di bidang Ketahanan Pangan yang dilakukan Pemerintah Daerah
- 500.1.2 Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
 - 500.1.2.1 Ketersediaan Pangan
 - 500.1.2.2 Akses Pangan
 - 500.1.2.3 Kerawanan Pangan
- 500.1.3 Distribusi dan Cadangan Pangan
 - 500.1.3.1 Distribusi Pangan
 - 500.1.3.2 Harga Pangan
 - 500.1.3.3 Cadangan Pangan
- 500.1.4 Penganekaragaman Konsumsi dan Ketahanan Pangan
 - 500.1.4.1 Konsumsi Pangan
 - 500.1.4.2 Penganekaragaman Pangan
 - 500.1.4.3 Keamanan Pangan Segar
- 500.1.5 Penguatan Kelembagaan Ketahanan Pangan
 - 500.1.5.1 Dewan Ketahanan Pangan
 - 500.1.5.2 Penghargaan Ketahanan Pangan
- 500.1.6 Swasembada Pangan (Kearifan Lokal)
- 500.1.7 Bimbingan Teknis
- 500.1.8 Evaluasi

500.2 PERDAGANGAN

- 500.2.1 Kebijakan di bidang Perdagangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 500.2.2 Perdagangan Dalam Negeri
 - 500.2.2.1 Bina Usaha Kelembagaan dan Penguatan Usaha
 - 500.2.2.2 Bina Usaha Jasa Perdagangan
 - 500.2.2.3 Bina Usaha Dagang Asing dan Keagenan
 - 500.2.2.4 Informasi Perusahaan
 - 500.2.2.5 Pelaku Pasar

	500.2.2.6	Iklim Usaha dan Bimbingan Teknis Usaha Dagang Kecil Menengah
	500.2.2.7	Fasilitasi Usaha dan Pemasaran Usaha Dagang Kecil Menengah
	500.2.2.8	Pengembangan Produk Lokal
	500.2.2.9	Pencitraan Produk Dalam Negeri
	500.2.2.10	Pengembangan Sarana Distribusi
	500.2.2.11	Pengelolaan Sarana Distribusi
	500.2.2.12	Kerjasama Pengembangan Sistem Logistik
	500.2.2.13	Informasi dan Bimbingan Teknis Penyedia Jasa Logistik
	500.2.2.14	Informasi Pasar
	500.2.2.15	Informasi Hasil Industri
	500.2.2.16	Barang Strategis
	500.2.2.17	Bahan Pokok Agro
500.2.3		Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
	500.2.3.1	Kelembagaan dan informasi standar
	500.2.3.2	Kerjasama Standarisasi
	500.2.3.3	Perumusan dan penerapan standar
	500.2.3.4	Tata usaha
	500.2.3.5	Kerjasama, informasi, dan publikasi
	500.2.3.6	Analisa penyelenggaraan perlindungan konsumen
	500.2.3.7	Bimbingan konsumen dan pelaku usaha
	500.2.3.8	Fasilitas kelembagaan
	500.2.3.9	Produk pertambangan dan aneka industri
	500.2.3.10	Produk pertanian, kimia dan kehutanan
	500.2.3.11	Jasa
	500.2.3.12	Kerjasama
	500.2.3.13	Sarana dan Kerjasama
	500.2.3.14	Kelembagaan dan penilaian
	500.2.3.15	UTTP dan Standar Ukuran
	500.2.3.16	Pengawasan
	500.2.3.17	Balai pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran
	500.2.3.18	Balai Pengujian UTTP
500.2.4		Perdagangan Berjangka Komoditi
	500.2.4.1	Pengkajian pasar
	500.2.4.2	Pengawasan Transaksi
	500.2.4.3	Pengawasan Keuangan dan Audit
	500.2.4.4	Pengkajian pasar
	500.2.4.5	Pengembangan Pasar
	500.2.4.6	Sistem informasi
	500.2.4.7	Pembinaan pasar lelang dan sistem resi gudang
	500.2.4.8	Pengawasan pasar lelang
	500.2.4.9	Pengawasan sistem gudang
500.2.5		Bimbingan Teknis
500.2.6		Evaluasi

500.3	KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
500.3.1	Kebijakan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
500.3.2	Kelembagaan Koperasi dan UKM
500.3.2.1	Organisasi dan Badan Hukum Koperasi
500.3.2.2	Tata Laksana Koperasi dan UKM
500.3.2.3	Keanggotaan Koperasi
500.3.2.4	Pengendalian dan Akuntabilitas
500.3.3	Produksi
500.3.3.1	Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
500.3.3.2	Kehutanan dan Perkebunan
500.3.3.3	Perikanan dan Peternakan
500.3.3.4	Industri Kerajinan dan Pertambangan
500.3.3.5	Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha
500.3.4	Pembiayaan
500.3.4.1	Program Pendanaan
500.3.4.2	Pengembangan dan Pengendalian Simpan Pinjam
500.3.4.3	Urusan Permodalan
500.3.4.4	Asuransi dan Jasa Keuangan
500.3.4.5	Pembiayaan dan Penjaminan Kredit
500.3.4.6	Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUKM (LPDB)
500.3.5	Pemasaran dan Jaringan Usaha
500.3.5.1	Perdagangan Dalam Negeri
500.3.5.2	Ekspor dan Impor
500.3.5.3	Sarana dan Prasarana Pemasaran
500.3.5.4	Kemitraan dan Jaringan Usaha
500.3.5.5	Informasi dan Publikasi Bisnis
500.3.5.6	Lembaga Layanan Pemasaran LLP Koperasi dan UKM
500.3.6	Pengembangan Sumber Daya Manusia
500.3.6.1	Pengembangan Kewirausahaan
500.3.6.2	Kebijakan Pendidikan Koperasi dan UKM
500.3.6.3	Peran Serta Masyarakat
500.3.6.4	Monitoring dan Evaluasi Diklat Koperasi dan UKM
500.3.6.5	Advokasi
500.3.7	Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha
500.3.7.1	Produktifitas dan Mutu
500.3.7.2	Restrukturisasi Usaha
500.3.7.3	Pemberdayaan Lembaga Pengembangan Bisnis (LPB)
500.3.7.4	Fasilitasi Investasi UKMK
500.3.7.5	Pengembangan Sarana Bisnis
500.3.8	Pengkajian Sumber Daya UKMK
500.3.8.1	Penelitian Koperasi
500.3.8.2	Penelitian UKM
500.3.8.3	Penelitian Sumber Daya
500.3.8.4	Pengembangan Perkaderan UMK

500.3.9	Kerja Sama Hubungan Antar Lembaga
500.3.10	Pedagang Kaki Lima (PKL)
500.3.10.1	Peraturan Perundang-Undangan
500.3.10.2	Sarana dan Prasarana
500.3.11	Monitoring dan Evaluasi
500.4	KEHUTANAN
500.4.1	Kebijakan di bidang Kehutanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
500.4.2	Penyuluhan
500.4.2.1	Program Kerja Penyuluhan
500.4.2.2	Materi Penyuluhan
500.4.2.3	Program Penyuluhan
500.4.2.4	Sarana Penyuluhan
500.4.2.5	Pengembangan Tenaga Penyuluhan
500.4.2.6	Pelaksanaan Penyuluhan
500.4.2.7	Pemberdayaan Masyarakat
500.4.2.8	Deseminasi
500.4.2.9	Evaluasi dan Laporan
500.4.3	Planologi Kehutanan
500.4.3.1	Perencanaan Makro Kawasan Hutan
500.4.3.2	Penataan Ruang Kawasan Hutan
500.4.3.3	Statistik dan Jaringan Komunikasi Data Kehutanan
500.4.3.4	Pengukuhan dan Penataaan Kawasan Hutan
500.4.3.5	Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan
500.4.3.6	Informasi dan Dokumentasi Kawasan Hutan
500.4.3.7	Inventarisasi Sumber Daya Hutan
500.4.3.8	Pemantauan Sumber Daya Hutan
500.4.3.9	Pemetaan Sumber Daya Hutan
500.4.3.10	Jaringan Data Spasial
500.4.3.11	Penggunaan Kawasan Hutan
500.4.3.12	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan
500.4.3.13	Informasi Penggunaan Kawasan Hutan
500.4.3.14	Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan
500.4.3.15	Penyiapan Areal Pemanfaatan Hutan
500.4.3.16	Informasi Wilayah Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan
500.4.4	Bina Usaha Kehutanan
500.4.4.1	Data areal HPH /HTI/IUPHHK
500.4.4.2	SK HPH/HTI/IUPHHK
500.4.4.3	Kerja sama
500.4.4.4	Pembatalan/Penolakan
500.4.4.5	Perpanjangan
500.4.4.6	Modal dan Peralatan
500.4.4.7	Investasi Industri
500.4.4.8	Peralatan

500.4.4.9	Tenaga Kerja
500.4.4.10	Pemegang Saham
500.4.4.11	Neraca Perusahaan
500.4.4.12	Rencana Karya Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)
500.4.4.13	Rencana Karya Pengusahaan Hutan (RKPH)
500.4.4.14	Rencana Karya Tahunan Pengusahaan Hutan (RKT)
500.4.4.15	Rencana Karya Lima Tahun Pengusahaan Hutan (RKL)
500.4.4.16	Target Produksi RKT dan Beban Kerja
500.4.4.17	Produksi Kayu
500.4.4.18	Produksi non kayu
500.4.4.19	Industri Kayu HPH/HTI/IUPHHK
500.4.4.20	Industri Kayu Non HPH/HTI/IUPHHK
500.4.4.21	Industri Non Kayu
500.4.4.22	Hutan Tanaman Industri Pulp
500.4.4.23	Hutan Tanaman Industri Pertukangan
500.4.4.24	Pelanggaran dan Sanksi
500.4.4.25	Pemblokiran
500.4.4.26	Denda
500.4.4.27	Pencabutan Areal HPH/HTI/IUPHHK
500.4.4.28	Pola Pemanfaatan Hutan Produksi
500.4.4.29	Penataan Pemanfaatan Hutan Produksi
500.4.4.30	Informasi Sumber Daya Hutan Produksi
500.4.4.31	Pengembangan Investasi Usaha
500.4.4.32	Penyiapan Pemanfaatan Hutan Alam
500.4.4.33	Rencana Kerja Pemanfaatan Hutan Alam/Rencana Kerja Usaha Produksi Hasil Produksi Hutan Alam
500.4.4.34	Produksi Hutan Alam
500.4.4.35	Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Alam
500.4.4.36	Pengembangan Hutan Tanaman Industri
500.4.4.37	Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat
500.4.4.38	Pengembangan Rencana Kerja dan Produksi Hutan Tanaman/Rencana Kerja Usaha Produksi
500.4.4.39	Penilaian Kinerja Pengembangan Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman
500.4.4.40	Pembiayaan Hutan Tanaman
500.4.4.41	Penerimaan Negara Bukan Pajak Hasil Hutan
500.4.4.42	Peredaran Hasil Hutan
500.4.4.43	Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan
500.4.4.44	Penertiban Peredaran Hasil Hutan
500.4.4.45	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan
500.4.4.46	Pengendalian Bahan Baku dan Industri Primer Hasil Hutan
500.4.4.47	Penilaian Kinerja Industri dan Pemasaran Hasil Hutan
500.4.4.48	Pembinaan HPH/HTI/IUPHHK
500.4.4.49	Pembinaan TPTI/TPTJ/Silvikultur

500.4.5	Standardisasi dan Lingkungan
500.4.5.1	Standardisasi
500.4.5.2	Sarana Pengujian Hasil Hutan
500.4.5.3	Pengembangan
500.4.5.4	Pemasaran Hasil Hutan
500.4.5.5	Pengendalian Lingkungan
500.4.5.6	Angkutan Hasil Hutan
500.4.5.7	Tanda Pengenal Perusahaan Tata Usaha Hasil Hutan
500.4.5.8	Legalitas Tata Usaha Hasil Hutan
500.4.5.9	Palu Tok Kualitas Tata Usaha Hasil Hutan
500.4.5.10	Pass Angkutan Hasil Hutan
500.4.5.11	Sertifikat Ekspor Hasil Hutan
500.4.6	Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam
500.4.6.1	Flora dan Fauna yang Dilindungi
500.4.6.2	Flora dan Fauna yang Tidak Dilindungi
500.4.6.3	Lembaga Konservasi/Kebun Binatang
500.4.6.4	Konvensi Keanekaragaman Hayati
500.4.6.5	Kawasan Konservasi
500.4.6.6	Pengamanan Hutan
500.4.6.7	Program dan Evaluasi Penyidikan dan Perlindungan
500.4.6.8	Penyidikan dan Perlindungan Wilayah Hutan
500.4.6.9	Polisi Kehutanan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
500.4.6.10	Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam
500.4.6.11	Bina Cinta Alam
500.4.6.12	Kader Konservasi Sumber Daya Alam
500.4.6.13	Data organisasi pencinta alam dan kader konservasi SDA
500.4.7	Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial
500.4.7.1	Pengelolaan Benih
500.4.7.2	Kebun Benih
500.4.7.3	Tegakan Benih
500.4.7.4	Pengadaan Benih
500.4.7.5	Pengujian dan Penyimpanan Benih
500.4.7.6	Lalu Lintas Angkutan Benih
500.4.7.7	Pembibitan
500.4.7.8	Lalu Lintas Angkutan Benih
500.4.7.9	Pengembangan Usaha Perbenihan
500.4.7.10	Pengendalian Peredaran Benih
500.4.7.11	Rehabilitasi Hutan dan Lahan
500.4.7.12	Tanaman Reboisasi
500.4.7.13	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
500.4.7.14	Perhutanan Sosial
500.4.7.15	Pengendalian Perladangan
500.4.8	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan

	500.4.8.1	Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Kehutanan
	500.4.8.2	Monitoring dan Evaluasi Penelitian
	500.4.8.3	Diseminasi
	500.4.8.4	Gelar Teknologi
	500.4.8.5	Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan
500.5	KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	500.5.1	Kebijakan di bidang Kelautan dan Perikanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	500.5.2	Perikanan Tangkap
	500.5.2.1	Data dan Statistik Perikanan Tangkap
	500.5.2.2	Rancang Bangun dan Kelaikan Kapal Perikanan
	500.5.2.3	Rancang Bangun dan Kelaikan Alat Tangkap Ikan
	500.5.2.4	Pendaftaran Kapal Perikanan
	500.5.2.5	Pengawakan Kapal dan Ketenagakerjaan Perikanan
	500.5.2.6	Perbantuan dan Evaluasi Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan
	500.5.2.7	Alokasi Usaha Penangkapan Ikan
	500.5.2.8	Tata Pengusahaan Penangkapan Ikan
	500.5.2.9	Verifikasi Dokumen Penangkapan Ikan
	500.5.2.10	Pelayanan Dokumen Penangkapan Ikan
	500.5.2.11	Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan
	500.5.2.12	Kelembgaan Usaha Penangkapan
	500.5.2.13	Investasi dan Permodalan Usaha
	500.5.2.14	Kenelayanan
	500.5.2.15	Pembinaan Pengelolaan Usaha
	500.5.2.16	Pemantauan dan Evaluasi Usaha Penangkapan Ikan
	500.5.3	Perikanan Budidaya
	500.5.3.1	Potensi Lahan dan Air
	500.5.3.2	Prasarana dan Sarana Budidaya Air Tawar
	500.5.3.3	Pengelolaan Induk Perbenihan ikan air tawar
	500.5.3.4	Perbenihan Skala Kecil
	500.5.3.5	Informasi dan Distribusi Pembenihan
	500.5.3.6	Budidaya Air Tawar
	500.5.3.7	Budidaya Ikan Hias
	500.5.3.8	Sertifikasi Budidaya Perikanan
	500.5.3.9	Data dan Statistik Perikanan Budidaya
	500.5.3.10	Hama dan Penyakit Ikan
	500.5.3.11	Perlindungan Lingkungan Budidaya
	500.5.3.12	Investasi dan Permodalan Usaha Budidaya
	500.5.3.13	Kewirausahaan Budidaya
	500.5.3.14	Pelayanan Usaha Budidaya
	500.5.3.15	Kelembagaan dan Ketenagakerjaan
	500.5.3.16	Promosi Usaha dan Budaya

500.5.4	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
500.5.4.1	Standarisasi Pengolahan Hasil
500.5.4.2	Pengembangan Produk
500.5.4.3	Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
500.5.4.4	Industri Pengolahan
500.5.4.5	Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil
500.5.4.6	Standarisasi Pengembangan Produk Non Konsumsi
500.5.4.7	Promosi dan Jaringan Ikan Hias
500.5.4.8	Pengembangan Industri
500.5.4.9	Sarana dan Prasarana Pengembangan Produk Non Konsumsi
500.5.4.10	Kelembagaan Pemasaran Dalam Negeri
500.5.4.11	Analisis dan Informasi Pasar Dalam Negeri
500.5.4.12	Jaringan Distribusi dan Kemitraan Pemasaran Dalam Negeri
500.5.4.13	Promosi dan Kerja Sama Pemasaran Dalam Negeri
500.5.4.14	Sarana dan Prasarana Pemasaran Dalam Negeri
500.5.4.15	Kelembagaan Pemasaran Luar Negeri
500.5.4.16	Analisis dan Informasi Pemasaran Luar Negeri
500.5.4.17	Pengembangan Ekspor
500.5.4.18	Pengembangan Impor
500.5.4.19	Promosi dan Kerja Sama Pemasaran Luar Negeri
500.5.4.20	Pelayanan Usaha
500.5.4.21	Kemitraan Usaha
500.5.4.22	Ketenagakerjaan Pengolahan dan Pemasaran
500.5.4.23	Investasi dan Permodalan
500.5.4.24	Informasi dan Promosi
500.5.5	Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil
500.5.5.1	Rencana Tata Ruang Laut Nasional dan Perairan Yurisdiksi
500.5.5.2	Rencana Tata Ruang dan Zona Wilayah I
500.5.5.3	Rencana Tata Ruang dan Zona Wilayah II
500.5.5.4	Informasi dan Evaluasi Spasial
500.5.5.5	Jejaring, Data, dan Informasi Konservasi
500.5.5.6	Konservasi Wawasan
500.5.5.7	Konservasi Jenis Ikan
500.5.5.8	Pemanfaatan Kawasan dan Jenis Ikan
500.5.5.9	Mitigasi Bencana Lingkungan
500.5.5.10	Pendayagunaan Sumber Daya Kelautan
500.5.5.11	Penanggulangan Pencemaran Sumber Daya Pesisir dan Laut
500.5.5.12	Rehabilitasi dan Reklamasi
500.5.5.13	Identifikasi Pulau-Pulau Terkecil
500.5.5.14	Pengelolaan Ekosistem Pulau-Pulau Terkecil

	500.5.5.15	Investasi dan Promosi Pulau-Pulau Terkecil
	500.5.5.16	Sarana dan Prasarana Pulau-Pulau Terkecil
	500.5.5.17	Akses Permodalan
	500.5.5.18	Akses Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
	500.5.5.19	Sosial Budaya Masyarakat
	500.5.5.20	Pengembangan Usaha
500.5.6	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	
	500.5.6.1	Pengawasan Penangkapan Wilayah Barat
	500.5.6.2	Pengawasan Penangkapan Wilayah Timur
	500.5.6.3	Pengawasan Pengangkutan, Pengolahan dan Pemasaran
	500.5.6.4	Pengawasan Usaha Budidaya
	500.5.6.5	Pengawasan Ekosistem Perairan dan Kawasan Konservasi
	500.5.6.6	Pengawasan Pencemaran Perairan
	500.5.6.7	Pengawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Terkecil
	500.5.6.8	Pengawasan Jasa Kelautan dan Sumber Daya Non Hayati
	500.5.6.9	Logistik dan Operasional Wilayah Barat
	500.5.6.10	Logistik dan Operasional Wilayah Timur
	500.5.6.11	Perawatan Kapal Pengawas
	500.5.6.12	Pengawakan Kapal Pengawas
	500.5.6.13	Sistem Pemantauan
	500.5.6.14	Pemantauan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan
	500.5.6.15	Pemantauan Sumber Daya Perikanan
	500.5.6.16	Pengembangan Infrastruktur Pengawasan
	500.5.6.17	Penyidikan
	500.5.6.18	Penanganan Barang Bukti dan Awak Kapal
	500.5.6.19	Kerja Sama Penegakan Hukum dan Fasilitas PPNS Perikanan
	500.5.6.20	Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Pelanggaran
500.5.7	Karantina Ikan	
	500.5.7.1	Pemeriksaan Ikan
	500.5.7.2	Penahanan
	500.5.7.3	Pengasingan
	500.5.7.4	Pengamatan
	500.5.7.5	Pengakuan
	500.5.7.6	Penolakan
	500.5.7.7	Pemusnahan
	500.5.7.8	Persyaratan lalu Lintas Pemasukan
	500.5.7.9	Persyaratan lalu Lintas Pengeluaran
	500.5.7.10	Permohonan Sertifikat
	500.5.7.11	Pemasukan Formulir
	500.5.7.12	Pemasukan Sertifikat
	500.5.7.13	Evaluasi dan Monitoring Sertifikat
	500.5.7.14	Surat Perintah
	500.5.7.15	Rekomendasi

		500.5.7.16	Penutupan Suatu Area
		500.5.7.17	Pelanggaran Lalu Lintas Ikan
		500.5.7.18	Pengawasan Peraturan Perkarantinaaan
		500.5.7.19	Pengawasan Pelaksanaan Operasional
		500.5.7.20	Instalasi Karantina Sementara
		500.5.7.21	Lokasi Karantina
500.6	PERTANIAN		
	500.6.1	Kebijakan di bidang Pertanian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
	500.6.2	Perlindungan hortikultura	
		500.6.2.1	Perlindungan Tanaman Buah
		500.6.2.2	Perlindungan Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat
		500.6.2.3	Perlindungan Tanaman Florikultura
		500.6.2.4	Dampak iklim dan Persyaratan Teknis
	500.6.3	Perbenihan Hortikultura	
		500.6.3.1	Penilaian Varietas
		500.6.3.2	Pengawasan Mutu Benih
		500.6.3.3	Budidaya dan Pascapanen Florikultura
	500.6.4	Perluasan dan Pengelolaan Lahan	
		500.6.4.1	Basis Data Lahan
		500.6.4.2	Pengendalian Lahan
		500.6.4.3	Optimasi, Rehabilitasi dan Konservasi Lahan
		500.6.4.4	Perluasan Kawasan Tanaman Pangan
		500.6.4.5	Perluasan Kawasan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan
	500.6.5	Pengelolaan Air Irigasi	
		500.6.5.1	Pengembangan Sumber Air
		500.6.5.2	Pengembangan Jaringan dan Optimasi Air
		500.6.5.3	Iklim, Konservasi Air dan Lingkungan Hidup
		500.6.5.4	Kelembagaan
	500.6.6	Pembiayaan Pertanian	
		500.6.6.1	Pembiayaan Program
		500.6.6.2	Pembiayaan Syariah dan Kerja Sama
		500.6.6.3	Pembiayaan agribisnis
		500.6.6.4	Kelembagaan dan Pemberdayaan agribisnis
	500.6.7	Pupuk Pestisida	
		500.6.7.1	Pupuk Organik dan Pembenah Tanah
		500.6.7.2	Pupuk Anorganik
		500.6.7.3	Pestisida
		500.6.7.4	Pengawasan Pupuk dan Pestisida
	500.6.8	Alat dan Mesin Pertanian	
		500.6.8.1	Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian
		500.6.8.2	Pengawasan dan Peredaran Alat dan Mesin Pertanian
		500.6.8.3	Kelembagaan dan Pelayanan Alat dan Mesin Pertanian

- 500.6.9 Perbenihan Tanaman Pangan
 - 500.6.9.1 Penilaian Varietas dan Pengawasan Mutu Benih
 - 500.6.9.2 Produksi Benih Serealia
 - 500.6.9.3 Produksi Benih Aneka Kacang dan Umbi
 - 500.6.9.4 Kelembagaan Benih
- 500.6.10 Budidaya Serealia
 - 500.6.10.1 Padi Irigasi dan Rawa
 - 500.6.10.2 Padi Tadah Hujan dan Lahan Kering
 - 500.6.10.3 Jagung
 - 500.6.10.4 Serealia Lain
- 500.6.11 Budidaya Aneka Kacang dan Umbi
 - 500.6.11.1 Kedelai
 - 500.6.11.2 Ubi Kayu
 - 500.6.11.3 Aneka Kacang
 - 500.6.11.4 Aneka Umbi
- 500.6.12 Tanaman Pangan
 - 500.6.12.1 Pengelolaan Data Organisasi Pengganggu Tumbuhan
 - 500.6.12.2 Dampak Perubahan Iklim
 - 500.6.12.3 Teknologi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan
 - 500.6.12.4 Pengelolaan Pengendalian Hama Terpadu
- 500.6.13 Pascapanen Tanaman Pangan
 - 500.6.13.1 Padi
 - 500.6.13.2 Jagung dan Serealia lain
 - 500.6.13.3 Kedelai dan Aneka Kacang
 - 500.6.13.4 Aneka Umbi
- 500.6.14 Pengolahan Hasil Pertanian
 - 500.6.14.1 Tanaman Pangan
 - 500.6.14.2 Hortikultura
 - 500.6.14.3 Perkebunan
 - 500.6.14.4 Peternakan
- 500.6.15 Mutu dan Standarisasi
 - 500.6.15.1 Standardisasi
 - 500.6.15.2 Penerapan dan Pengawasan Jaminan Mutu
 - 500.6.15.3 Akreditasi dan Kelembagaan
 - 500.6.15.4 Kerjasama dan Harmonisasi
- 500.6.16 Pengembangan Usaha dan Investasi
 - 500.6.16.1 Kemitraan dan Kewirausahaan
 - 500.6.16.2 Investasi
 - 500.6.16.3 Promosi Dalam Negeri
 - 500.6.16.4 Promosi Luar Negeri
- 500.6.17 Pemasaran Domestik
 - 500.6.17.1 Informasi Pasar
 - 500.6.17.2 Pemantauan Pasar dan Stabilisasi Harga
 - 500.6.17.3 Sarana dan Kelembagaan Pasar
 - 500.6.17.4 Jaringan Pemasaran
- 500.6.18 Administrasi Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan (antara lain : Rencana Kerja, TOR/ Proposal, Pembentukan Tim Kerja dan Surat menyurat)

500.6.19	Hasil Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan
500.6.19.1	Hasil Penelitian dan Pengembangan
500.6.19.2	Hasil Pengkajian dan Kebijakan dan Strategi
500.6.20	Diseminasi
500.6.21	Publikasi Hasil Penelitian/ Pengkajian
500.6.21.1	Pameran, Temu Lapang, Temu Bisnis, Demlot, Seminar Lokakarya, Temu Karya, Workshop
500.6.21.2	Jurnal, Buletin, Monograf, Prosiding, dan Publikasi lainnya
500.6.22	Bimbingan Teknis Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan
500.6.23	Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan
500.6.24	Data Penelitian dan Pengembangan
500.6.25	Evaluasi Penelitian/ Pengkajian dan Pengembangan
500.6.26	Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)
500.6.26.1	Hak Cipta
500.6.26.2	Hak Paten Sederhana
500.6.26.3	Hak Paten Biasa
500.6.26.4	Hak Merek
500.6.26.5	Pendaftaran Varietas Tanaman
500.6.26.6	Permohonan Hak PVTT Tanaman Semusim dan Tahunan
500.6.26.7	Permohonan HKI yang ditolak
500.6.27	Pelayanan Perizinan Pertanian
500.6.27.1	Sarana I (bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian)
500.6.27.2	Sarana II (bidang benih tanaman, bahan penelitian, teknis pangan segar asal tumbuhan, teknis pengalihan saham perkebunan)
500.6.27.3	Sarana III (bidang bibit, karkas,daging, dan jeroan, pakan ternak, obat hewan, dan teknis sumber daya genetik ternak)
500.6.28	Pelayanan Hukum
500.6.28.1	Sertifikasi
500.6.28.2	Pertimbangan Hukum
500.6.29	Karantina Pertanian
500.6.29.1	Karantina Tumbuhan
500.6.29.2	Karantina Hewan
500.6.30	Bimbingan Teknis
500.6.31	Evaluasi
500.7	PETERNAKAN
500.7.1	Kebijakan di bidang Peternakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
500.7.2	Peternakan dan Kesehatan Hewan
500.7.2.1	Perbibitan Ternak (antara lain: Produksi Bibit Ternak Ruminansia, Produksi Bibit Ternak Non Ruminansia, Penilaian dan Pelepasan Bibit ternak, Pengembangan

		Bibit Ternak, Surat Rekomendasi dan Persetujuan Pemasukan/ Pengeluaran)
	500.7.2.2	Pakan Ternak
	500.7.2.3	Budidaya Ternak
	500.7.2.4	Kesehatan Hewan (antara lain: Pengamatan Penyakit Hewan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan, Perlindungan Hewan, Kelembagaan dan Sumber Daya Kesehatan Hewan, Pengawasan Obat Hewan)
	500.7.2.5	Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen (antara lain: Pascapanen, Higien Sanitasi, Pengawasan <i>Sanitary</i> dan Keamanan Produk Hewan, Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan, Pengujian dan Sertifikasi Produk Hewan, Surat Rekomendasi dan Persetujuan Pemasukan/Pengeluaran)
	500.7.3	Bimbingan Teknis
	500.7.4	Evaluasi
500.8	PERKEBUNAN	
	500.8.1	Kebijakan di bidang Perkebunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	500.8.2	Tanaman Semusim
	500.8.2.1	Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya Tanaman Semusim
	500.8.2.2	Perbenihan Tanaman Semusim
	500.8.2.3	Budidaya Teknologi Budidaya Tanaman Semusim
	500.8.2.4	Pemberdayaan Tanaman Semusim
	500.8.3	Tanaman Rempah dan Penyegar
	500.8.3.1	Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya Tanaman Rempah dan Penyegar
	500.8.3.2	Perbenihan Tanaman Rempah dan Penyegar
	500.8.3.3	Budidaya Tanaman Rempah dan Penyegar
	500.8.3.4	Pemberdayaan dan Kelembagaan Tanaman Rempah dan Penyegar
	500.8.4	Tanaman Tahunan
	500.8.4.1	Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya, Tanaman Tahunan
	500.8.4.2	Perbenihan Tanaman Tahunan
	500.8.4.3	Budidaya Tanaman Tahunan
	500.8.4.4	Pemberdayaan dan Kelembagaan Tanaman Tahunan
	500.8.5	Perlindungan Perkebunan
	500.8.5.1	Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Semusim, Perlindungan Perkebunan
	500.8.5.2	Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Rempah dan Penyegar

	500.8.5.3	Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Tahunan
	500.8.5.4	Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran
500.8.6	Pascapanen dan Pembinaan Usaha	
	500.8.6.1	Pascapanen Tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar
	500.8.6.2	Pascapanen Tanaman Tahunan
	500.8.6.3	Bimbingan Usaha dan Perkebunan Berkelanjutan
	500.8.6.4	Gangguan Usaha dan Penanganan Konflik
500.8.7	Bimbingan Teknis Perkebunan	
500.8.8	Evaluasi Perkebunan	
500.9	PERINDUSTRIAN	
500.9.1	Kebijakan di bidang Perindustrian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
500.9.2	Iklim Usaha dan Kerja Sama	
	500.9.2.1	Industri Manufaktur
	500.9.2.2	Industri Agro
	500.9.2.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
	500.9.2.4	Industri Kecil dan Menengah
500.9.3	Promosi Industri	
	500.9.3.1	Industri Manufaktur
	500.9.3.2	Promosi Industri Agro
	500.9.3.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
	500.9.3.4	Industri Kecil dan Menengah
500.9.4	Standarisasi dan Teknologi	
	500.9.4.1	Industri Manufaktur
	500.9.4.2	Industri Agro
	500.9.4.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
	500.9.4.4	Industri Kecil dan Menengah
500.9.5	Hak atas Kekayaan Intelektual	
	500.9.5.1	Industri Manufaktur
	500.9.5.2	Industri Agro
	500.9.5.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
	500.9.5.4	Industri Kecil dan Menengah
500.9.6	Industri Hijau	
	500.9.6.1	Industri Manufaktur
	500.9.6.2	Industri Agro
	500.9.6.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
	500.9.6.4	Industri Kecil dan Menengah
500.9.7	Analisis Kerja Sama Industri Unggulan Kabupaten/Kota	
500.9.8	Monitoring dan Evaluasi Kompetensi Inti Industri (Provinsi dan Kabupaten/Kota)	
500.9.9	Pengembangan Infrastruktur Pendukung Pengembangan Kawasan Industri	

- 500.9.10 Fasilitas Pengembangan Kawasan Industri
- 500.9.11 Kerja Sama Ketahanan Industri Internasional
- 500.9.12 Standarisasi
 - 500.9.12.1 Standar
 - 500.9.12.2 Penyiapan Penerapan
 - 500.9.12.3 Infrastruktur Standar
- 500.9.13 Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri
 - 500.9.13.1 Kebijakan Industri
 - 500.9.13.2 Perpajakan dan Tarif
 - 500.9.13.3 Pengembangan Model Industrial
- 500.9.14 Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup
 - 500.9.14.1 Industri Hijau
 - 500.9.14.2 Lingkungan Hidup
 - 500.9.14.3 Energi
- 500.9.15 Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual
 - 500.9.15.1 Pengkajian dan Penerapan Kebijakan Teknologi Industri
 - 500.9.15.2 Pengkajian dan Penerapan Inovasi Teknologi Industri
 - 500.9.15.3 Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual
- 500.9.16 Monitoring dan Evaluasi Kompetensi Industri
- 500.10 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 - 500.10.1 Kebijakan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
 - 500.10.2 Rekomendasi Kegeologian
 - 500.10.2.1 Mitigasi Gunung Api, Gempa Bumi, Tsunami, dan Gerakan Tanah
 - 500.10.2.2 Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan
 - 500.10.2.3 Pertambangan
 - 500.10.2.4 Panas Bumi
 - 500.10.2.5 Geosains
 - 500.10.2.6 Pengukuran Time Domain Electromagnetic (TDEM)
 - 500.10.2.7 Kelayakan Lingkungan
 - 500.10.3 Penelitian Kegeologian
 - 500.10.3.1 Administrasi pelaksanaan penelitian
 - 500.10.3.2 Administrasi tenaga penelitian
 - 500.10.3.3 Administrasi penggunaan peralatan penelitian
 - 500.10.3.4 Log-book peralatan survei/peralatan uji/kalibrasi
 - 500.10.3.5 Hasil penelitian dan penyelidikan kegeologian
 - 500.10.3.6 Sumber Daya Geologi
 - 500.10.3.7 Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan
 - 500.10.3.8 Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
 - 500.10.3.9 Survei Geologi
 - 500.10.4 Inventarisasi dan evaluasi kegeologian
 - 500.10.4.1 Sumber Daya Geologi
 - 500.10.4.2 Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi

	500.10.4.3	Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan
	500.10.4.4	Survei Geologi
	500.10.4.5	Konservasi
500.10.5		Administrasi Pelayanan Kegeologian dan Penyajian Data dan Informasi
	500.10.5.1	Peta potensi dan sebaran
	500.10.5.2	Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan
	500.10.5.3	Mitigasi Bencana Gunungapi, Gerakan Tanah, Gempa Bumi dan Tsunami, Semburan Lumpur/Gas serta kebakaran Batubara
	500.10.5.4	Survei Geologi
500.10.6		Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi
	500.10.6.1	Rencana Induk Jaringan Gas Bumi
	500.10.6.2	Rencana dan Realisasi Investasi
	500.10.6.3	Penetapan Harga Minyak Mentah
	500.10.6.4	Penetapan Bagi Hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Minyak dan Gas Bumi
	500.10.6.5	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian PNBP
	500.10.6.6	Verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
	500.10.6.7	Rekomendasi Kemampuan Produksi Barang dan Jasa Dalam Negeri
	500.10.6.8	Rencana Kebutuhan Impor Barang (RKIB) dan Rencana Impor Barang (RIB)
500.10.7		Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
	500.10.7.1	Penyiapan dan Penawaran Wilayah Kerja (WK) Minyak dan Gas Bumi (Konvensional dan Non Konvensional)
	500.10.7.2	Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi (antara lain: Pemanfaatan Data Migas untuk presentasi makalah, publikasi makalah, pembukaan data, Izin Pengiriman Data ke Luar Negeri, Izin Pengiriman Data ke Luar Negeri, Unitisasi Lapangan Minyak dan Gas Bumi, Rekomendasi Pengalihan Interest, Rekomendasi Penyisihan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi, Penyiapan Dokumen Pengakhiran Kontrak, Laporan Data Survei Seismik, Laporan Data Pemboran Sumur Eksplorasi per semester, Laporan Data Pemboran Sumur Eksplorasi Tahunan)
	500.10.7.3	Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi (antara lain: Rekomendasi Penggunaan Data Eksplorasi (publikasi makalah, analisa laboratorium, Reprocessing), Penetapan Pengusahaan Minyak Bumi dari Sumur Tua, Penetapan Pengusahaan Lapangan Produksi yang Dikembalikan Kepada Pemerintah, Buku Cadangan Minyak dan Gas Bumi, Data Cadangan Strategis/Penyangga Minyak dan Gas

		Bumi, Laporan Hasil Pemantauan Data Produksi Minyak dan Gas Bumi, Laporan Hasil Inventarisasi Mutu Minyak dan Gas Bumi)
	500.10.7.4	Pengembangan lapangan Minyak dan Gas Bumi (POD)
	500.10.7.5	Perpanjangan Kontrak KKS
	500.10.7.6	Penetapan Alokasi dan Harga Gas
	500.10.7.7	Partisipasi Interest
	500.10.7.8	Tumpang Tindih Lahan
500.10.8		Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
	500.10.8.1	Perumusan pedoman, prosedur, layanan serta pengawasan Usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga Minyak Bumi dan Gas Bumi, Hasil Olahan dan Bahan Bakar Lain (antara lain: Pedoman dan Prosedur, Layanan Usaha (Izin/ rekomendasi/ penandasahan), Pengawasan)
	500.10.8.2	Fasilitasi dan pertimbangan pelanggaran
	500.10.8.3	Penetapan Harga dan Subsidi Bahan Bakar yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri
500.10.9		Teknik dan Lingkungan
	500.10.9.1	Perumusan pelaksanaan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI)/ Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)
	500.10.9.2	Registrasi Nomor Pelumas Terdaftar (NPT) (antara lain: Berkas permohonan, Berita Acara Hasil Evaluasi, Salinan Sertifikat NPT, Register NPT)
	500.10.9.3	Buku <i>Register Welding Procedure Specification (WPS)/ Procedure Qualification Record (PQR)</i>
	500.10.9.4	Register dan Sertifikat Kualifikasi Juru Las
	500.10.9.5	Keselamatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (antara lain: Pemeriksaan Teknis dan Pengujian Instalasi dan Peralatan, Pemeriksaan Kalibrasi Teknis, Pengawasan Keselamatan Operasi)
	500.10.9.6	Keselamatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (antara lain: Pemeriksaan Teknis dan Pengujian Instalasi dan Peralatan, Pemeriksaan Kalibrasi Teknis, Pengawasan Keselamatan Operasi)
	500.10.9.7	Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan
	500.10.9.8	Dokumen Persetujuan Penunjukkan Kepala/Wakil Kepala Teknik Tambang Hulu dan Hilir (antara lain: Dokumen Permohonan Pengajuan persetujuan penunjukkan Calon kepala/wakil kepala teknik tambang minyak dan gas bumi, Surat Undangan Presentasi, Makalah Presentasi, Surat Persetujuan/ Pengesahan

		penunjukan kepala/wakil Kepala Teknik Tambang Minyak dan Gas Bumi)
	500.10.9.9	Penghargaan Keselamatan Kerja (antara lain: Surat Permohonan Mendapatkan Penghargaan, Surat Penugasan Dalam Rangka Verifikasi, Berkas Hasil Evaluasi Verifikasi, Salinan Tanda Penghargaan, Dokumen Pengajuan dan penilaian Tanda Penghargaan Keselamatan Minyak dan Gas Bumi)
	500.10.9.10	Usaha penunjang
500.10.10	Infrastruktur	Minyak dan Gas Bumi
	500.10.10.1	Perencanaan Program Kerja Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
	500.10.10.2	Pengadaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
	500.10.10.3	Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
	500.10.10.4	Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
500.10.11	Penyiapan Program Energi	Terbarukan dan Konservasi Energi
	500.10.11.1	Usulan Wilayah Kerja Panas Bumi
	500.10.11.2	Usul Program Aneka Energi Pemerintah Daerah dan Lembaga
	500.10.11.3	Penyiapan Program Pemanfaatan Energi
	500.10.11.4	Proyeksi Kebutuhan Energi dari EBT
	500.10.11.5	Perencanaan Pemanfaatan Energi dari EBT
	500.10.11.6	Penyusunan Neraca Energi
	500.10.11.7	Road Map di Bidang EBT
500.10.12	Panas Bumi	
	500.10.12.1	Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT)
	500.10.12.2	Sertifikasi Kelayakan Penggunaan Instalasi (SKPI)
	500.10.12.3	Sertifikasi Kelayakan Penggunaan Peralatan
	500.10.12.4	Rekomendasi Bahan Peledak
	500.10.12.5	Perizinan penggunaan gudang bahan peledak
	500.10.12.6	Izin Tangki Bahan Bakar Cair
	500.10.12.7	Persetujuan sertifikasi <i>Welding Prosedure Specification (WPS)</i> dan <i>Prosedure Qualification Record (PQR)</i> dan kualifikasi Juru Las
	500.10.12.8	Penerbitasn Izin Usaha Panas Bumi (IUP)
	500.10.12.9	Penerbitan Izin Panas Bumi (IPB)
	500.10.12.10	Penerbitan Izin Pemanfaatan Langsung (IPL)
	500.10.12.11	Penetapan kapasitas usaha panas bumi
	500.10.12.12	Penetapan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)

	500.10.12.13	Pengawasan Eksplorasi dan Eksploitasi Panas Bumi
	500.10.12.14	Pelaksanaan Kerja Sama Panas Bumi
	500.10.12.15	Inventarisasi, Verifikasi dan Evaluasi Obvitnas Bidang Panas Bumi
	500.10.12.16	Monitoring Pelaksanaan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) pada Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi
	500.10.12.17	Pembinaan dan Pengawasan Investasi Panas Bumi
500.10.13	Bioenergi	
	500.10.13.1	Penerbitan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (BNN)
	500.10.13.2	Pengadaan Bahan Bakar Nabati (BBN)
	500.10.13.3	Penerbitan Rekomendasi Ekspor - Impor
	500.10.13.4	Penetapan Indeks Harga Pasar BBN (HIP BBN)
	500.10.13.5	Evaluasi/Revisi HIP BBN
	500.10.13.6	Database Pengusahaan Bioenergi
	500.10.13.7	Penetapan Badan Usaha sebagai Pengelola Energi Biomassa atau Biogas untuk Pembangkit Listrik
	500.10.13.8	Penetapan Spesifikasi Bahan Bakar Nabati
	500.10.13.9	Usul Program Bioenergi Pemerintah Daerah dan Lembaga
500.10.14	Aneka Energi	
	500.10.14.1	Penerbitan Izin Usaha Aneka Energi
	500.10.14.2	Penetapan Kapasitas Usaha
	500.10.14.3	Rekomendasi Kompetensi dan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing
	500.10.14.4	Rekomendasi Persetujuan Perubahan Pemegang Saham
	500.10.14.5	Persetujuan Rencana Impor Barang (RIB)
500.10.15	Konservasi Energi	
	500.10.15.1	Audit Energi melalui program kemitraan Konservasi Energi
	500.10.15.2	Monitoring Implementasi hasil audit energi melalui program kemitraan konservasi energi
	500.10.15.3	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan manajemen energi di pengguna energi di atas 6.000 TOE
	500.10.15.4	Pengawasan sertifikasi label dan tanda hemat energi pada lampu swabalast
	500.10.15.5	Penyusunan daftar peralatan/teknologi efisiensi
	500.10.15.6	Penyusunan emisi energi gas rumah kaca
	500.10.15.7	Pemberian insentif dan disinsentif konservasi energi
	500.10.15.8	Profil investasi efisiensi energi
	500.10.15.9	<i>Investment Grade Audit (IGA)</i>
	500.10.15.10	Bimbingan Teknis Bidang EBTKE

- 500.10.16 Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur EBTKE
 - 500.10.16.1 Usul Pembangunan Infrastruktur Pemerintah Daerah dan Lembaga
 - 500.10.16.2 Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
 - 500.10.16.3 Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Bidang EBTKE
 - 500.10.16.4 Evaluasi Program Kerja
- 500.10.17 Bina Program Tenaga Listrik
 - 500.10.17.1 Investasi dan pendanaan tenaga listrik (antara lain: Dokumen grant/hibah/*loan agreement* luar negeri, Monitoring *loan* pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik, Laporan penanganan permasalahan infrastruktur penyediaan tenaga listrik, Laporan kegiatan investasi dan pendanaan tenaga listrik)
 - 500.10.17.2 Pengembangan listrik pedesaan (antara lain: Data program listrik perdesaan, Data rasio elektrifikasi (RE) dan Rasio Desa Berlistrik (RD), Monitoring dan evaluasi listrik perdesaan, Listrik untuk masyarakat tidak mampu)
 - 500.10.17.3 Data dan Informasi Ketenagalistrikan
- 500.10.18 Bina Usaha Ketenagalistrikan
 - 500.10.18.1 Penyiapan Usaha Ketenagalistrikan (antara lain: Pelayanan izin usaha penyediaan tenaga listrik (IO, IUPL-S, dan IUPL), Bimbingan Usaha Ketenagalistrikan, Data laporan berkala pemegang Izin)
 - 500.10.18.2 Harga dan Subsidi Listrik
 - 500.10.18.3 Hubungan komersial tenaga listrik
 - 500.10.18.4 Perlindungan konsumen listrik (antara lain: Penanganan pengaduan konsumen listrik, Dokumen Pengawasan tingkat mutu pelayanan tenaga listrik, Dokumen Evaluasi realisasi tingkat mutu pelayanan tenaga listrik, Dokumen evaluasi pemberian kompensasi pinalti tingkat mutu pelayanan PT PLN (Persero))
- 500.10.19 Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan
 - 500.10.19.1 Kelaikan teknik dan keselamatan ketenagalistrikan
 - 500.10.19.2 Penyiapan kompetensi dan pengawasan tenaga teknik ketenagalistrikan
 - 500.10.19.3 Usaha penunjang ketenagalistrikan (antara lain: Dokumen Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL), Dokumen Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Telematika (IPJ Telematika), Dokumen Penandasahan Rencana Impor Barang (RIB))

	500.10.19.4	Perlindungan lingkungan ketenagalistrikan (antara lain: Dokumen forum keselamatan instalasi pemanfaatan tenaga listrik, Dokumen pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup sektor ketenagalistrikan, Laporan pembinaan dan pengawasan lingkungan, Dokumen perhitungan faktor emisi <i>Clean Development Mechansim (CDM)</i>)
500.10.20	Sertifikasi	
	500.10.20.1	Dokumen Sertifikasi Produk peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik
	500.10.20.2	Dokumen Penunjukan Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK)
	500.10.20.3	Dokumen Penerbitan Sertifikasi Laik Operasi (SLO) Instalasi Tenaga Listrik
	500.10.20.4	Dokumen Pembinaan dan pengawasan sertifikat laik operasi (SLO) instalasi tenaga listrik
	500.10.20.5	Registrasi Sertifikasi
500.10.21	Akreditasi Ketenagalistrikan	
500.10.22	Standarisasi Kompetensi	
500.10.23	Standardisasi Nasional Indonesia (SNI) Bidang Ketenagalistrikan	
	500.10.23.1	Perumusan rancangan SNI bidang ketenagalistrikan
	500.10.23.2	Forum konsensus rancangan SNI bidang ketenagalistrikan
	500.10.23.3	Program pemberlakuan SNI wajib bidang ketenagalistrikan
	500.10.23.4	Dokumen pengawasan penerapan SNI wajib bidang ketenagalistrikan
500.10.24	Standardisasi Usaha Penunjang Ketenagalistrikan	
	500.10.24.1	Klasifikasi usaha penunjang ketenagalistrikan
	500.10.24.2	Kualifikasi usaha penunjang ketenagalistrikan
	500.10.24.3	Dokumen penunjukan LIT (Lembaga Inspeksi Teknis)
	500.10.24.4	Laporan berkala pemegang penunjukan LIT
	500.10.24.5	Laporan hasil pengawasan penunjukan
500.10.25	Bina Program Mineral dan Batubara	
	500.10.25.1	Penyiapan dan Perencanaan Program Mineral dan Batubara
	500.10.25.2	Rencana Induk Mineral dan Batubara
	500.10.25.3	Pengembangan Investasi dan Kerja Sama Bidang Mineral dan Batubara
	500.10.25.4	Data dan Informasi Mineral dan Batubara
	500.10.25.5	Pelaporan Program Mineral dan Batubara
	500.10.25.6	Perencanaan, Penyiapan dan Penawaran Wilayah Kerja (WK) Mineral dan Batubara melalui lelang reguler
	500.10.25.7	Data dan Informasi Wilayah Mineral dan Batubara

	500.10.25.8	Perencanaan Produksi Mineral dan Batubara
	500.10.25.9	Pengembangan dan Pemanfaatan Mineral dan Batubara
500.10.26	Pembinaan Pengusahaan Mineral	
	500.10.26.1	Ketenagakerjaan
	500.10.26.2	Pemberdayaan masyarakat sekitar tambang
	500.10.26.3	Penyelesaian perselisihan usaha pertambangan mineral
	500.10.26.4	Rekomendasi kegiatan usaha pertambangan mineral
	500.10.26.5	Laporan/data kegiatan eksplorasi mineral
	500.10.26.6	Pengawasan produksi dan pemasaran mineral (logam, bukan logam batuan, radioaktif, dan mineral jarang)
	500.10.26.7	Perizinan usaha pertambangan mineral
	500.10.26.8	Kontrak Karya (KK)
	500.10.26.9	Pengelolaan barang Kontrak Karya (KK)
	500.10.26.10	Persetujuan Objek Vital Nasional (OBVITNAS)
	500.10.26.11	Persetujuan perubahan saham direksi, komisaris, pada perusahaan mineral
	500.10.26.12	Teguran kepada pengusahaan Kontrak Karya (KK)
	500.10.26.13	Tanggapan kepada pemerintah daerah terkait usaha pertambangan mineral
	500.10.26.14	Pedoman/petunjuk teknis pertambangan mineral termasuk rancangan awal sampul dengan rancangan akhir
	500.10.26.15	Pelaporan usaha pertambangan mineral
	500.10.26.16	Penghargaan usaha pertambangan mineral
	500.10.26.17	Penerbitan sertifikat <i>clear and clean (CnC)</i> Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral
500.10.27	Pembinaan Pengusahaan Batubara	
	500.10.27.1	Ketenagakerjaan
	500.10.27.2	Pemberdayaan masyarakat sekitar tambang
	500.10.27.3	Penyelesaian perselisihan usaha pertambangan batubara
	500.10.27.4	Rekomendasi kegiatan usaha pertambangan batubara
	500.10.27.5	Laporan/data kegiatan eksplorasi batubara
	500.10.27.6	Pengawasan produksi dan pemasaran batubara (bitumen padat, batuan aspal, batubara dan gambut) antara lain: Laporan Produksi dan Penjualan Batubara PKP2B, IUP hingga Laporan Kontrak Penjualan Pertambangan Batubara
	500.10.27.7	Perizinan Usaha Pertambangan Batubara
	500.10.27.8	Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B)

500.10.27.9	Pengelolaan Barang Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B) antara lain: Persetujuan Pengadaan Barang Modal (Masterlist) PKP2B hingga Data Asset Perusahaan Batubara
500.10.27.10	Persetujuan Obyek Vital Nasional (OBVITNAS)
500.10.27.11	Persetujuan perubahan saham direksi, komisaris, pada perusahaan Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B)
500.10.27.12	Teguran kepada pengusaha Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B)
500.10.27.13	Tanggapan kepada pemerintah daerah terkait usaha pertambangan batubara
500.10.27.14	Pedoman/petunjuk teknis pertambangan mineral termasuk rancangan awal sampul dengan rancangan akhir
500.10.27.15	Pelaporan usaha pertambangan batubara
500.10.27.16	Penghargaan usaha pertambangan batubara
500.10.27.17	Penerbitan sertifikat <i>clear and clean (CnC)</i> Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batubara
500.10.28	Penerimaan Negara
500.10.28.1	Penerimaan Negara Bukan Pajak
500.10.28.2	Penetapan Bagi Hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
500.10.28.3	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian PNBP
500.10.29	Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara
500.10.29.1	Perumusan RSNI (Rancangan Standar Nasional Indonesia)/ RSKKNI (Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) antara lain: Draft Rancangan, Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI), dan Standar Nasional Indonesia (SNI)
500.10.29.2	Pengawasan Standardisasi
500.10.29.3	Persetujuan Penunjukkan Kepala/Wakil Kepala Teknik Tambang
500.10.29.4	Pengawasan Keselamatan Kegiatan dan Keselamatan Pekerja (antara lain: Laporan Kecelakaan Tambang/Statistik hingga Laporan Hasil Pemeriksaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
500.10.29.5	Pemeriksaan teknis dan pengujian instalasi dan peralatan tambang (antara lain: Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi dan Peralatan Tambang hingga Berita Acara Hasil Inspeksi)
500.10.29.6	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
500.10.29.7	Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)
500.10.29.8	Rekomendasi bahan kimia

- 500.10.29.9 Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (antara lain: Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL)/Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) hingga Surat Penetapan Jaminan Pasca Tambang)
- 500.10.29.10 Laporan berkala teknik dan lingkungan pertambangan/ laporan tahunan pelaksanaan reklamasi (antara lain: Laporan Bulanan Terjadinya Pencemaran (LPL-5) hingga Laporan Tahunan Pelaksanaan Reklamasi)
- 500.10.29.11 Pemberian Penghargaan (antara lain: Pemberian Penghargaan Lingkungan Pertambangan, Pemberian Penghargaan Keselamatan Kerja, Dokumen Pengajuan dan Penilaian Tanda Penghargaan lingkungan Pertambangan, Dokumen Pengajuan dan Penilaian Tanda Penghargaan Keselamatan)
- 500.10.29.12 Pengawasan lingkungan pertambangan
- 500.10.29.13 Usaha Jasa Mineral dan Batubara
- 500.10.29.14 Pembinaan dan pengawasan usaha jasa mineral dan batubara
- 500.10.29.15 Rekomendasi Teknis (antara lain: Pengajuan Rekomendasi Teknis, Hasil Evaluasi Dokumen Pengajuan Rekomendasi Teknis, Surat Rekomendasi Teknis)
- 500.10.29.16 Persetujuan Teknis (antara lain: Pengajuan Persetujuan Teknis, Hasil Evaluasi Dokumen Pengajuan Persetujuan Teknis, Surat Persetujuan Teknis)
- 500.10.29.17 Pengawasan Teknis
- 500.10.29.18 Pengawasan Konservasi Mineral dan Batubara
- 500.10.29.19 Pembinaan Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara (antara lain: Sosialisasi Standardisasi, Bimbingan Teknis Lingkungan Pertambangan, Bimbingan Teknis/Sosialisasi Pertambangan)
- 500.10.30 Program Penelitian dan Pengembangan
 - 500.10.30.1 Rencana Penelitian dan Pengembangan
 - 500.10.30.2 Pengembangan dan inovasi
 - 500.10.30.3 Dokumen penerapan/ pemanfaatan/ pendayagunaan replikasi/prototipe hasil penelitian/ pengkajian/ pengembangan/ inovasi.
 - 500.10.30.4 Advokasi dan fasilitasi penelitian, pengembangan dan inovasi
 - 500.10.30.5 Diseminasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi

	500.10.30.6	Pembinaan penelitian/Pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
	500.10.30.7	Jaringan Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
	500.10.30.8	Data dan informasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
	500.10.30.9	<i>Master proceeding/</i> jurnal penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
	500.10.30.10	Hak atas kekayaan intelektual (HaKI)
	500.10.30.11	Forum komunikasi penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
	500.10.30.12	Layanan jasa penelitian, pengembangan, penerapan IPTEK
	500.10.30.13	Sertifikasi personil peneliti bidang Sumber Daya Mineral
500.10.31	Sarana Litbang	
	500.10.31.1	Administrasi penggunaan peralatan
	500.10.31.2	<i>Log-book</i> Peralatan Survei/Peralatan Uji Kalibrasi
500.10.32	Afiliasi	
	500.10.32.1	Proyek Percontohan
	500.10.32.2	Promosi dan Layanan Jasa Teknologi
	500.10.32.3	Pembinaan Penelitian dan Pengembangan
	500.10.32.4	Penyajian Informasi
500.10.33	Penelitian dan Pengembangan Kegeologian	
	500.10.33.1	Pemetaan dan penelitian geologi, geokimia, dan geofisika kelautan
	500.10.33.2	Energi Kelautan dan Kewilayahan Penelitian Energi dan kewilayahan pantai
	500.10.33.3	Penelitian sumber daya energi dan mineral kelautan
	500.10.33.4	Penelitian Sumber Daya Mineral Kelautan
500.10.34	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi	
	500.10.34.1	Teknologi Eksplorasi
	500.10.34.2	Teknologi Eksploitasi
	500.10.34.3	Laboratorium
	500.10.34.4	Study
	500.10.34.5	Teknologi Proses
	500.10.34.6	Teknologi Aplikasi Produk
	500.10.34.7	Teknologi Gas
500.10.35	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral Batubara	
	500.10.35.1	Teknologi Eksploitasi Tambang dan Pengolahan Sumber Daya
	500.10.35.2	Teknologi Pengolahan dan Pemanfaatan mineral
	500.10.35.3	Teknologi Pemanfaatan Batubara

- 500.10.36 Penelitian dan Pengembangan Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan
 - 500.10.36.1 Energi baru terbarukan
 - 500.10.36.2 Teknologi Ketenagalistrikan
 - 500.10.36.3 Lingkungan dan Konservasi Energi
 - 500.10.36.4 Penelitian dan Pengembangan Teknologi PLTSa (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah) dan Konservasi Energi
- 500.11 PERHUBUNGAN
 - 500.11.1 Kebijakan di bidang Perhubungan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
 - 500.11.2 Jaringan Prasarana dan Pelayanan
 - 500.11.2.1 Penentuan lokasi terminal barang tipe pengumpul dan tipe penunjang
 - 500.11.2.2 Penentuan lokasi terminal penumpang tipe A, tipe B, dan tipe C
 - 500.11.2.3 Penetapan lokasi terminal barang utama
 - 500.11.2.4 Standar pelayanan minimal pengoperasian terminal
 - 500.11.2.5 Jaringan trayek angkutan antar kota/provinsi
 - 500.11.2.6 Jaringan lintas pada jaringan jalan primer
 - 500.11.2.7 Penetapan kelas jalan primer
 - 500.11.2.8 Kualifikasi teknis petugas terminal
 - 500.11.2.9 Jaringan transportasi jalan sekunder
 - 500.11.3 Pengembangan Transportasi Jalan
 - 500.11.3.1 Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan
 - 500.11.3.2 Pengembangan transportasi jalan
 - 500.11.4 Pengujian Kendaraan Bermotor
 - 500.11.4.1 Pengesahan hasil uji tipe kendaraan bermotor
 - 500.11.4.2 Sertifikasi uji tipe kendaraan bermotor
 - 500.11.4.3 Sertifikasi tenaga penguji kendaraan bermotor
 - 500.11.4.4 Akreditasi unit pengujian kendaraan bermotor
 - 500.11.5 Teknologi Kendaraan Bermotor
 - 500.11.5.1 Sertifikasi rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor
 - 500.11.5.2 Pelaksanaan kalibrasi peralatan uji kendaraan bermotor
 - 500.11.5.3 Persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor
 - 500.11.5.4 Harmonisasi dan standardisasi regulasi kendaraan bermotor
 - 500.11.6 Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
 - 500.11.6.1 Analisa dampak lalu lintas jalan nasional di luar kawasan perkotaan
 - 500.11.6.2 Manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional

- 500.11.7 Perlengkapan Jalan
 - 500.11.7.1 Pedoman teknis perlengkapan jalan
 - 500.11.7.2 Penimbangan kendaraan bermotor di jalan
 - 500.11.7.3 Akreditasi unit penimbangan kendaraan bermotor
 - 500.11.7.4 Kualifikasi teknis petugas penimbangan kendaraan bermotor
 - 500.11.7.5 Pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan di jalan nasional
- 500.11.8 Angkutan Penumpang
 - 500.11.8.1 Tarif angkutan penumpang kelas ekonomi
 - 500.11.8.2 Izin trayek angkutan penumpang untuk trayek lintas batas negara
 - 500.11.8.3 Izin trayek antar kota antar provinsi
 - 500.11.8.4 Izin operasi angkutan pariwisata dan angkutan penumpang tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya bersifat lintas batas negara dan antar kota/provinsi
 - 500.11.8.5 Penilaian kinerja perusahaan angkutan umum
 - 500.11.8.6 Pemberian subsidi angkutan umum
 - 500.11.8.7 Angkutan perintis
 - 500.11.8.8 Penghargaan perusahaan angkutan umum
- 500.11.9 Angkutan Barang
 - 500.11.9.1 Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan
 - 500.11.9.2 Tarif angkutan barang
 - 500.11.9.3 Izin operasi angkutan barang tertentu
 - 500.11.9.4 Pembinaan angkutan barang
 - 500.11.9.5 Izin dispensasi angkutan jalan
- 500.11.10 Monitoring Operasional
 - 500.11.10.1 Pengendalian operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 - 500.11.10.2 Pengawasan, penertiban dan pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran operasional kendaraan angkutan umum yang menjadi kewenangan
 - 500.11.10.3 Berkas Pelanggaran Perda
- 500.11.11 Bimbingan Teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil
 - 500.11.11.1 Pedoman Teknis
 - 500.11.11.2 Penyidikan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
 - 500.11.11.3 Bimtek PPNS
 - 500.11.11.4 Pengusulan pengangkatan dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
- 500.11.12 Analisa dan Evaluasi Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan
 - 500.11.12.1 Pendataan jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan

	500.11.12.2	Analisis serta informasi jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan
500.11.13		Pengembangan Jaringan Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan
	500.11.13.1	Pengembangan dan penetapan jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan (peta jaringan, <i>blueprint</i> jaringan)
	500.11.13.2	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan
500.11.14		Rancang Bangun Sarana Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan
500.11.15		Bimbingan Perawatan Sarana Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan
	500.11.15.1	Perawatan dan pemeliharaan sarana sungai, danau dan penyeberangan
	500.11.15.2	Pengawasan dan registrasi sarana angkutan sungai dan danau dan penyeberangan
500.11.16		Rancang Bangun Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan
	500.11.16.1	Perencanaan dan pembangunan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan
	500.11.16.2	Pemberian sertifikasi pelabuhan penyeberangan
	500.11.16.3	Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan penyeberangan di lintas nasional dan internasional
	500.11.16.4	Penyelenggaraan, pemeliharaan, perawatan dan perbaikan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan
500.11.17		Kualifikasi teknis petugas pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan
500.11.18		Manajemen Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan
	500.11.18.1	Manajemen lalu lintas
	500.11.18.2	Tata cara berlalu lintas di sungai, danau dan penyeberangan
	500.11.18.3	Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang lalu lintas dan angkutan sungai dan danau
	500.11.18.4	Sertifikasi inspektur sungai dan danau dan pejabat pemberangkatan angkutan sungai dan danau
500.11.19		Alur dan Perambuan Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan
	500.11.19.1	Pengerukan alur pelayaran sungai, danau dan kolam pelabuhan penyeberangan
	500.11.19.2	Penetapan kelas alur dan peta alur pelayaran sungai dan danau
	500.11.19.3	Perambuan sungai, danau dan penyeberangan

- 500.11.20 Bimbingan Usaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan
 - 500.11.20.1 Penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyeberangan
 - 500.11.20.2 Persetujuan operasi kapal penyeberangan di lintas nasional dan internasional
- 500.11.21 Tarif dan Keperintisan
 - 500.11.21.1 Perhitungan tarif, pemantauan tarif angkutan dan jasa pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan
 - 500.11.21.2 Kriteria dan pelaksanaan pelayanan keperintisan
- 500.11.22 Bina Sistem Transportasi Perkotaan
 - 500.11.22.1 Jaringan Transportasi Perkotaan
 - 500.11.22.2 Transportasi perkotaan yang berbasis jalan, jalan rel dan perairan daratan
 - 500.11.22.3 Transportasi perkotaan untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi provinsi
- 500.11.23 Lalu Lintas Perkotaan
 - 500.11.23.1 Manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan
 - 500.11.23.2 Manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan di jalan nasional dalam kawasan perkotaan
 - 500.11.23.3 Penanganan lalu lintas perkotaan berbasis teknologi di wilayah
- 500.11.24 Angkutan Perkotaan
 - 500.11.24.1 Penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek
 - 500.11.24.2 Jaringan trayek perkotaan
 - 500.11.24.3 Penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi provinsi
- 500.11.25 Pengaduan Moda Transportasi Perkotaan
 - 500.11.25.1 Penyelenggaraan angkutan perkotaan tidak dalam trayek untuk angkutan penumpang dan/atau barang
 - 500.11.25.2 Pengaduan moda transportasi perkotaan yang menghubungkan antar simpul (bandara, pelabuhan, stasiun, dan terminal) di kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi provinsi
 - 500.11.25.3 Penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi provinsi
- 500.11.26 Dampak Transportasi Perkotaan
 - 500.11.26.1 Penyelenggaraan transportasi perkotaan berwawasan lingkungan

	500.11.26.2	Penanganan dampak transportasi di kawasan perkotaan
	500.11.26.3	Masterplan pengembangan teknologi transportasi ramah lingkungan
	500.11.26.4	Pelaksanaan analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan kota
	500.11.26.5	Rekomendasi hasil analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan
	500.11.26.6	Masterplan transportasi perkotaan
500.11.27	Monitoring dan Evaluasi Manajemen Keselamatan	
	500.11.27.1	Monitoring dan evaluasi data kecelakaan
	500.11.27.2	Kualifikasi unit pengkajian
	500.11.27.3	Pengembangan sistem informasi manajemen keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan
500.11.28	Pengembangan Keselamatan	
	500.11.28.1	Program keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan
	500.11.28.2	Harmonisasi kebijakan
500.11.29	Promosi dan Kemitraan Keselamatan	
	500.11.29.1	Promosi Keselamatan : penyuluhan, publikasi dan destinasi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan
	500.11.29.2	Kemitraan keselamatan antar lembaga dan masyarakat di bidang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan
500.11.30	Bina Keselamatan Angkutan Umum	
	500.11.30.1	Keselamatan Pengusahaan Angkutan Umum
	500.11.30.2	Keselamatan Awak Angkutan Umum dan awak kapal sungai dan danau
500.11.31	Audit Keselamatan	
	500.11.31.1	Pedoman audit keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia
	500.11.31.2	Identifikasi daerah rawan kecelakaan jalan dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan
	500.11.31.3	Audit faktor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan serta laik fungsi jalan
500.11.32	Inspeksi Keselamatan	
	500.11.32.1	Pedoman keselamatan
	500.11.32.2	Inspeksi keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia, dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan
	500.11.32.3	Investigasi kecelakaan sungai, danau dan penyeberangan serta laik fungsi jalan

500.11.33	Parkir	
500.11.33.1	Surat Tugas Juru Parkir	
500.11.33.2	Izin tempat khusus parkir swasta	
500.11.33.3	Surat Tugas TKP Pemerintah	
500.12	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
500.12.1	Kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
500.12.2	Telekomunikasi	
500.12.2.1	Layanan Jaringan Telekomunikasi	
500.12.2.2	Layanan Jasa Telekomunikasi	
500.12.2.3	Penomoran Telekomunikasi dan Informatika	
500.12.2.4	Kelayakan Sistem Telekomunikasi	
500.12.3	Penyiaran	
500.12.3.1	Pemetaan Penyelenggaraan Radio dan Televisi	
500.12.3.2	Database Penyelenggaraan Radio dan Televisi	
500.12.4	Telekomunikasi Khusus, Penyiaran Publik dan Kewajiban Universal	
500.12.4.1	Telekomunikasi Khusus Pemerintah Daerah	
500.12.4.2	Telekomunikasi Khusus Non Pemerintah Daerah	
500.12.4.3	Layanan Khusus Penyiaran	
500.12.4.4	Pelayanan Kewajiban Universal	
500.12.4.5	Pengembangan Infrastruktur	
500.12.5	Pengendalian Informatika	
500.12.5.1	Monitoring dan Evaluasi Jaringan Telekomunikasi	
500.12.5.2	Monitoring dan Evaluasi Jasa Telekomunikasi	
500.12.5.3	Monitoring dan Evaluasi Penyiaran	
500.12.5.4	Pencegahan dan Penertiban	
500.12.6	<i>e- Government</i>	
500.12.6.1	Tata Kelola <i>e-Government</i>	
500.12.6.2	Teknologi dan Infrastruktur <i>e-Government</i>	
500.12.6.3	Interoperabilitas dan Interkonektivitas <i>e-Government</i>	
500.12.6.4	Aplikasi Layanan Kepemerintahan	
500.12.6.5	Aplikasi Layanan Publik	
500.12.7	<i>e- Business</i>	
500.12.7.1	Tata Kelola <i>e-Business</i>	
500.12.7.2	Teknologi dan Infrastruktur <i>e-Business</i>	
500.12.7.3	Interoperabilitas dan Interkonektivitas <i>e-Business</i>	
500.12.7.4	Aplikasi Layanan <i>e-Business</i>	
500.12.8	Pemberdayaan Informatika Masyarakat	
500.12.8.1	Pemberdayaan Informatika Masyarakat Perkotaan	
500.12.8.2	Pemberdayaan Informatika Masyarakat Pedesaan	

- 500.12.9 Pemberdayaan Industri Informatika
 - 500.12.9.1 Industri Infrastruktur dan Layanan Aplikasi Informatika
 - 500.12.9.2 Industri Perangkat Informatika Pengguna
 - 500.12.9.3 Industri Perangkat Lunak
 - 500.12.9.4 Industri Konten Multimedia
- 500.12.10 Keamanan Informasi
 - 500.12.10.1 Tata Kelola Keamanan Informasi
 - 500.12.10.2 Teknologi Keamanan Informasi
 - 500.12.10.3 Monitoring, Evaluasi dan Tanggap Darurat Keamanan Informasi
 - 500.12.10.4 Penyidikan dan Penindakan
 - 500.12.10.5 Budaya Keamanan Informasi
- 500.12.11 Komunikasi Publik
 - 500.12.11.1 Tata Kelola Komunikasi Publik
 - 500.12.11.2 Pengelolaan Opini Publik
 - 500.12.11.3 Layanan Komunikasi Publik
- 500.12.12 Pengolahan dan Penyediaan Informasi
 - 500.12.12.1 Informasi Politik, Hukum, dan Keamanan
 - 500.12.12.2 Informasi Perekonomian
 - 500.12.12.3 Informasi Kesejahteraan Rakyat
- 500.12.13 Pengelolaan Media Publik
 - 500.12.13.1 Media Cetak
 - 500.12.13.2 Media *Online*
 - 500.12.13.3 Media Luar Ruang dan Audio Visual
- 500.12.14 Kemitraan Komunikasi
 - 500.12.14.1 Kemitraan Pemerintah dan Lembaga Negara
 - 500.12.14.2 Kemitraan Media dan Dunia Usaha
 - 500.12.14.3 Kemitraan Organisasi Kemasyarakatan dan Profesi
- 500.12.15 Infrastruktur Informatika
 - 500.12.15.1 Jaringan
 - 500.12.15.2 Piranti Teknologi Informatika
 - 500.12.15.3 Keamanan Informatika
- 500.12.16 Sistem dan Data
 - 500.12.16.1 Portal dan Konten
 - 500.12.16.2 Pengumpulan dan Pengolahan Data
 - 500.12.16.3 Pengembangan Aplikasi
- 500.12.17 Pusat Kerjasama
 - 500.12.17.1 Kerja Sama daerah
 - 500.12.17.2 Kerja Sama Bilateral
- 500.12.18 Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat
 - 500.12.18.1 Pelayanan Informasi
 - 500.12.18.2 Hubungan Masyarakat
 - 500.12.18.3 Bimbingan Teknis
- 500.12.19 Evaluasi
- 500.13 PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
 - 500.13.1 Kebijakan di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

500.13.2	Pengembangan Destinasi Wisata
500.13.2.1	Perancangan Destinasi dan Investasi Pariwisata
500.13.2.2	Pengembangan Daya Tarik Wisata
500.13.2.3	Industri Pariwisata
500.13.2.4	Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata
500.13.2.5	Pengembangan Wisata Minat Khusus, Konvensi, Insentif, dan Event
500.13.3	Pemasaran Pariwisata
500.13.3.1	Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata
500.13.3.2	Promosi Pariwisata Luar Negeri
500.13.3.3	Promosi Pariwisata Dalam Negeri
500.13.3.4	Pencitraan Indonesia
500.13.4	Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya
500.13.4.1	Pengembangan industri Perfilman
500.13.4.2	Pengembangan Seni Pertunjukan dan Industri Musik
500.13.4.3	Pengembangan Seni Rupa
500.13.5	Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, dan IPTEK
500.13.5.1	Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media
500.13.5.2	Desain dan Arsitektur
500.13.5.3	Kerja sama dan Fasilitasi
500.13.6	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
500.13.6.1	Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisata
500.13.6.2	Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Ekonomi Kreatif
500.13.6.3	Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif
500.13.6.4	Kompetensi Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif
500.14	STATISTIK
500.14.1	Kebijakan di bidang Statistik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
500.14.2	Sensus Penduduk, Pertanian, dan Ekonomi
500.14.2.1	Perencanaan
500.14.2.2	Persiapan (antara lain: Penyusunan rancangan organisasi kegiatan sensus, Penyusunan Kuesioner, Penyusunan konsep dan definisi, Penyusunan metodologi (cakupan, organisasi, lapangan, ukuran statistik, prosedur), Penyusunan buku pedoman (pencacahan, pengawasan, pengolahan), Penyusunan peta wilayah kerja dan muatan peta wilayah, Penyusunan pedoman sosialisasi, Sosialisasi kegiatan kepada stakeholder dan sumber data (leaflet, poster, pertemuan), Pelaksanaan

			pertemuan koordinasi (intern dan ekstern), Pelaksanaan pelatihan instruktur (TOT), Pelaksanaan pelatihan petugas, Penyusunan program pengolahan (rule validasi, pemeriksaan data entri, tabulasi), Pelatihan petugas pengolahan, Perancangan tabel, Pelaksanaan Ujicoba
	500.14.2.3		Pelaksanaan Lapangan
	500.14.2.4		Pengolahan (antara lain: Pengelolaan dokumen (penerimaan/pengiriman, pengelompokan/ <i>Batching</i>), Pemeriksaan dokumen dan pengkodean (<i>Editing/Coding</i>), Perekaman data (entri, <i>scanner</i>), Tabulasi Data, Pemeriksaan tabulasi, Laporan konsistensi tabulasi)
	500.14.2.5		Analisis dan Penyajian Hasil Sensus
	500.14.2.6		Diseminasi hasil sensus
500.14.3	Survei		
	500.14.3.1		Perencanaan
	500.14.3.2		Persiapan
	500.14.3.3		Pelaksanaan Lapangan (antara lain: Pelaksanaan listing, Pemilihan sampel, Pengumpulan data, Pemeriksaan, Pengawasan Lapangan, Monitoring kualitas)
	500.14.3.4		Pengolahan (antara lain: Pengelolaan dokumen (penerimaan/ pengiriman, pengelompokan/ <i>Batching</i>), Pemeriksaan dokumen dan pengkodean (<i>Editing/Coding</i>), Perekaman data (entri, <i>scanner</i>), Tabulasi Data, Pemeriksaan tabulasi, Laporan konsistensi tabulasi)
	500.14.3.5		Analisis dan Penyajian Hasil Survei (antara lain: Pembahasan angka hasil pengolahan, Penyusunan angka sementara, Penyusunan angka tetap, Penyusunan/pembahasan draft publikasi, Analisis data, Penyusunan publikasi)
	500.14.3.6		Diseminasi hasil Survei
500.14.4	Konsolidasi Data Statistik		
	500.14.4.1		Kompilasi Data
	500.14.4.2		Analisis data
	500.14.4.3		Penyusunan Publikasi
500.14.5	Evaluasi dan Pelaporan Sensus, Survei, dan Konsolidasi Data Statistik		
500.15	KETENAGAKERJAAN		
	500.15.1		Kebijakan di bidang Ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	500.15.2		Perencanaan Tenaga Kerja
	500.15.2.1		Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Pemerintah

	500.15.2.2	Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Swasta
500.15.3	Pengembangan	Standardisasi Kompetensi
	500.15.3.1	Penerapan Standar Kompetensi
	500.15.3.2	Pengembangan Standardisasi Kompetensi
	500.15.3.3	Pengembangan Program Pelatihan Ketenagakerjaan
	500.15.3.4	Pengembangan Program Pelatihan Produktivitas dan Kewirausahaan
	500.15.3.5	Pengembangan Program Pelatihan Ketransmigrasian
500.15.4	Bina Lembaga dan Sarana	Pelatihan Kerja
	500.15.4.1	Akreditasi dan Sistem Informasi Kelembagaan
	500.15.4.2	Pengembangan Sarana dan Fasilitas Lembaga Pelatihan
	500.15.4.3	Pengembangan Standar Mutu Lembaga Pelatihan
	500.15.4.4	Sistem Pendanaan dan Kerjasama Antar Lembaga
500.15.5	Bina Instruktur dan Tenaga	Pelatihan
	500.15.5.1	Instruktur dan PSM Lembaga Pelatihan Pemerintah
	500.15.5.2	Instruktur Lembaga Pelatihan Swasta
	500.15.5.3	Tenaga Pelatihan
	500.15.5.4	Sistem Informasi Instruktur, Pengembangan Standar Mutu, dan Tenaga Pelatihan
500.15.6	Bina Pemagangan	
	500.15.6.1	Pemagangan Dalam Negeri
	500.15.6.2	Pemagangan Luar Negeri
	500.15.6.3	Perizinan dan Advokasi Pemagangan
	500.15.6.4	Promosi dan Jenjang Pemagangan
500.15.7	Produktivitas dan Kewirausahaan	
	500.15.7.1	Pengembangan Promosi dan Kerjasama Produktivitas dan Kewirausahaan
	500.15.7.2	Pengembangan Sistem dan Peningkatan Produktivitas
	500.15.7.3	Pengembangan Pengukuran dan Kajian Produktivitas
	500.15.7.4	Pengembangan Kewirausahaan
500.15.8	Pengembangan Pasar Kerja	
	500.15.8.1	Informasi Pasar Kerja
	500.15.8.2	Analisis Pasar Kerja
	500.15.8.3	Bursa Kerja
	500.15.8.4	Analisis Jabatan
500.15.9	Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	
	500.15.9.1	Antar Kerja
	500.15.9.2	Penempatan Tenaga Kerja Khusus
	500.15.9.3	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan
	500.15.9.4	Pemberdayaan Pengantar Kerja

500.15.10	Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Tenaga Kerja Sektor Informal
500.15.10.1	Tenaga Kerja Mandiri dan Sektor Informal
500.15.10.2	Pengembangan Padat Karya
500.15.10.3	Terapan Teknologi Tepat Guna
500.15.10.4	Pemberdayaan Pendampingan dan Kerjasama Antar Lembaga
500.15.11	Standardisasi Profesi
500.15.11.1	Sistem Informasi dan Registrasi
500.15.11.2	Pembakuan Akreditasi
500.15.12	Persyaratan Kerja, Kesejahteraan, dan Analisis Diskriminasi
500.15.12.1	Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerjasama Bersama
500.15.12.2	Perjanjian Kerja
500.15.12.3	Kesejahteraan Pekerja
500.15.12.4	Analisis Diskriminasi Syarat Kerja
500.15.13	Kelembagaan dan Pemasyarakatan Hubungan Industrial
500.15.13.1	Organisasi Pekerja dan Pengusaha
500.15.13.2	Kelembagaan Hubungan Industrial
500.15.13.3	Pemasyarakatan Hubungan Industrial
500.15.14	Pengupahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
500.15.14.1	Pengupahan
500.15.14.2	Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dalam Hubungan Kerja
500.15.15	Pencegahan dan Penyelesaian Pelestarian Hubungan Industrial
500.15.15.1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial
500.15.15.2	Penyelenggaraan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
500.15.15.3	Pemberdayaan Kelembagaan dan Tenaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
500.15.16	Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
500.15.16.1	Pengawasan Norma Kerja
500.15.16.2	Pengawasan Norma Hubungan Kerja dan Perlindungan Berserikat
500.15.16.3	Pengawasan Norma Penempatan dan Latihan Tenaga Kerja
500.15.17	Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak
500.15.17.1	Pengawasan Norma Kerja Perempuan
500.15.17.2	Pengawasan Norma Kerja Anak
500.15.17.3	Kerjasama Lintas Sektor
500.15.17.4	Advokasi Tenaga Kerja Perempuan dan Anak
500.15.18	Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja
500.15.18.1	Pengawasan Norma Mekanik, Pesawat Uap dan Bejana Tekan

	500.15.18.2	Pengawasan Norma Konstruksi Bangunan, Listrik dan Penanggulangan Kebakaran
	500.15.18.3	Pengawasan Norma Kesehatan Kerja
	500.15.18.4	Pengawasan Norma Lingkungan Kerja dan Bahan Berbahaya
	500.15.18.5	Pengawasan Norma Kelembagaan, Keahlian dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
500.15.19	Laporan Hasil Pengawasan Ketenagakerjaan	
500.15.20	Bina Penegakan Hukum	
	500.15.20.1	Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan
	500.15.20.2	Penyidikan Norma Ketenagakerjaan
	500.15.20.3	Pengembangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
	500.15.20.4	Kerjasama Penegakan Hukum
500.15.21	Pengkajian dan Bimbingan Teknis Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	
	500.15.21.1	Analisis dan Standardisasi bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja
	500.15.21.2	Hasil kajian, perekayasaan dan penerapan teknologi dan alih teknologi Keselamatan dan Kesehatan Kerja
	500.15.21.3	Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengkajian Keselamatan dan Kesehatan Kerja
	500.15.21.4	Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
500.15.22	Pengembangan SDM dan Kompetensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja	
	500.15.22.1	Program, Analisis dan Standardisasi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kompetensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja
	500.15.22.2	Penyebarluasan Informasi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kompetensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja
	500.15.22.3	Kerjasama Tingkat Nasional Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kompetensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja
	500.15.22.4	Kerjasama Tingkat Regional Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kompetensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja
	500.15.22.5	Kerjasama Tingkat Internasional Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kompetensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja
	500.15.22.6	Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kompetensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja

- 500.16 PENANAMAN MODAL
 - 500.16.1 Kebijakan di bidang Penanaman Modal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
 - 500.16.2 Perencanaan Penanaman Modal
 - 500.16.2.1 Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya
 - 500.16.2.2 Perencanaan Industri Manufaktur
 - 500.16.2.3 Perencanaan Jasa dan Kawasan
 - 500.16.2.4 Perencanaan Infrastruktur
 - 500.16.3 Pengembangan Iklim Penanaman Modal
 - 500.16.3.1 Deregulasi Penanaman Modal
 - 500.16.3.2 Pengembangan Potensi Daerah
 - 500.16.3.3 Pemberdayaan Usaha
 - 500.16.3.4 Pemberdayaan Usaha Pembinaan dan Penyuluhan
 - 500.16.3.5 Pemberdayaan Usaha Kemitraan Usaha
 - 500.16.3.6 Pemberdayaan Usaha Pelayanan Usaha
 - 500.16.4 Promosi Penanaman Modal
 - 500.16.4.1 Pengembangan Promosi
 - 500.16.4.2 Analisis Strategi Promosi
 - 500.16.4.3 Fasilitasi Promosi Luar Negeri
 - 500.16.4.4 Promosi Sektoral
 - 500.16.4.5 Fasilitasi Promosi Daerah
 - 500.16.4.6 Pameran dan Sarana Promosi
 - 500.16.5 Kerja Sama Penanaman Modal
 - 500.16.5.1 Kerja Sama Bilateral dan Multilateral
 - 500.16.5.2 Kerja Sama Regional
 - 500.16.5.3 Kerja Sama Dunia Usaha Internasional
 - 500.16.6 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
 - 500.16.6.1 Pemantauan Penanaman Modal
 - 500.16.6.2 Data Realisasi Penanaman Modal
 - 500.16.6.3 Bimbingan Sosialisasi Ketentuan Penanaman Modal
 - 500.16.6.4 Fasilitasi Penyelesaian Masalah
 - 500.16.6.5 Pengawasan Penanaman Modal
 - 500.16.6.6 Pencabutan/Pembatalan Perizinan Penanaman Modal
 - 500.16.7 Pelayanan Penanaman Modal
 - 500.16.7.1 Pelayanan Aplikasi
 - 500.16.7.2 Pelayanan Perizinan
 - 500.16.7.3 Pelayanan Konsultasi Perizinan
 - 500.16.7.4 Pelayanan Non Perizinan
 - 500.16.7.5 Pelayanan Fasilitas
- 500.17 PERTANAHAN
 - 500.17.1 Kebijakan di bidang Pertanahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
 - 500.17.2 Pengadaan dan Penataan Administrasi Pertanahan
 - 500.17.2.1 Fasilitasi Pengadaan Tanah
 - 500.17.2.2 Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan

	500.17.2.3	Data dan Informasi Pertanahan
	500.17.2.4	Advokasi dan Pengendalian
500.17.3	Penatagunaan dan Penguatan Hak Atas Tanah	
	500.17.3.1	Penatagunaan Tanah
	500.17.3.2	Data dan Pemetaan Tematik
	500.17.3.3	Penguatan Atas Tanah
500.17.4	Sengketa Tanah	
	500.17.4.1	Pengkajian dan Penanganan Sengketa
	500.17.4.2	Advokasi dan Pengendalian
500.18	TRANSMIGRASI	
500.18.1	Kebijakan di bidang Transmigrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
500.18.2	Penyediaan Tanah Transmigrasi	
	500.18.2.1	Fasilitasi Pengadaan Tanah
	500.18.2.2	Pengurusan Legalitas Tanah
	500.18.2.3	Dokumentasi Pertanahan
	500.18.2.4	Advokasi Pertanahan
500.18.3	Pembangunan Pemukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi	
	500.18.3.1	Penyiapan Lahan
	500.18.3.2	Penyiapan Sarana
	500.18.3.3	Penyiapan Prasarana
	500.18.3.4	Evaluasi Kelayakan Permukiman
500.18.4	Fasilitasi Penempatan Transmigrasi	
	500.18.4.1	Penyiapan Calon Transmigrasi
	500.18.4.2	Penyiapan Perpindahan
	500.18.4.3	Pelaksanaan Perpindahan
	500.18.4.4	Penataan dan Adaptasi
500.18.5	Partisipasi Masyarakat	
	500.18.5.1	Promosi dan Motivasi
	500.18.5.2	Kerja sama Kelembagaan
	500.18.5.3	Kerja sama Antar Daerah
	500.18.5.4	Pelayanan Investasi
500.18.6	Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	
	500.18.6.1	Perencanaan Teknis Pengembangan Masyarakat dan Kawasan
	500.18.6.2	Bina Sistem Informasi
	500.18.6.3	Perencanaan Pengembangan Kawasan
	500.18.6.4	Perencanaan Pengembangan Masyarakat
	500.18.6.5	Perencanaan Pengembangan Pusat Pertumbuhan
500.18.7	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Masyarakat	
	500.18.7.1	Bantuan Pangan dan Kesehatan
	500.18.7.2	Fasilitas Sosial Budaya
	500.18.7.3	Pengembangan Kelembagaan
	500.18.7.4	Bina Pendampingan Masyarakat Transmigrasi

- 500.18.8 Pengembangan Usaha
 - 500.18.8.1 Kewirausahaan
 - 500.18.8.2 Produksi
 - 500.18.8.3 Pengolahan Hasil dan Pemasaran
 - 500.18.8.4 Lembaga Ekonomi dan permodalan
- 500.18.9 Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan
 - 500.18.9.1 Analisis dan Standarisasi Sarana dan Prasarana
 - 500.18.9.2 Pengembangan Sarana
 - 500.18.9.3 Pengembangan Prasarana
 - 500.18.9.4 Evaluasi Pengembangan Sarana dan Prasarana
- 500.18.10 Penyerasian Lingkungan
 - 500.18.10.1 Persiapan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
 - 500.18.10.2 Adaptasi dan Mitigasi Lingkungan
 - 500.18.10.3 Evaluasi Perkembangan Permukiman Transmigrasi
 - 500.18.10.4 Evaluasi Perkembangan Pusat Pertumbuhan

600 PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAKERJAAN

600.1 PEKERJAAN UMUM

- 600.1.1 Kebijakan di bidang Pekerjaan Umum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 600.1.2 Penatagunaan Sumber Daya Air
 - 600.1.2.1 Perencanaan Wilayah Sungai
 - 600.1.2.2 Kelembagaan
 - 600.1.2.3 Pemanfaatan Sumber Daya Air
 - 600.1.2.4 Hidrologi dan Lingkungan Sumber Daya Air
 - 600.1.2.5 Pengaturan dan Pemantauan
- 600.1.3 Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air
 - 600.1.3.1 Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air
 - 600.1.3.2 Manajemen Mutu
 - 600.1.3.3 Informasi dan Data Sumber Daya Air
 - 600.1.3.4 Keterpaduan Pemrograman
- 600.1.4 Pengelolaan Sumber Daya Air
 - 600.1.4.1 Pengelolaan Sungai dan Pantai
 - 600.1.4.2 Pengelolaan Irigasi dan Rawa
 - 600.1.4.3 Pengelolaan Bendungan, Danau, Situ, dan Embung
 - 600.1.4.4 Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku
- 600.1.5 Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air
 - 600.1.5.1 Operasi dan Pemeliharaan Sungai dan Pantai
 - 600.1.5.2 Operasi dan Pemeliharaan Irigasi dan Rawa

	600.1.5.3	Operasi dan Pemeliharaan Bendungan, Danau, Situ, dan Embung
	600.1.5.4	Operasi dan Pemeliharaan Air Tanah dan Air Baku
	600.1.5.5	Operasi dan Pemeliharaan Pengendalian Lumpur Sidoarjo
600.1.6	Pengendalian Lumpur Sidoarjo (Bencana Lokal Lingkup Nasional)	
	600.1.6.1	Perencanaan Pengendalian Lumpur Sidoarjo
	600.1.6.2	Pemrograman Pengendalian Lumpur Sidoarjo
	600.1.6.3	Pelaksanaan Pengendalian Lumpur Sidoarjo
	600.1.6.4	Pengendalian Dampak Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan akibat Lumpur Sidoarjo
	600.1.6.5	Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
600.1.7	Pengembangan Jaringan Jalan	
	600.1.7.1	Keterpaduan Perencanaan
	600.1.7.2	Sistem Jaringan Jalan
	600.1.7.3	Lingkungan dan Keselamatan Jalan
600.1.8	Pembangunan Jalan	
	600.1.8.1	Standar dan Pedoman
	600.1.8.2	Manajemen Konstruksi
	600.1.8.3	Pengelolaan Gedometrik, Perkerasan, dan Drainage
	600.1.8.4	Pengelolaan Geoteknik dan Manajemen Lereng
600.1.9	Preservasi Jalan	
	600.1.9.1	Standar dan Pedoman
	600.1.9.2	Perencanaan Teknis
	600.1.9.3	Teknik Rekonstruksi
	600.1.9.4	Teknik Pemeliharaan Jalan
600.1.10	Pengelolaan Jembatan	
	600.1.10.1	Standar dan Pedoman
	600.1.10.2	Perencanaan Teknis
	600.1.10.3	Teknik Jembatan
	600.1.10.4	Teknik Terowongan dan Jembatan Khusus
600.1.11	Pengelolaan Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan, dan Fasilitas Jalan Daerah	
	600.1.11.1	Bimbingan Teknik Jalan Daerah
	600.1.11.2	Pengembangan Jalan Metropolitan dan Kota Besar
	600.1.11.3	Pembinaan Teknik Jalan Bebas Hambatan
600.1.12	Pengaturan Jalan Tol	
	600.1.12.1	Persiapan perusahaan jalan tol
	600.1.12.2	Pengadaan Investasi Jalan Tol
	600.1.12.3	Teknik Pengaturan Jalan Tol

	600.1.12.4	Pengambilalihan hak pengusahaan jalan tol
600.1.13		Keterpaduan Infrastruktur Permukiman
	600.1.13.1	Keterpaduan Perencanaan dan Kemitraan
	600.1.13.2	Keterpaduan Pembiayaan dan Pelaksanaan
600.1.14		Pengembangan Kawasan Permukiman
	600.1.14.1	Perencanaan Teknis
	600.1.14.2	Kawasan Permukiman Perkotaan
	600.1.14.3	Kawasan Permukiman Pedesaan
	600.1.14.4	Kawasan Permukiman Khusus
	600.1.14.5	Kelembagaan
600.1.15		Pembinaan Penataan Bangunan
	600.1.15.1	Perencanaan Teknis
	600.1.15.2	Penataan Bangunan Gedung
	600.1.15.3	Pengelolaan Rumah Negara
	600.1.15.4	Penataan Bangunan dan Lingkungan Khusus
	600.1.15.5	Kelembagaan
600.1.16		Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
	600.1.16.1	Perencanaan Teknis
	600.1.16.2	Sistem Penyediaan Air Minum Perkotaan
	600.1.16.3	Sistem Penyediaan Air Minum Pedesaan
	600.1.16.4	Sistem Penyediaan Air Minum Khusus
	600.1.16.5	Kelembagaan
	600.1.16.6	Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum
	600.1.16.7	Pengelolaan Laboratorium dan Bengkel Kerja
600.1.17		Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman
	600.1.17.1	Perencanaan Teknis
	600.1.17.2	Pengelolaan Air Limbah
	600.1.17.3	Pengelolaan Persampahan
	600.1.17.4	Penyehatan Lingkungan Permukiman Khusus
	600.1.17.5	Kelembagaan
	600.1.17.6	Pengelolaan Laboratorium dan Bengkel Kerja
600.1.18		Pemantauan dan Evaluasi
600.2		PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
600.2.1		Kebijakan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
600.2.2		Perencanaan Pembiayaan Perumahan
	600.2.2.1	Keterpaduan Perencanaan
	600.2.2.2	Strategi Pembiayaan dan Analisa Pasar Perumahan
	600.2.2.3	Kemitraan
600.2.3		Pola Pembiayaan Perumahan
	600.2.3.1	Pola Pembiayaan Perumahan Rumah Umum

	600.2.3.2	Pola Pembiayaan Perumahan Rumah Swadaya dan Mikro Perumahan
	600.2.3.3	Pola Investasi Perumahan
600.2.4		Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan
	600.2.4.1	Sumber Pembiayaan Primer
	600.2.4.2	Sumber Pembiayaan Sekunder
	600.2.4.3	Sumber Tabungan Perumahan dan Pembiayaan Lainnya
	600.2.4.4	Sistem Pembiayaan Perumahan
	600.2.4.5	Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan
600.2.5		Perencanaan Penyediaan Perumahan
	600.2.5.1	Keterpaduan Perencanaan
	600.2.5.2	Analisa Teknik
	600.2.5.3	Rencana Pengembangan Lingkungan Hunian
	600.2.5.4	Kemitraan dan Kelembagaan
600.2.6		Penyediaan Rumah Susun
	600.2.6.1	Perencanaan Teknik
	600.2.6.2	Penyediaan
	600.2.6.3	Penghunian, Pengalihan, dan Pemanfaatan
	600.2.6.4	Pengelolaan
600.2.7		Penyediaan Rumah Khusus
	600.2.7.1	Perencanaan Teknik
	600.2.7.2	Penyediaan dan Pengelolaan Rumah Tapak Khusus
	600.2.7.3	Bimbingan teknis dan supervisi
	600.2.7.4	Penyelenggaraan Bantuan Rumah Swadaya
	600.2.7.5	Perencanaan Teknik
	600.2.7.6	Fasilitas <i>Backlog</i> Rumah Swadaya dan Rumah Tidak Layak Huni
	600.2.7.7	Pelaksanaan Bantuan Simultan
600.2.8		Penyediaan Rumah Umum dan Komersial
	600.2.8.1	Perencanaan Teknik
	600.2.8.2	Pemberian Bantuan Rumah Umum
	600.2.8.3	Fasilitasi Hunian Berimbang
	600.2.8.4	Fasilitasi Penyediaan Lahan Perumahan
600.2.9		Investasi Infrastruktur
	600.2.9.1	Pelaksanaan Kebijakan Investasi Infrastruktur
	600.2.9.2	Sinkronisasi Investasi Infrastruktur
	600.2.9.3	Fasilitasi dan Mitigasi Risiko Investasi Infrastruktur
	600.2.9.4	Pasar Infrastruktur
600.2.10		Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
	600.2.10.1	Sistem Penyelenggaraan
	600.2.10.2	Kontrak Konstruksi
	600.2.10.3	Konstruksi Berkelanjutan
	600.2.10.4	Manajemen Mutu

600.2.11	Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi
600.2.11.1	Kelembagaan
600.2.11.2	Material dan Peralatan Konstruksi
600.2.11.3	Teknologi Konstruksi dan Produksi Dalam Negeri
600.2.11.4	Usaha Jasa Konstruksi
600.2.12	Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi
600.2.12.1	Standar dan Materi Kompetensi
600.2.12.2	Penerapan Kompetensi
600.2.12.3	Pengembangan Profesi Jasa Konstruksi
600.2.12.4	Pengembangan Produktivitas
600.2.13	Peningkatan Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi
600.2.13.1	Peningkatan Kerjasama
600.2.13.2	Pemberdayaan Jasa Konstruksi
600.2.14	Peningkatan Jasa Konstruksi
600.2.14.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Rencana Kerja
600.2.14.2	Pelaksanaan Pengendalian Mutu
600.2.15	Penerapan Teknologi Konstruksi
600.2.15.1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Kerja sama Penerapan Teknologi Konstruksi
600.2.15.2	Pengembangan Materi
600.2.15.3	Pendayagunaan Material dan Peralatan Konstruksi
600.2.16	Rencana Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Perumahan Rakyat (PUPR)
600.2.16.1	Antar Sektor
600.2.16.2	Antar Wilayah
600.2.17	Pengembangan Kawasan Strategis
600.2.17.1	Keterpaduan Infrastruktur Kawasan Strategis
600.2.17.2	Pengembangan Infrastruktur Antarkawasan Strategis
600.2.18	Pengembangan Kawasan Perkotaan
600.2.18.1	Pengembangan Infrastruktur Kawasan Metropolitan
600.2.18.2	Pengembangan Infrastruktur Kawasan Kota Besar dan Kota Baru
600.2.18.3	Pengembangan Infrastruktur Kawasan Kota Kecil dan Pedesaan
600.2.18.4	Analisa Manfaat dan Skema Pembiayaan
600.2.18.5	Sinkronisasi Program dan Pembiayaan Infrastruktur Perumahan Rakyat
600.2.19	Pemantauan dan Evaluasi
600.3	TATA RUANG (TATA KOTA)
600.3.1	Kebijakan di bidang Tata Ruang yang dilakukan Pemerintahan Daerah
600.3.2	Perencanaan
600.3.2.1	Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RT/RW)
600.3.2.2	Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)

	600.3.2.3	Rencana Tata Ruang Strategis Kabupaten
	600.3.2.4	Rencana Tata Bangun Lingkungan (RTBL)
	600.3.2.5	Rencana Pengembangan Sistem Sarana dan Prasarana Kabupaten
	600.3.2.6	Rencana Teknis Prasarana Kota
	600.3.2.7	Rencana Teknis Rencana Peremajaan dan Pengembangan Kota dan Prasarana Kota
600.3.3	Pemanfaatan dan Pengendalian	
	600.3.3.1	Evaluasi dan Pengawasan Penata Ruang
	600.3.3.2	Ijin Pemanfaatan Ruang
	600.3.3.3	Pembatalan Ijin Pemanfaatan Ruang
600.3.4	Pemetaan	
	600.3.4.1	Peta Dasar
	600.3.4.2	Survey Pemetaan Ruang Darat
	600.3.4.3	Survey Pemetaan Ruang Air
	600.3.4.4	Survey Pemetaan Ruang Udara
600.4	LINGKUNGAN HIDUP	
600.4.1	Kebijakan di bidang Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
600.4.2	Perencanaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	
	600.4.2.1	Inventarisasi, Penerapan ekoregion, dan rencana perlindungan dan pengelolaan Lingkungan
	600.4.2.2	Evaluasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam
600.4.3	Penerapan Kebijakan Wilayah dan Sektor	
	600.4.3.1	Evaluasi Penerapan
	600.4.3.2	Perencanaan Lingkungan Hidup
600.4.4	Ekonomi Lingkungan	
600.4.5	Dampak Lingkungan	
	600.4.5.1	Bimtek Dampak Lingkungan
	600.4.5.2	Penerapan sistem kebijakan Dampak lingkungan
	600.4.5.3	Evaluasi dan Tindak Lanjut
600.4.6	Pemantauan dan Pengawasan	
	600.4.6.1	Manufaktur Prasarana dan Jasa
	600.4.6.2	Pertambangan Energi, Minyak dan Gas
	600.4.6.3	Agro Industri dan Usaha Skala Kecil
	600.4.6.4	Udara Sumber Bergerak
600.4.7	Evaluasi dan Pengembangan	
	600.4.7.1	Manufaktur, Prasarana dan Jasa
	600.4.7.2	Pertambangan Energi, Minyak dan Gas
	600.4.7.3	Agro Industri dan Usaha Skala Kecil
	600.4.7.4	Udara Sumber Bergerak
600.4.8	Keanekaragaman Hayati dan pengendalian Kerusakan Lahan	
	600.4.8.1	Pengembangan
	600.4.8.2	Pemanfaatan
	600.4.8.3	Pengelolaan Sumber Daya Genetik

	600.4.8.4	Keamanan Hayati
	600.4.8.5	Pengendalian kerusakan Lahan
600.4.9		Kerusakan Ekosistem Perairan Darat
	600.4.9.1	Kerusakan Ekosistem
	600.4.9.2	Rawa
600.4.10		Mitigasi dan pelestarian Fungsi Atmosfer
	600.4.10.1	Perangkat mitigasi
	600.4.10.2	Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca
	600.4.10.3	Pengendalian Bahan Perusak Ozon
	600.4.10.4	Pengendalian Kerusakan Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan
600.4.11		Adaptasi Perubahan Iklim
	600.4.11.1	Perangkat Adaptasi Perubahan Iklim (antara lain: Pengembangan perangkat Adaptasi Perubahan Iklim, Pemantauan dan Evaluasi Adaptasi Perusahaan Iklim)
	600.4.11.2	Kerentanan Perubahan Iklim
600.4.12		Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun
	600.4.12.1	Registrasi dan Notifikasi
	600.4.12.2	Pemantauan Bahan Berbahaya dan Beracun
	600.4.12.3	Evaluasi dan Tindak Lanjut
600.4.13		Verifikasi Pengelolaan Limbah bahan Berbahaya dan beracun
	600.4.13.1	Pengumpulan dan pemanfaatan
	600.4.13.2	Pengangkutan dan Pengolahan
	600.4.13.3	Penimbunan dan Dumping
	600.4.13.4	Notifikasi dan Rekomendasi Limbah Lintas batas
600.4.14		Pengelolaan Limbah B3 dan Pemulihan Kontaminasi Limbah B3
	600.4.14.1	Pemantauan
	600.4.14.2	Tanggap darurat dan pemeliharaan Kontaminasi
600.4.15		Pengelolaan Sampah
	600.4.15.1	Pembatasan sampah
	600.4.15.2	Daur Ulang dan Pemanfaatan Sampah
	600.4.15.3	Pembentukan Dewan Adipura
	600.4.15.4	Penetapan pemenang adipura
600.4.16		Hukum Administrasi Lingkungan
	600.4.16.1	Pengelolaan dan pengembangan pengaduan
	600.4.16.2	Penataan hukum administrasi lingkungan
600.4.17		Penyelesaian Sengketa Lingkungan
	600.4.17.1	Penyelesaian sengketa Melalui Pengadilan
	600.4.17.2	Penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan
600.4.18		Penegakan hukum pidana lingkungan
	600.4.18.1	Penyidikan
	600.4.18.2	Koordinasi penuntutan, evaluasi, dan tindak lanjut

	600.4.18.3	Koordinasi pembinaan penyidik PNS
600.4.19		Komunikasi Lingkungan
	600.4.19.1	Pengembangan Komunikasi
	600.4.19.2	Publikasi dan Kampanye
600.4.20		Penguatan Inisiatif Masyarakat
	600.4.20.1	Komunitas Pendidikan Lingkungan
	600.4.20.2	Kearifan Lingkungan
600.4.21		Peningkatan Peran Masyarakat
	600.4.21.1	Masyarakat Perkotaan
	600.4.21.2	Masyarakat Pedesaan
600.4.22		Peningkatan Peran Organisasi Kemasyarakatan
	600.4.22.1	Organisasi Sosial Masyarakat
	600.4.22.2	Organisasi Profesi Dunia Usaha
600.4.23		Data dan Informasi Lingkungan
	600.4.23.1	Pengelolaan Data
	600.4.23.2	Pengelolaan Informasi
	600.4.23.3	Pengembangan Perangkat Lunak
	600.4.23.4	Pengembangan Sistem dan Layanan Jaringan
600.4.24		Kelembagaan Lingkungan
	600.4.24.1	Kelembagaan dan Tata Laksana
	600.4.24.2	Fasilitasi Standar Pelayanan Minimal
600.4.25		Standardisasi dan teknologi
	600.4.25.1	Standardisasi Manajemen dan dan Pengujian Lingkungan
	600.4.25.2	Standardisasi Kompetensi Keahlian dan Lembaga Penyedia Jasa Lingkungan
	600.4.25.3	Teknologi Ramah Lingkungan
600.4.26		Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan
	600.4.26.1	Pemantauan dan Kajian Kualitas Lingkungan
	600.4.26.2	Laboratorium Rujukan dan Pengujian

700 PENGAWASAN

700.1 PENGAWASAN INTERNAL

700.1.1		Rencana Pengawasan
	700.1.1.1	Rencana Strategis Pengawasan
	700.1.1.2	Rencana Kerja Pengawas Tahunan
	700.1.1.3	Rencana Kinerja Tahunan
	700.1.1.4	Rencana dan Penetapan Kinerja Tahunan
	700.1.1.5	Rakor Pengawasan Tingkat Daerah
700.1.2		Pelaksanaan Pengawasan
	700.1.2.1	Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Pemeriksaan Operasional (LHPO), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen (LAI) yang memerlukan tindak lanjut (TL)
	700.1.2.2	Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur Tindak Pidana

	Korupsi (TPK) dan memerlukan tindak lanjut
700.1.2.3	Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan tidak memerlukan tindak lanjut
700.1.2.4	Laporan Perkembangan Penanganan Surat Pengaduan Masyarakat
700.1.2.5	Laporan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Temuan
700.1.2.6	Laporan Perkembangan Barang Milik Negara
700.1.2.7	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi
700.1.2.8	Laporan Kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan dan Review
700.1.2.9	<i>Good Corporate Governance (GCG)</i>

800 KEPEGAWAIAN

800.1 SUMBER DAYA MANUSIA

800.1.1	Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara
800.1.1.1	Perencanaan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara (antara lain: Bahan penyusunan rencana kebutuhan, Analisis Kebutuhan, Pengolahan Data Kebutuhan)
800.1.1.2	Perencanaan Pertimbangan Formasi (antara lain: Pertimbangan teknis penetapan formasi ASN, Pertimbangan teknis penetapan formasi ikatan dinas)
800.1.1.3	Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara
800.1.1.4	Standardisasi Jabatan (antara lain: Informasi Jabatan, Kompetensi Jabatan, Klasifikasi Jabatan)
800.1.2	Formasi dan Pengadaan Pegawai
800.1.2.1	Formasi ASN (antara lain: Usulan formasi, Usulan permintaan formasi kepada Menpan RB dan Kepala BKN, Persetujuan Formasi, Penetapan Formasi, Penetapan Formasi Khusus)
800.1.2.2	Proses Rekrutmen/Pengadaan ASN (antara lain: Proses Rekrutmen ASN, Penetapan Pengumuman Kelulusan ASN)
800.1.2.3	Pengumuman Kelulusan ASN
800.1.2.4	Berkas Lamaran Yang Tidak Diterima
800.1.2.5	Pengangkatan ASN
800.1.2.6	Open Bidding (Seleksi Terbuka Jabatan)
800.1.2.7	Pengelolaan Sistem Rekrutmen ASN
800.1.2.8	Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi ASN
800.1.3	Mutasi Pegawai
800.1.3.1	Usulan Alih Status, Pindah Instansi, Pindah Wilayah Kerja, Diperbantukan,

		Dipekerjakan, Penugasan Sementara, Mutasi antar Perwakilan, Mutasi ke dan dari Perwakilan, Pemindahan Sementara, Persetujuan/ Pertimbangan Kepala BKN
	800.1.3.2	Kenaikan Pangkat/Golongan/Jabatan
	800.1.3.3	Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Struktural/Fungsional
	800.1.3.4	Perubahan Data Dasar/ Status/Kedudukan Hukum Pegawai
	800.1.3.5	Peninjauan Masa Kerja
	800.1.3.6	Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (BAPERJAKAT)
800.1.4	Pengembangan Karir	
	800.1.4.1	Usulan Tugas Belajar/ Ijin Belajar/ Diklat/ Kursus/ Magang/ Ujian Dinas/ Praktek Kerja di Instansi lain/ Pertukaran antar ASN dengan pegawai swasta
	800.1.4.2	Penyesuaian ijazah
	800.1.4.3	Penyusunan Sistem Karier
	800.1.4.4	Standar Kinerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja
	800.1.4.5	Angka Kredit (antara lain: Pengajuan Daftar Usul Pengajuan Angka Kredit, Penilaian Daftar Usul Pengajuan Angka Kredit)
800.1.5	Kinerja Aparatur Sipil Negara	
	800.1.5.1	Hasil Penilaian Kinerja dan Standar Kerja
	800.1.5.2	Pengelolaan Database dan Analisis Sistem Informasi Kinerja
	800.1.5.3	Evaluasi dan Pemantauan Penilaian Kinerja dan Standar Kinerja
800.1.6	Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun ASN	
	800.1.6.1	Kode Etik Pegawai
	800.1.6.2	Disiplin
	800.1.6.3	Pemberhentian Dengan Hormat
	800.1.6.4	Pemberhentian Dengan Tidak Hormat
	800.1.6.5	Pemberhentian Sementara
	800.1.6.6	Pensiun ASN (antara lain: Administrasi Pensiun ASN, Penetapan Pensiun ASN, Penetapan Pertimbangan Teknis Pensiun ASN, Pensiun Pejabat Negara dan Jada/Dudanya)
800.1.7	Bantuan Hukum	
800.1.8	Status dan Kedudukan Pegawai	
	Status Kepegawaian	
	Kedudukan Kepegawaian	
	Keberatan Pegawai	
	Perselisihan/Sengketa Kepegawaian	
800.1.9	Sistem Informasi Kepegawaian	
	800.1.9.1	Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian
	800.1.9.2	Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian

	800.1.9.3	Pengembangan Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian Elektronik
	800.1.9.4	Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian Fisik
800.1.10	Pengawasan dan pengendalian	
	800.1.10.1	Formasi, Pengadaan dan Pasca Diklat
	800.1.10.2	Kepangkatan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Dalam Jabatan
	800.1.10.3	Gaji dan Tunjangan, Kesejahteraan dan Kinerja
	800.1.10.4	Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun ASN
	800.1.10.5	Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian
	800.1.10.6	Sanggahan terhadap Permasalahan Tenaga Honorer
800.1.11	Administrasi Pegawai	
	800.1.11.1	Surat Perintah Dinas/Surat Tugas
	800.1.11.2	Cuti Sakit
	800.1.11.3	Cuti Bersalin
	800.1.11.4	Cuti Tahunan
	800.1.11.5	Cuti Alasan Penting
	800.1.11.6	Cuti Besar
	800.1.11.7	Cuti Di luar Tanggungan Negara
	800.1.11.8	Karpeg/KPE/Karis/Karsu
	800.1.11.9	Keanggotaan Organisasi Profesi/Kedinasan
	800.1.11.10	Laporan Pajak Penghasilan Pribadi (LP2P)
	800.1.11.11	Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4)
	800.1.11.12	Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
	800.1.11.13	Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala, Mutasi Gaji/ tunjangan
800.1.12	Kesejahteraan Pegawai	
	800.1.12.1	Pemeliharaan Kesehatan Pegawai
	800.1.12.2	Asuransi Pegawai/BPJS
	800.1.12.3	Tabungan Perumahan
	800.1.12.4	Bantuan Sosial
	800.1.12.5	Pakaian Dinas
	800.1.12.6	Layanan Pegawai yang Meninggal Karena Dinas
	800.1.12.7	Pemberian Tali Kasih
	800.1.12.8	Pemberian Piagam Penghargaan dan Tanda Jasa
	800.1.12.9	Olahraga dan Rekreasi
	800.1.12.10	Rekam Medis
800.1.13	Administrasi Perseorangan	
	800.1.13.1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)
	800.1.13.2	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
	800.1.13.3	Pejabat Negara dan pejabat lainnya yang disetarakan
	800.1.13.4	Sekretaris Daerah

		800.1.13.5	ASN berjasa/terlibat dalam peristiwa berskala nasional
	800.1.14	Penilaian Kompetensi	
		800.1.14.1	Penilaian Kompetensi
		800.1.14.2	Hasil Penilaian Kompetensi
800.2	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
	800.2.1	Kebijakan di bidang Pendidikan dan Pelatihan yang dilakukan oleh Pemerintah daerah	
	800.2.2	Pendidikan dan Pelatihan	
		800.2.2.1	Sistem Informasi program dan pembinaan diklat
		800.2.2.2	Pedoman-pedoman kediklatan
		800.2.2.3	Kurikulum-kurikulum diklat
		800.2.2.4	Modul-modul diklat
		800.2.2.5	Panduan fasilitator
		800.2.2.6	Saran/rekomendasi penyelenggaraan diklat
		800.2.2.7	Notulen sosialisasi/Rapat Koordinasi Kebijakan Diklat
		800.2.2.8	Monitoring dan evaluasi program dan pembinaan diklat
		800.2.2.9	Konsultasi, advokasi, asistensi diklat
	800.2.3	Widyaiswara	
		800.2.3.1	Seleksi dan pengembangan Widyaiswara
		800.2.3.2	Sertifikasi Widyaiswara
		800.2.3.3	Monitoring dan evaluasi Widyaiswara
		800.2.3.4	Penilaian Widyaiswara
		800.2.3.5	Konsultasi, advokasi dan asistensi Widyaiswara
		800.2.3.6	Sistem Informasi Pembinaan Widyaiswara
	800.2.4	Penyelenggaraan Diklat	
		800.2.4.1	Perencanaan; peserta, pengajar, penjadwalan Penyelenggaraan Diklat
		800.2.4.2	Penyelenggaraan Penyelenggaraan Diklat
		800.2.4.3	Konsultasi, advokasi, asistensi penyelenggaraan diklat
		800.2.4.4	Pengembangan bahan ajar dan metodologi pembelajaran
		800.2.4.5	Sistem informasi diklat
		800.2.4.6	Monitoring Penyelenggara Diklat
		800.2.4.7	Monitoring dan evaluasi Pasca diklat
	800.2.5	Alumni	
900	KEUANGAN		
	900.1	KEUANGAN DAERAH	
		900.1.1	Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan(APBD-P)
		900.1.1.1	Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran (PPA)
		900.1.1.2	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKASKPD)

	900.1.1.3	Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan
	900.1.1.4	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P)
900.1.2	Penyusunan Anggaran	
	900.1.2.1	Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) kecamatan
	900.1.2.2	Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kota
	900.1.2.3	Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RDPA) SKPD yang telah disetujui Sekretaris Daerah
	900.1.2.4	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang telah disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
900.1.3	Pelaksanaan Anggaran	
	900.1.3.1	Surat Penyedia Dana (SPP, SPM dan SP2D): UP, GU, TU, LS
	900.1.3.2	Pendapatan
	900.1.3.3	Belanja
	900.1.3.4	Pembiayaan Daerah
	900.1.3.5	Dokumen Penatausahaan Keuangan
	900.1.3.6	Pertanggungjawaban Penggunaan Dana
	900.1.3.7	Daftar Gaji
	900.1.3.8	Kartu Gaji
	900.1.3.9	Data Rekening Bendahara Umum Daerah (BUD)
	900.1.3.10	Laporan Keuangan
900.1.4	Pinjaman/Hibah Luar Negeri	
	900.1.4.1	Permohonan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (<i>Blue Book</i>)
	900.1.4.2	Dokumen Kesanggupan Negara Donor untuk Membiayai (<i>Green Book</i>)
	900.1.4.3	Dokumen <i>Memorandum of Understanding (MoU)</i> , dan dokumen sejenisnya
	900.1.4.4	Dokumen <i>Loan Agreement</i> (PHLN) (antara lain: <i>Draft Agreement</i> , <i>Legal Opinion</i> , Surat Menyurat dengan Lender)
	900.1.4.5	Alokasi dan Relokasi Penggunaan Dana Luar Negeri (antara lain: usulan luncuran dana)
	900.1.4.6	Aplikasi Penarikan Dana BLN berikut lampirannya
	900.1.4.7	Dokumen Otorisasi Penarikan Dana (<i>Payment Advice</i>)
	900.1.4.8	Dokumen Realisasi Pencairan Dana Bantuan Luar Negeri (antara lain: Surat Perintah Pencairan Dana, SPM beserta lampirannya, a.l. : SPP, Kontrak, BA, dan data pendukung lainnya.)
	900.1.4.9	<i>Replenishment</i> (Permintaan Penarikan Dana dari Negara Donor) antara lain : <i>No</i>

		<i>Objection Letter (NOL), Project Implementation, Notification of Contract, Withdrawal Authorization (WA)</i>
	900.1.4.10	Staff Appraisal Report
	900.1.4.11	Report /Laporan
	900.1.4.12	Laporan Hutang Daerah
	900.1.4.13	Completion Report/Annual Report
	900.1.4.14	Ketentuan/Peraturan yang menyangkut Pinjaman/Hibah Luar Negeri
900.1.5	Pengelolaan APBD/Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN)	
900.1.6	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)	
	900.1.6.1	Manual Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)
	900.1.6.2	Dokumen Kebijakan Akuntansi
	900.1.6.3	Arsip Data Komputer dan Berita Acara Rekonsiliasi
	900.1.6.4	Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Bulanan/Triwulanan/Semesteran
900.1.7	Penyaluran Anggaran Tugas Pembantuan	
	900.1.7.1	Surat Penetapan Pemimpin Proyek/Bagian Proyek, Bendahara, atas Penggunaan Anggaran Kegiatan Pembantuan, termasuk Specimen Tanda Tangan
	900.1.7.2	Berkas Permintaan Pembayaran (SPP) dan lampirannya :(antara lain: SPP-SPP-Daftar Perincian Penggunaan SPPR-SPDR-L, SPM-LS, SPM-DU, bilyet giro, SPM Nihil, Penagihan/Invoice, Faktur Pajak, Bukti Penerimaan Kas/Bank beserta Bukti Pendukungnya a.l. : Copy Faktur Pajak dan Nota Kredit Bank, Permintaan Pelayanan Jasa/ <i>Service Report</i> dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan)
	900.1.7.3	Buku Rekening Bank
	900.1.7.4	Keputusan Pembukuan Rekening
	900.1.7.5	Pembukuan anggaran terdiri :(antara lain: Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu, Register dan Buku Tambahan, Daftar Pembukuan Pencairan/Pengeluaran (DPP), Daftar Himpunan Pencairan (DHP), dan Rekening Koran)
900.1.8	Penerimaan Anggaran Tugas Pembantuan	
	900.1.8.1	Berkas Penerimaan Keuangan Pelaksanaan dan Tugas Pembantuan termasuk Dana Sisa atau Pengeluaran lainnya
	900.1.8.2	Berkas Penerimaan Pajak termasuk PPh 21, PPh 22, PPh 23, dan PPn dan Denda Keterlambatan Menyelesaikan Pekerjaan
900.1.9	Penyusunan Anggaran Pilkada dan Biaya Bantuan Pemilu Dari APBD (antara lain: Kebijakan Keuangan Pilkada dan Penyusunan Anggaran Bantuan Pemilu, Peraturan/Pedoman/Standar Belanja Pegawai, Barang	

	dan Jasa, Operasional dan Kontingensi untuk Biaya Pilkada dan Bantuan Pemilu, Bahan Usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Pilkada KPUD dan Panwasda Kota, PPK, PPS, KPPS dan Permohonan Pengajuan RKA KPUD dan Panwas, Berkas Pembahasan RKA Pilkada dan Bantuan Pemilu, Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Pilkada dan Bantuan Pemilu Kota, Dokumen Rancangan Anggaran Satuan Kerja (DRASK) Pilkada KPUD dan Panwas Kota dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD, Berkas Pembentukan Dana Cadangan Pilkada, Bahan Rapat Rancangan Peraturan Daerah tentang Pilkada, dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD, Nota Persetujuan DPRD tentang Perda APBD Pilkada dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD)
900.1.10	Pelaksanaan Anggaran PILKADA dan Anggaran Biaya Bantuan Pemilu
900.1.10.1	Berkas Penetapan Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara KPUD, Bendahara Panwasda dan Bendahara pada Panitia Pilkada dan Pemilu
900.1.10.2	Berkas Penerimaan Komisi, Rabat Pembayaran Pengadaan Jasa, Bunga, Pelaksanaan Pilkada/Pemilu
900.1.10.3	Berkas setor sisa dana Pilkada/Pemilu termasuk setor komisi pengadaan barang/jasa, rabat, bunga, jasa giro Berkas Penyaluran Biaya Pemilu termasuk diantaranya Bukti Transfer Bank
900.1.10.4	Pedoman Dokumen Penyediaan Pembiayaan Kegiatan Operasional (PPKO) Pemilu termasuk Perubahan/Pergeseran/Revisinya
900.1.11	Pemeriksaan/Pengawasan Keuangan Daerah
900.1.11.1	Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan
900.1.11.2	Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Internal
900.1.11.3	Laporan Aparat Pemeriksa Fungsional
900.1.11.4	Dokumen Penyelesaian Kerugian Daerah
900.1.12	Anggaran Daerah
900.1.12.1	Anggaran Daerah
900.1.12.2	Dukungan Teknis Anggaran Daerah
900.1.13	Pendapatan dan Investasi Daerah
900.1.13.1	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (antara lain: Fasilitasi pelaksanaan kebijakan standardisasi pajak daerah dan retribusi daerah, Penyiapan bahan perumusan bimbingan teknis pajak daerah dan retribusi daerah, Penyiapan bahan perumusan analisis dan evaluasi, pemantauan pajak daerah dan retribusi daerah, Penyiapan bahan perumusan

		kebijakan fasilitasi pemberian insentif pajak daerah dan retribusi daerah)
900.1.13.2		Badan Usaha Milik Daerah (antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang usaha milik daerah lembaga keuangan, Fasilitas serta bimbingan teknis di bidang badan usaha milik daerah lembaga non keuangan, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi badan usaha milik daerah)
900.1.13.3		Badan Layanan Umum Daerah (antara lain: Analisis, standardisasi teknis, fasilitasi serta bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, Pembinaan pelaksanaan kebijakan, standardisasi teknis, prosedur dan kriteria, fasilitasi serta bimbingan teknis penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah)
900.1.13.4		Pengelolaan Kekayaan Daerah (antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis pengelolaan kekayaan , Fasilitasi serta bimbingan teknis investasi daerah, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan kekayaan dan investasi daerah)
900.1.13.5		Pinjam Dan Obligasi Daerah (antara lain: Fasilitasi pelaksanaan kebijakan pinjaman dan hibah kepada pemerintah daerah dan/atau badan usaha milik daerah, Fasilitasi pelaksanaan kebijakan obligasi daerah, Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dana bergulir yang bersumber dari APBN, Bimbingan teknis obligasi daerah, dana bergulir serta penyertaan modal daerah, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pinjaman dan hibah, obligasi daerah, dan dana bergulir, dan penyertaan modal daerah)
900.1.14	Fasilitasi Dana	Perimbangan
	900.1.14.1	Fasilitasi Dana Alokasi Umum (antara lain: Koordinasi penyiapan data dasar penghitungan, dan rekonsiliasi dana alokasi umum, Sosialisasi dan supervisi dana alokasi umum, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana alokasi umum)
	900.1.14.2	Fasilitasi Dana Alokasi Khusus (antara lain: Koordinasi penyiapan data dasar. Sosialisasi dan supervisi dana alokasi khusus, Penyiapan pelaksanaan

		monitoring, evaluasi dana alokasi khusus)
900.1.14.3		Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam (antara lain: Koordinasi penyiapan data dasar perhitungan, dan rekonsiliasi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam, Sosialisasi dan supervisi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam)
900.1.14.4		Dana Otonomi Khusus dan Dana Transfer Lainnya (antara lain: Sosialisasi dan supervisi dana otonomi khusus, Sosialisasi dan supervisi dan transfer lainnya, Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan otonomi khusus dan dana transfer lainnya)
900.1.14.5		Dukungan Teknis Fasilitasi Dana Perimbangan (antara lain: Penyiapan sinkronisasi kebijakan dan perimbangan, Penyiapan dukungan teknis dana perimbangan, Penyiapan data dan informasi untuk penyusunan laporan dana perimbangan)
900.1.15	Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	
900.1.15.1		Akuntansi dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah)
900.1.15.2		Pembinaan Kinerja dan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah (antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang pembinaan kinerja dan kapasitas pengelolaan keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah)
900.1.15.3		Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah (antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang pembinaan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah)
900.1.15.4		Kajian Kebijakan dan Bantuan Keterangan Ahli (antara lain: penyiapan bahan bantuan keterangan ahli di bidang keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah)

900.1.15.5 Data Informasi dan Pengelolaan Keuangan Daerah (antara lain: penyiapan sinkronisasi kebijakan pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah, penyiapan data dan informasi untuk penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah, pengelolaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah)

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO

